



**BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 21 TAHUN 2017**

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 126);

14. Peraturan ...

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 4 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Datar 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 4 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk 5 (lima) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
13. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah dalam mencapai tujuan.
15. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Pasal 2

- (1) RKPDP Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.
- (2) RKPDP Tahun 2018 disusun dengan berpedoman pada rancangan Perubahan RPJMD Tahun 2016 – 2021, RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) RKPDP Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi :
 - a. Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2018;
 - b. Penyusunan Rancangan KUA Tahun 2018;
 - c. Penyusunan rancangan PPAS APBD Tahun 2018; dan
 - d. Penyusunan rancangan APBD Tahun 2018.

Pasal 3

- (1) RKPDP Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPDP TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI : PENUTUP

(2) RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 31 Mei 2017

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

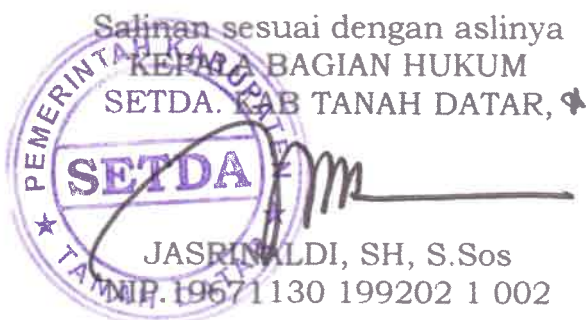
Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 31 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2017 NOMOR 22



BAB I

PENDAHULUAN

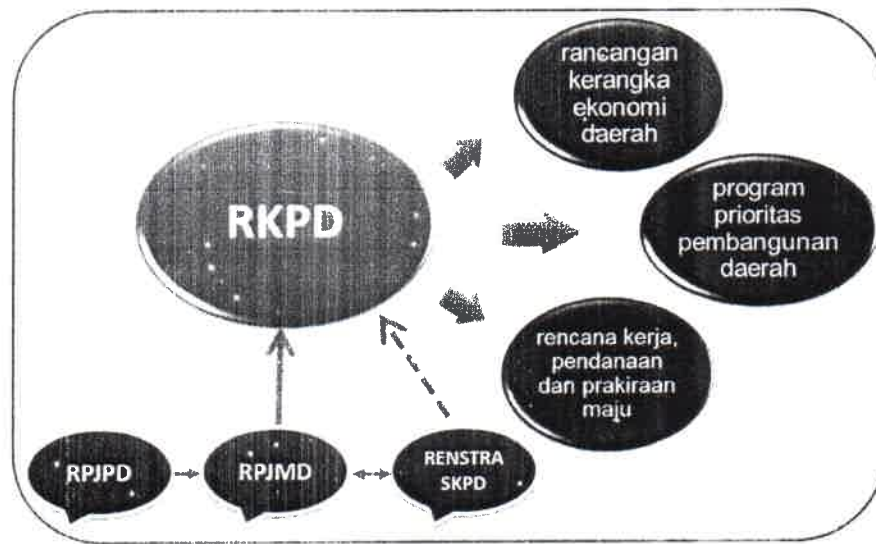
1.1. Latar Belakang

Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara terpadu sesuai dengan kewenangannya. Dokumen perencanaan pembangunan dimaksud adalah dokumen rencana pembangunan tahunan daerah yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode satu tahun, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan merupakan pelaksanaan tahun ke-3 RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 - 2021.

Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Secara substansi, RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat maupun daerah ataupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat (UU Nomor 25 tahun 2004). Penjabaran RKPD dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.1
Penjabaran Dokumen RKPD Tahun 2018



Penyusunan RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu penyusunan rancangan awal RKPD, rancangan RKPD, rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD dengan menerapkan pendekatan teknokratik, *top down* dan *bottom up*.

Pendekatan teknokratik dilakukan melalui forum diskusi dan konsultasi yang melibatkan pemangku kepentingan dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Pendekatan *top down* dilakukan dengan mengacu pada arah kebijakan dalam RPJMN Tahun 2015 – 2019, RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 dan RPJPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005 – 2025. Pendekatan *bottom up* dilakukan dengan memperhatikan usulan dari nagari dan kecamatan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Berbagai pendekatan perencanaan tersebut diperkuat dengan penerapan perencanaan berbasis kinerja dan berbasis sistem informasi (*e-planning* dan *e-budgeting*) untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas seluruh proses perencanaan dan penganggaran daerah. Disamping itu, penerapan sistem *e-planning* bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program, kegiatan dan pagu anggaran yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah benar-benar dihasilkan melalui proses perencanaan yang transparan mulai dari Musrenbang Nagari, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, Musrenbang Kabupaten serta melalui penjangkaran aspirasi masyarakat pada saat anggota DPRD melakukan kegiatan reses di nagari dan kecamatan.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4693);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 3);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 4 Seri E);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 4 Seri E);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 6);
 16. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 50).

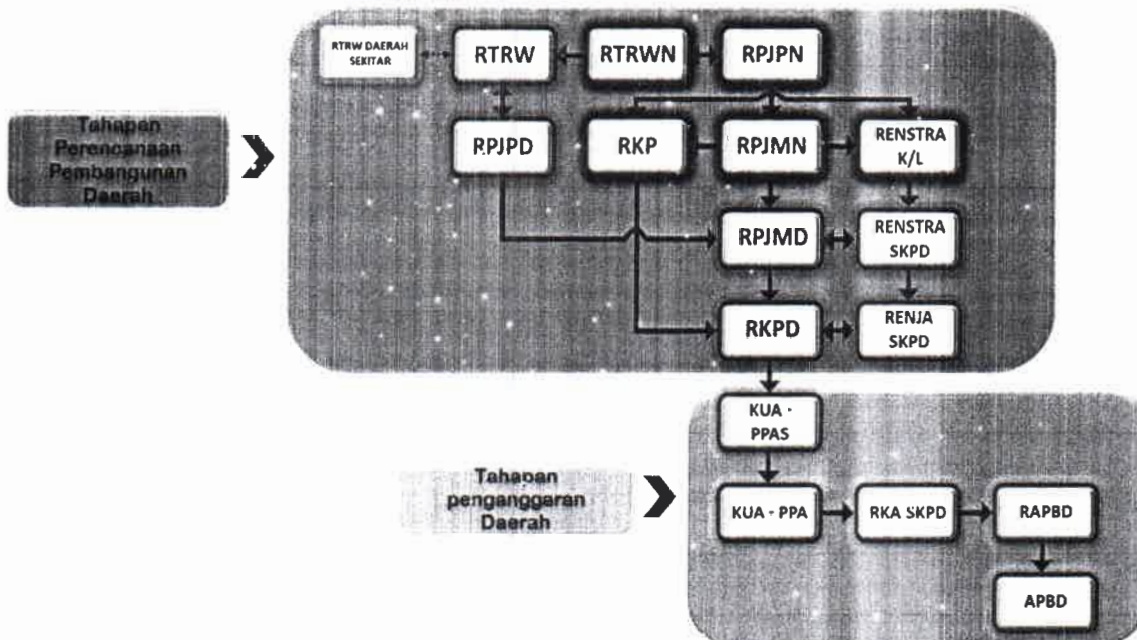
1.3. Hubungan dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya

RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Penyusunan RKPD Tahun 2018 merupakan bagian dari pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional dan bagian dari pelaksanaan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu (*e-planning* dan *e-budgeting*) sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sebagai suatu produk perencanaan, RKPD Tahun 2018 terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya yang meliputi (1) RPJPD, (2) RPJMD, (3) Renstra Perangkat Daerah dan (4) Renja Perangkat Daerah. Secara substansi, keberadaan RKPD dengan dokumen tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek. Selain itu penyusunan RKPD Tahun 2018 juga memperhatikan dokumen perencanaan tata ruang wilayah yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 – 2031.

Dokumen RKPD Tahun 2018 akan menjadi dasar dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 yang dimulai dari penyusunan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.2 Hubungan antar dokumen terhadap RKPD Tahun 2018



1.4. Sistematika Penyusunan RKPD

Sistematika penyusunan RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 terdiri dari :

BAB. I. Pendahuluan

Bagian pendahuluan memuat latar belakang, berisi pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD; hubungan antar Dokumen RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 dengan RPJPN, RPJPD Provinsi, RPJMN, RPJMD Provinsi; Dasar Hukum Penyusunan RKPD; Sistematika Dokumen RKPD; Maksud dan Tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018;

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Bagian ini dijabarkan berdasarkan hasil analisis dan kajian gambaran umum kondisi daerah pada tahap perumusan. Tidak seluruh informasi dalam perumusan tentang gambaran umum kondisi daerah ditampilkan dalam penyajian. Hanya informasi yang relevan dan penting saja yang perlu dicantumkan untuk mendapatkan fokus yang baik dalam dokumen. Suatu informasi dianggap relevan dan penting jika menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi kepala daerah, dan kebutuhan perumusan strategi.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realiasi RPJMD

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan

kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis subbab 2.3.1 s/d 2.3.2 yaitu isu permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

2.3.2. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

BAB. III. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah

Memuat tentang arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah yang menguraikan tentang kebijakan pembangunan nasional yang diselaraskan dengan kebijakan pembangunan daerah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah selama 2 (dua) tahun sebelumnya (2016-2017), dan perkiraan untuk tahun 2018.

BAB. IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Memuat tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan rencana program prioritas pembangunan daerah, terdiri dari program dan kegiatan yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan prioritas pembangunan lainnya.

BAB. V. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

Pada bab ini secara eksplisit memuat tentang rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017, yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD dan pagu indikatifnya, menurut urusan dan satuan kerja Perangkat Daerah.

BAB VI. Penutup

Berisi penegasan bahwa RKPD adalah pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menjabarkan rencana kerja melalui program/kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2018.

1.5. Maksud Dan Tujuan

1.5.1. Maksud

Maksud penyusunan RKPD Tahun 2018 untuk mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan baik sektoral, wilayah serta antar lembaga pemerintahan baik pusat, provinsi dan kabupaten sehingga terciptanya efektivitas dan efisiensi pengalokasian sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.5.2. Tujuan

Tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 adalah:

1. Menjadi acuan perencanaan program dan kegiatan bagi seluruh perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;
2. Sebagai landasan operasional bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja tahun 2018 agar terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
3. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPД DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

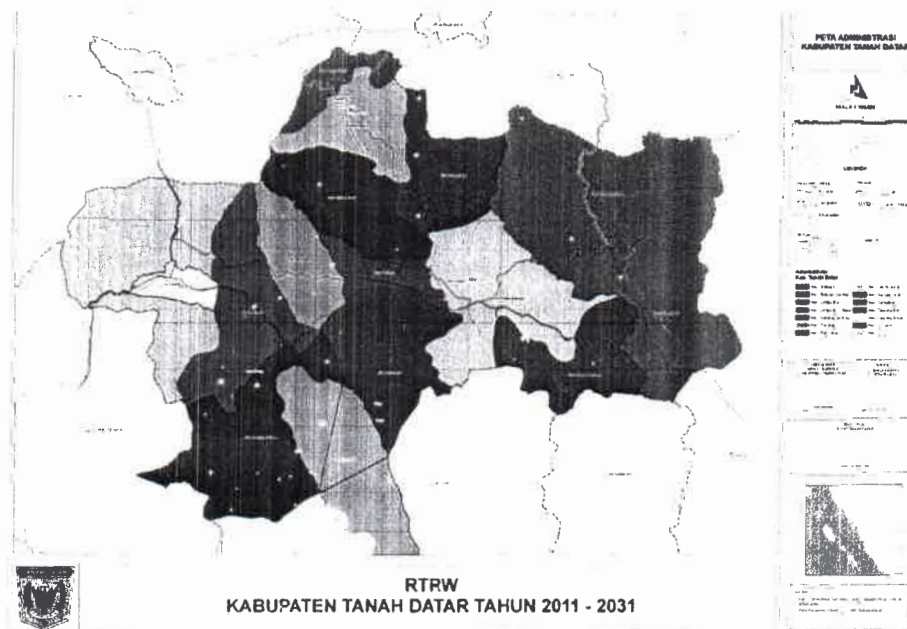
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Tanah Datar adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Barat, dengan ibukota Batusangkar. Daerah ini merupakan wilayah pegunungan dengan luas wilayah 1.336 km² atau 133.600 Ha. Secara administrasi Kabupaten Tanah Datar mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

Batas	Kabupaten/Kota
Utara	Kabupaten Agam dan Kabupaten Lima Puluh Kota
Selatan	Kabupaten Solok
Barat	Kabupaten Padang Pariaman
Timur	Kota Sawahlunto dan Kabupaten Sijunjung



Gambar 2.1 Peta Administrasi

Kabupaten Tanah Datar mempunyai luas wilayah 1.336 km² atau 133.600 ha, atau sekitar 3,16% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat (42.297,30 km²), menjadikan Kabupaten Tanah Datar sebagai kabupaten dengan wilayah paling kecil kedua di Provinsi Sumatera Barat setelah Kabupaten Padang Pariaman. Secara administratif, Kabupaten Tanah Datar dibagi menjadi 14 kecamatan, 75 nagari dan 395 jorong. Kecamatan paling luas adalah Kecamatan Lintau Buo Utara dengan luas 20.431 Ha atau 15,29% dari luas wilayah Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Tanjung

Baru dengan luas 4.315 Ha atau 3,23% dari luas wilayah Kabupaten Tanah Datar. Komposisi luas wilayah berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.1 :

Tabel 2.1
Luas Wilayah Administrasi Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentas e	Jumlah	
				Nagari	Jorong
1.	X Koto	15.202	11,38	9	41
2.	Batipuh	14.427	10,8	8	49
3.	Batipuh Selatan	8.273	6,19	4	17
4.	Pariangan	7.643	5,72	6	21
5.	Rambatan	12.915	9,67	5	33
6.	Lima Kaum	5.000	3,74	5	33
7.	Tanjung Emas	11.205	8,39	4	19
8.	Padang Ganting	8.350	6,25	2	7
9.	Lintau Buo	6.022	4,51	4	22
10.	Lintau Buo Utara	20.431	15,29	5	63
11.	Sungayang	6.545	4,9	5	14
12.	Sungai Tarab	7.185	5,38	10	32
13.	Salimpaung	6.088	4,58	6	27
14.	Tanjung Baru	4.315	3,23	2	17
	Jumlah	133.600	100	75	395

Sumber : BPS Kabupaten Tanah Datar

b. Letak dan Kondisi Geografis

1) Posisi Astronomis

Secara astronomis, Kabupaten Tanah Datar terletak pada 00°17" - 00°39" Lintang Selatan dan 100°19" - 100°51" Bujur Timur.

2) Posisi Geostrategis

Secara geostrategis, Kabupaten Tanah Datar terletak di tengah-tengah Provinsi Sumatera Barat. Hal ini memberi keuntungan tersendiri, yaitu waktu tempuh ke hampir seluruh wilayah di Provinsi Sumatera Barat menjadi tidak terlalu lama atau tidak terlalu jauh perbedaannya.

c. Topografi

1) Kemiringan lahan

Topografi Kabupaten Tanah Datar secara umum dapat dikelompokkan menjadi 4 satuan morfologi yaitu:

- Morfologi datar dengan kemiringan 0-3%, dataran yang mempunyai satuan morfologi ini relatif kecil dan dengan ketinggian antara 226-274 meter di atas permukaan laut
- Morfologi dataran agak landai dengan kemiringan 3-8%, umumnya terletak pada lembah diantara perbukitan atau pada lereng perbukitan dengan ketinggian antara 365-615 meter di atas permukaan laut.
- Morfologi bergelombang dengan kemiringan 8-15% merupakan daerah peralihan antara satuan dataran bergelombang dengan satuan perbukitan terjal yang mempunyai ketinggian antara 612-952 meter dpl.

- Morfologi curam dengan kemiringan > 15%, merupakan daerah puncak-puncak perbukitan seperti yang terdapat pada Selatan Gunung Merapi lebih dari 1000 dpl.

2) Ketinggian lahan

Wilayah Kabupaten Tanah Datar didominasi oleh pegunungan dan perbukitan dengan elevasi atau ketinggian yang bervariasi, wilayah terendah berada pada ketinggian ± 200 m.dpl dan tertinggi pada ketinggian ± 1.000 m.dpl, dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Ketinggian Lahan menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar

No.	Kecamatan	Ketinggian (m dpl)	
		Terendah	Tertinggi
1.	X Koto	700	1.000
2.	Batipuh	500	850
3.	Batipuh Selatan	500	850
4.	Pariangan	500	800
5.	Rambatan	600	700
6.	Lima Kaum	450	550
7.	Tanjung Emas	450	550
8.	Padang Ganting	450	550
9.	Lintau Buo	200	750
10.	Lintau Buo Utara	200	750
11.	Sungayang	400	750
12.	Sungai Tarab	450	450
13.	Salimpaung	750	1.000
14.	Tanjung Baru	750	1.000

Sumber : BPS Tanah Datar, 2016

d. Geologi

Secara geologi Kabupaten Tanah Datar ditutupi oleh beragam jenis batuan mulai dari endapan permukaan, batuan gunung, batuan sedimen, batuan malihan dan batuan intrusi. Susunan stratigrafi daerah ini dari peta geologi adalah sebagai berikut:

- 1) Endapan Permukaan
 - Alluvium Sungai, Kwartir Resen, terdiri dari lempung, pasir, kerikil, dan bongkahan-bongkahan batuan beku, kwarsit dan macam-macam batuan lainnya.
- 2) Batuan Gunung Api, Kwartir
 - Tufa basalt berupa tufa abu-abu, lapili, tufa basalt berkaca dan pecahan lava. Pecahan lava ini mengandung fenokris labradorit dan piroksen-kli-no dalam dasar berkaca gelap Tufa batuapung, khas terdiri dari batuapung putih sampai kekuning-kuningan bergaris tengah 0,5-10 cm dalam masa dasar kelaran berkomposisi riolit. Secara setempat-setempat bagian bawahnya mengandung lapisan kerikil dan lapilli.

- Andesit Gunung Melintang, berupa breksi andesit sampai basalt, pecahan lava berongga, endapan lahar dan lava.
 - Andesit Gunung Marapi, berupa breksi andesit sampai basalt, bongkahan-bongkahan lava, lapili, tufa, agromerat dan endapan lahan
- 3) Batuan Gunung Api, Karter – Tersier
- Batuan vulkanik tak terpisahkan, berupa aliran lahar, konglomerat dan endapan kolvium lainnya, bersusunan anatara andesit sampai basalt
- 4) Batuan Sedimen, Tersier
- Anggota bawah Formasi Ombilin, berupa batuan pasir kwarsa mengandung mika dalam lapisan-lapisan setebal \pm 2 m, dan setempat-setempat mengalami metamorfosa, mengandung sisipan arkosa, serpihan lempungan, abu-abu semu biru, konglomerat kwarsa dan lapisan batubara.
 - Batu gamping karang, terdapat pada bagian bawah dari anggota bawah Formasi Telisa
 - Formasi Sangkarewang, terdiri dari serpih napalan coklat tua sampai kehitaman disisipi oleh batu pasir arkosa dan setempat-setempat oleh breksi andesit kasar bersudut.
 - Formasi Brani terdiri dari konglomerat kasar beraneka ragam dan beberapa sisipan batu pasir. Sebelah Timur Danau Singkarak, satuan ini terdiri dari konglomerat batu gamping dengan sedikit kerakal kwarsit dan granit dalam masa dasar atau gamping.
- 5) Batuan Malihan, Trias
- Anggota batusabak dan serpih Formasi Tuhur, terdiri dari batusabak, serpihan napalan, berwarna abu-abu muda sampai tua dengan sisipan rijang coklat, radioralit, serpih hitam terkersikan dan lapisan tipis grewake termalihan.
- 6) Batuan Malihan, Perem – Karbon
- Anggota filit dan serpih Formasi Kuantan, terutama terdiri dari serpih dan filit berwarna kemerah-merahan sampai coklat tua, kwarsit, batu lanau, rijang abu-abu dan aliran lava bersusunan andesit hingga basalt.
 - Anggota batu gamping Formasi Kuantan, berupa batu gamping pejal, berongga, berwarna putih abu-abu kemerahan mengandung sisipan tipis batu sabak abu-abu tua, kwarsit, batu lanau, rijang abu-abu dan aliran lava bersusunan andesit hingga basalt.
 - Anggota batu gamping Formasi Kuantang berupa batu gamping pejal, berwarna putih abu-abu kemerahan mengandung sisipan tipis batusabak, filit, serpihan terkersikan dan kwarsit umumnya berbentuk topografi kasar berpunggur tajam.
 - Anggota bawah Formasi Kuantan, terutama terdiri dari kwarsit dan batu pasir kwarsa dengan sisipan filit, batusabak terkersikan, serpih, batuan gunungapi, tufa klorit konglomerat dan rijang coklat.
- 7) Batuan Terobosan (intrusi), Trias
- Granit, susunan berkisar dari leuco-granit sampai monzonit kwarsa. Disebelah Timur Danau Singkarak singkapan granit genes yang berkekar dan tergeser jelas, yang ada hubungannya dengan jalur pergeseran dari patahan Semangko.
 - Granodiorit, bertekstur porfitrik-feneritik berwarna abu-abu muda. Beberapa singkapan terlihat telah cukup lapuk dan terkena proses kloritisasi.
 - Kwarsa diorit, bertekstur butiran hipotomorfik holokristalin, berwarna abu-abu sampai abu-abu semu hijau. Kebanyakan terdiri dari oligoklas, kwarsa, hornblende dan biotit.
 - Profir kwarsa, terdiri dari fenokris kwarsa, feldspar dan dalam massa dasar bebutir sedang, hampir bebas dan mineral mafik, mungkin hasil pemisahan granit.

Sumber : Lembar Solok skala 1 : 250.000 (PH. Silitonga dan Kastowo, 1975) dan peta geologi lembar Padang (Kastono, Gerhard W. Leo, S. Gafoer dan T.C. Amin, 1996)

e. Hidrologi

1) Daerah aliran sungai

Secara hidrologi, Kabupaten Tanah Datar dilalui oleh beberapa sungai yang bersumber dari lereng Gunung Marapi, Gunung Singgalang, Gunung Sago dan gugusan Bukit Barisan. Beberapa sungai di bagian barat bermuara dan menjadi sumber air Danau Singkarak. Sedangkan saluran keluar limpahan air Danau Singkarak adalah Sungai Batang Ombilin. Saat ini potensi air Danau Singkarak telah dimanfaatkan untuk kegiatan PLTA yang terdapat di Malalo dan Ombilin.

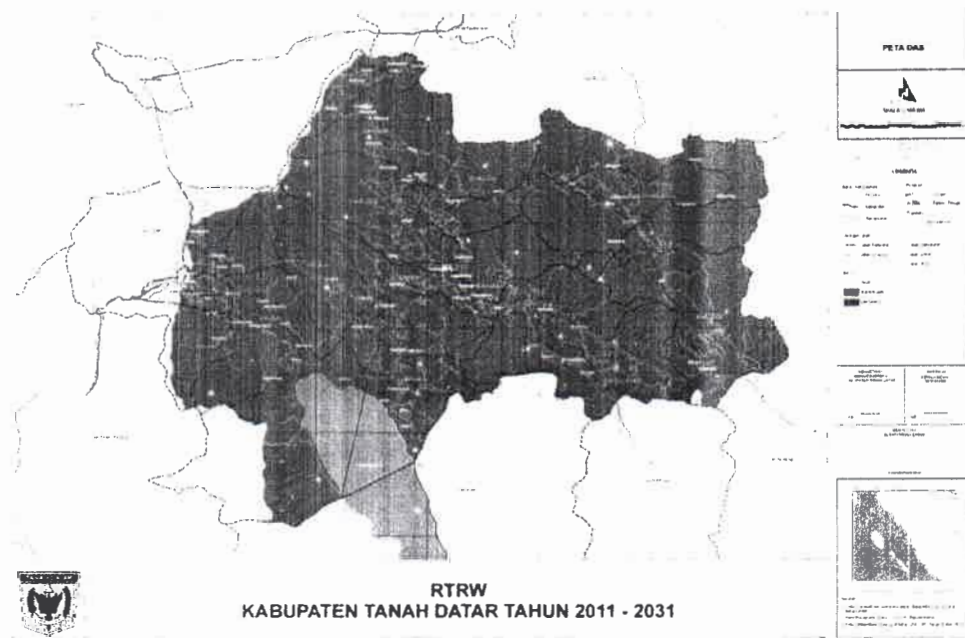
Sumber-sumber air tersebut sangat membantu usaha pertanian tanaman pangan lahan basah khususnya pada Kecamatan Batipuh, Pariangan, Lima Kaum, Rambatan dan Sungai Tarab. Namun beberapa wilayah Kabupaten Tanah Datar sulit mendapatkan pengairan karena faktor morfologinya. Wilayah tersebut meliputi bagian selatan Kecamatan Batipuh dan Rambatan serta bagian timur yang terdiri dari Kecamatan Sungayang, Tanjung Emas dan Lintau Buo. Tabel 2.3 menyajikan nama-nama sungai pada tiap kecamatan di Kabupaten Tanah Datar.

Tabel 2.3
Sungai di Kabupaten Tanah Datar

No	Nama Sungai	Kecamatan
1	- Batang Anai	X Koto
	- Batang Anai Tambang	
	- Batang Arau	
	- Muaro Sitanang	
	- Muaro Bulan Sabik	
2	- Batang Sagu	Batipuh
	- Batang Gadis	
	- Batang Sumpu	
	- Batang Talang	
3	- Batang Bengkawas	Pariangan
4	- Batang ombilin	Rambatan
5	- Batang Kiambang	Lima Kaum
	- Batang Malana	
6	- Batang Selo	Lima kaum, Tanjung Emas, Padang Ganting
7	- Batang Tampo	Lintau Buo
	- Batang Sinamar	
8	- Batang Selo Tengah	Sungayang
9	- Batang Bangkahan	Sungai Tarab
	- Batang Sinandang	

No	Nama Sungai	Kecamatan
10	- Batang Baburai	Salimpaung
	- Batang Air Kampung Panjang	
	- Batang Bona	
	- Batang Gadang	

Sumber : BPS Tahun 2016 (data diolah)



Gambar 2.2 Peta Hidrologi

f. Klimatologi

1) Tipe

Secara Klimatologi, iklim di Kabupaten Tanah Datar termasuk iklim tropis seperti pada umumnya daerah di Indonesia yang memiliki dua musim dalam setahun, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Suhu udara rata-rata di Kabupaten Tanah Datar 23° C dengan ketinggian rata-rata adalah 936 m dpl.

2) Curah hujan

Hasil dari analisis data curah hujan di Kabupaten Tanah Datar didapat melalui 8 stasiun pengamatan. Tingkat curah hujan tahunan cukup tinggi yaitu berkisar antara 1.750 – 4000. Adapun sebaran dari kelas curah hujan di Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut :

- Wilayah dengan curah hujan 3.000–4.000 mm/th tanpa bulan kering berada di sekitar pinggang Gunung Merapi yang meliputi bagian Kecamatan Pariangan, Lima Kaum dan Lintau Buo.
- Wilayah dengan curah hujan 2.500–3.000 mm/th dengan bulan kering (curah hujan <100 mm) rata-rata < 2 bulan. Wilayah ini meliputi sebagian Kecamatan Pariangan, Lima Kaum, Lintau Buo dan Batipuh.
- Wilayah dengan curah hujan 2.000–2.500 mm/th dengan bulan kering rata-rata 4–6 bulan berturut-turut. Wilayah ini meliputi sebagian Kecamatan Batipuh,

Salimpaung, Sungai Tarab, Sungayang, dan bagian Utara Kecamatan Tanjung Emas.

- Wilayah dengan curah hujan 1.750 – 2.000 mm/th meliputi bagian Barat wilayah 12 Kabupaten Tanah Datar yaitu sebagian Kecamatan Batipuh dan Kecamatan X Koto.

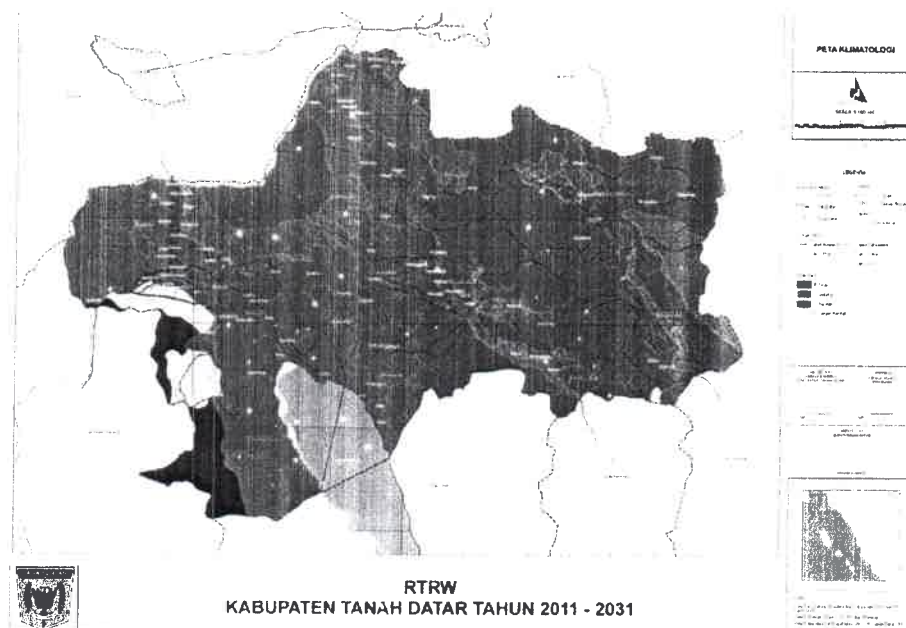
Jumlah hari hujan dan curah hujan di Kabupaten Tanah Datar berdasarkan hasil pengamatan BMKG, Stasiun Klimatologi Sicincin digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Curah Hujan dan Hari Hujan (mm/bln)
pada Stasiun Klimatologi Sicincin/BMKG, Tahun 2015

Bulan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (hari)	Rata-rata (mm/hari)
Januari	230	15	15.33
Februari	175	11	15.91
Maret	365	17	21.47
April	310	20	15.50
Mei	200	12	16.67
Juni	142	9	15.78
Juli	61	6	10.17
Agustus	34	7	4.86
September	31	5	6.20
Oktober	75	5	15.00
November	390	23	16.96
Desember	293	19	15.42
Jumlah	2.306	149	15,48

Sumber : BPS, Tanah Datar Dalam Angka Tahun 2016

Tabel di atas menggambarkan puncak musim hujan terjadi pada bulan November dengan rata-rata hujan 16,96 mm³/hari sedangkan pada bulan September curah hujan dan jumlah hari hujan sangat rendah dengan rata-rata hujan 6,20 mm³/hari.



Gambar 2.3 Peta Curah Hujan

g. Penggunaan Lahan

Data penggunaan lahan di Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada tabel 2.5. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa wilayah Kabupaten Tanah Datar masih didominasi oleh kawasan hutan dengan luas keseluruhan mencapai 37,37% yang terdiri dari hutan lindung (15,22%), hutan produksi (7,01 %), hutan konservasi (09,%) dan hutan produksi konservasi sebesar 0,09 persen. Selanjutnya, penggunaan lahan untuk sektor pertanian mencapai 40,94%, yang terdiri dari pertanian lahan basah (17,70%), pertanian lahan kering (13,24%), dan perkebunan rakyat (17,43%).

Tabel 2.5.
Luas Lahan Menurut Penggunaan

No.	Penggunaan Tanah	Luas Area (Ha)	Persentase (%)
1.	Pemukiman	12.073,00	9,04
2.	Pertanian lahan kering	17.691,52	13,24
3.	Pertanian lahan basah	23.653,00	17,70
4.	Telaga/kolam/perairan umum	6.970,77	5,22
	- Telaga	17,97	
	- Sungai	292,80	
	- Danau	6.660,00	
5.	Hutan	49.921,52	37,37
	- Hutan konservasi	20.111,69	
	- Hutan lindung	20.336,87	
	- Hutan produksi	9.359,06	
	- Hutan produksi konservasi	113,90	
6.	Perkebunan rakyat	23.290,19	17,43
	Jumlah	133.600,00	100

Sumber: BPS, Tanah Datar Dalam Angka Tahun 2016

2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Tanah Datar meliputi beberapa kawasan antara lain :

1. Kawasan peruntukan pertanian;

Peruntukan kawasan pertanian di Kabupaten Tanah Datar dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu kawasan pertanian tanaman pangan, kawasan peternakan/ perikanan dan kawasan perkebunan.

a. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan

Kawasan pertanian tanaman pangan terbagi atas kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah dan kawasan tanaman pangan lahan kering. Kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah pada umumnya ditanam dengan tanaman padi sawah, sedangkan kawasan tanaman pangan lahan kering ditanami dengan tanaman palawija atau hortikultura.

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu daerah sentra komoditi tanaman pangan di Provinsi Sumatera Barat bahkan sebagian besar komoditi ini sudah dipasarkan ke Provinsi tetangga seperti Riau, Kepulauan Riau, Jambi dan Sumatera Utara. Jenis komoditi tanaman pangan unggulan ini adalah padi, jagung, dan ubi jalar. Sebaran sentra produksi tanaman pangan sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Sentra Produksi Beberapa Komoditi Tanaman Pangan

No	Komoditi	Wilayah Sentra Produksi (Kecamatan)
1.	Padi	Seluruh Kecamatan
2.	Jagung	Rambatan, Sungai Tarab, Salimpaung, dan Tanjung Baru
3.	Ubi Jalar	X Koto, Batipuh, Pariangan, Salimpaung, Tanjung Baru, Sungayang, Sungai Tarab, dan Lintau Buo Utara

Sumber : Dinas Pertanian, 2016

Kabupaten Tanah Datar juga merupakan salah satu daerah sentra komoditi hortikultura di Provinsi Sumatera Barat bahkan sebagian besar komoditi ini sudah dipasarkan ke Provinsi tetangga seperti Riau, Kepulauan Riau dan Jambi. Jenis komoditi hortikultura unggulan adalah cabe, tomat, kubis, dan pisang. Sentra komoditi hortikultura unggulan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Beberapa Komoditi Hortikultura

No	Komoditi	Wilayah Sentra Produksi (Kecamatan)
1	Cabe	Seluruh Kecamatan
2	Tomat	Salimpaung, Sungai Tarab, Lintau Buo, Sungayang, X Koto
3	Kubis	X Koto, Tanjung Baru, Salimpaung
4	Pisang	Salimpaung, Tanjung Baru

Sumber : Dinas Pertanian, 2016

b. Kawasan Peternakan dan Perikanan

Kabupaten Tanah Datar juga salah satu pusat pengembangan peternakan di Sumatera Barat, dengan komoditas peternakan yang banyak dibudidayakan adalah sapi potong, kerbau, kambing, kuda, ayam buras, ayam ras petelur dan ayam ras pedaging serta itik.

Kawasan pengembangan perikanan di Kabupaten Tanah Datar terdapat di Kecamatan Rambatan, X Koto, Batipuh, Batipuh Selatan, Lintau Buo, Lintau Buo Utara, Padang Ganting dan Salimpaung.

c. Kawasan Perkebunan

Beberapa kawasan yang dapat dikembangkan untuk komoditi perkebunan dalam rangka menopang perekonomian masyarakat Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Sentra Produksi Komoditi Perkebunan Unggulan Tahun 2016

No	Komoditi	Wilayah Sentra Produksi (Kecamatan)
1	Karet	Tanjung Emas, Padang Ganting, Lintau Buo, Lintau Buo Utara
2	Kakao	Rambatan, Lintau Buo Utara, Lima Kaum
3	Tebu	X Koto, Salimpaung, Lintau Buo Utara
4	Kopi	Salimpaung, Sungai Tarab

Sumber: Dinas Pertanian, 2016

2. Kawasan Pertambangan

Kabupaten Tanah Datar memiliki potensi pertambangan dan sumber energi yang cukup banyak, namun belum dieksploitasi dan dimanfaatkan secara optimal karena belum ditetapkannya Wilayah Pertambangan (WP) oleh pemerintah sehingga penerbitan izin-izin usaha pertambangan baru untuk sementara belum dapat diproses.

Potensi sektor pertambangan yang sudah dikelola baru terbatas pada beberapa jenis bahan galian seperti pasir/kerikil, granit/andesit/batu beku, tanah liat yang izinnya telah terbit sebelum moratorium izin usaha pertambangan baru.

3. Kawasan Pariwisata

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu destinasi wisata di Sumatera Barat yang memiliki objek wisata sejarah budaya, alam dan minat khusus. Selain Istana Basa Pagaruyung yang dikenal dengan Rumah Gadang, Kabupaten Tanah Datar juga memiliki Danau Singkarak, yang cukup terkenal bukan saja di wilayah Tanah Datar atau di Provinsi Sumatera Barat, melainkan di tingkat nasional. Disamping itu masih banyak potensi pariwisata yang belum digali dan terekspose di masyarakat luas.

Potensi-potensi yang ada diantaranya adalah Objek Wisata Nagari Tuo Pariangan, Panorama Tabek Patah, Batu Batikam, Ngalau Indah Pangian, Air terjun Tanjung Bonai dan sebagainya. Objek wisata yang ada di Kabupaten Tanah Datar berjumlah sebanyak 170 buah objek wisata yang terdiri dari :

- a) Objek Wisata Alam sebanyak 59 buah
- b) Objek Wisata Sejarah/Budaya sebanyak 105 buah
- c) Objek Wisata Minat Khusus sebanyak 4 buah
- d) Objek Wisata Agro sebanyak 1 buah
- e) Tempat Rekreasi/Hiburan sebanyak 1 buah

2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Tanah Datar memiliki bentang alam yang bervariasi, yaitu posisinya berada di antara 2 (dua) gunung yang masih aktif yaitu Gunung Marapi dan Gunung Singgalang, memiliki morfologi bergelombang, banyak dilalui sungai-sungai besar serta dilalui jalur sesar besar Sumatera (Sesar Semangko) sehingga menyebabkan Kabupaten Tanah Datar rentan terhadap bencana.

Potensi bencana yang ada di Kabupaten Tanah Datar diantaranya adalah:

1. Gempa Bumi

Gempa bumi di Kabupaten Tanah Datar disebabkan oleh adanya jalur sesar aktif yang melalui wilayah Tanah Datar yang memanjang mulai dari Teluk Semangko di tenggara hingga Banda Aceh.

Nagari yang berpotensi rawan bencana gempa yaitu Nagari Gunung Rajo dan Nagari Pitalah karena kedua nagari tersebut berada tepat di jalur sesar. Sedangkan daerah yang harus diwaspadai dengan gempa tektonik adalah Kecamatan Batipuh, Batipuh Selatan, Salimpaung dan Kecamatan X Koto bagian Timur.

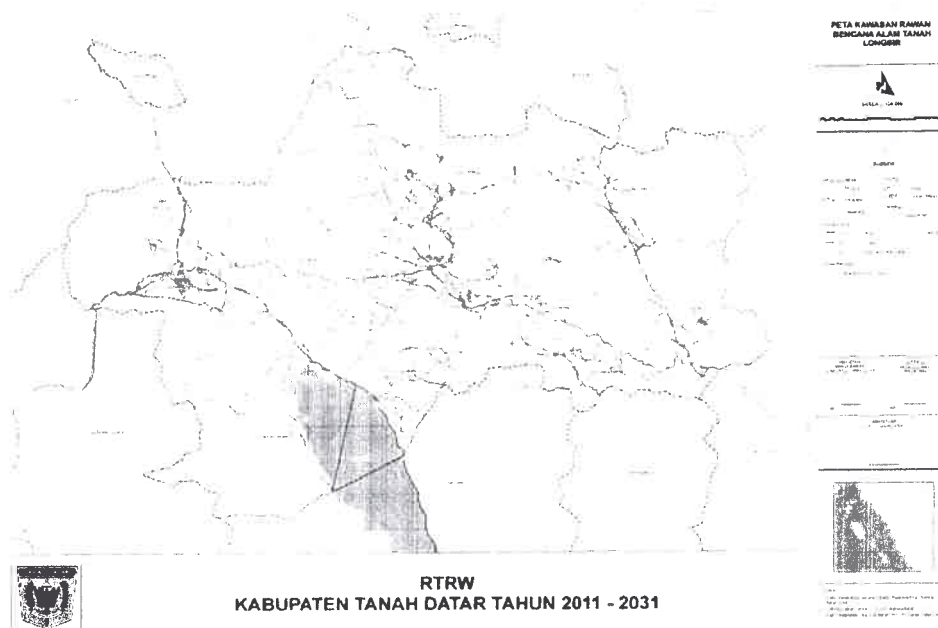
2. Gerakan Tanah (Longsor)

Wilayah Kabupaten Tanah Datar yang merupakan bagian dari jajaran Pegunungan Bukit Barisan secara geologi memiliki potensi terjadinya gerakan tanah. Beberapa penyebab terjadinya gerakan tanah, antara lain :

- a. Faktor keairan (curah hujan) yang tinggi dan geologi yang kompleks pada wilayah ini.
- b. Faktor aktivitas manusia merupakan faktor yang paling dominan sebagai penyebab terjadinya bencana gerakan tanah, misalnya tataguna lahan yang tidak sesuai dengan topografi dan struktur geologi setempat, pemotongan kaki bukit untuk wilayah pemukiman dan pelebaran jalan.
- c. Kondisi morfologi yang bergelombang.

Jenis gerakan tanah yang sering terjadi adalah jenis longsor bahan rombakan (*debris slide*) dan aliran bahan rombakan (*debris avalanche*). Berdasarkan hasil studi pemetaan mengenai gerakan tanah di Kabupaten Tanah Datar dan sekitarnya, jenis gerakan tanah yang dijumpai berupa longsor bahan rombakan dan nendatan, selain itu dijumpai juga beberapa gawir gerakan tanah lama. Di bawah ini akan diuraikan mengenai kondisi lahan yang memiliki potensi bencana gerakan tanah, serta lokasi penyebarannya, sebagai berikut :

- a) Breksi, lapuk, bersifat berai - mudah tererosi, fragmen andesit dan material vulkanik lainnya dengan ukuran fragmen kerikil-bongkah berada di zona patahan sehingga sangat labil terhadap gerakan tanah terdapat di sekitar Jalan Padang Panjang - Singkarak, Nagari Subang Anak Kecamatan Batipuh.
- b) Pengamatan lapangan dari formasi endapan Kuartar Marapi yang relatif labil terhadap gerakan tanah, terdapat di Jalan Padang Panjang - Batusangkar, Bukit Tampang Biaro, Sikaladi, Kecamatan Pariangan
- c) Pemaprasan tebing yang tidak mengikuti kaidah kestabilan lereng sangat berbahaya bagi pengguna fasilitas jalan, terdapat di Desa Baruah Bukik Kecamatan Sungayang.
- d) Granit, coklat-putih, tergerus kuat, bidang gerusan terisi oleh lempung, lapukan granit berukuran pasir kasar - kerikil kasar, mineral lapuk: kuarsa, feldspar, biotit (inset: kontak antara granit lapuk dan masif yang dibatasi oleh bidang patahan).
- e) Gerakan tanah bersifat rayapan terdiri dari material halus (klastik) berupa lahar, abu-abu, fragmen rempah-rempah vulkanik terdiri dari andesit dan material gunungapi lainnya. Lokasi terdapat di perbatasan Kota Padang Panjang - Kabupaten Tanah Datar



Gambar 2.4 Peta Rawan Bencana Tanah Longsor

3. Gunung Marapi

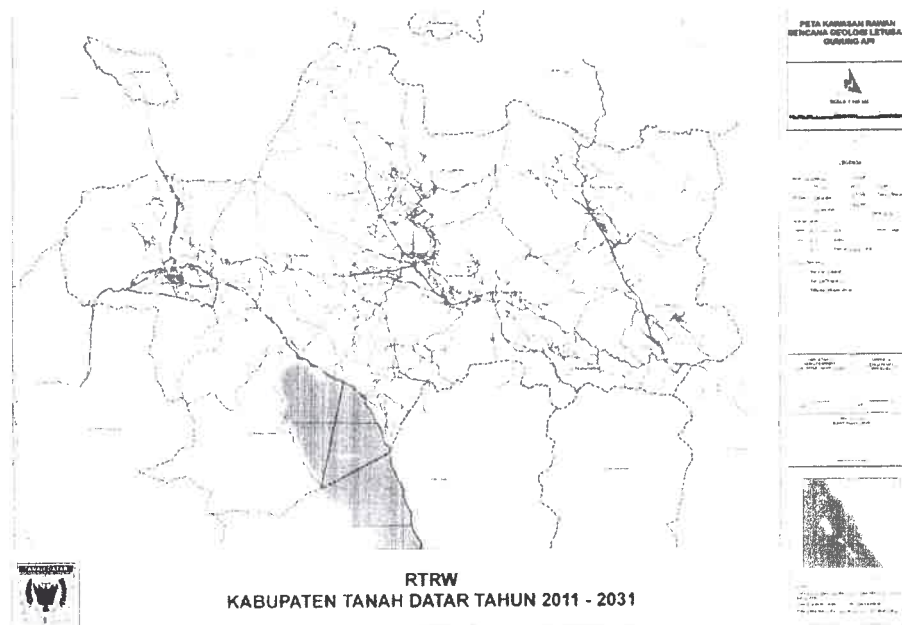
Selain gempa bumi dan gerakan tanah, potensi bencana lainnya adalah letusan gunung api aktif, yaitu Gunung Marapi. Bahaya yang ditimbulkan letusan gunung api adalah terjadinya aliran lava, awan panas, gas beracun, lahar primer pada letusan gunung api yang mempunyai danau kawah, lahar sekunder atau sering disebut lahar hujan dan gelombang pasang. Daerah rawan letusan gunung api terdapat pada daerah sekitar lembah sungai yang berhulu di lereng atas Gunung Marapi memanjang hingga ke lereng bawah.

Daerah-daerah yang perlu diwaspadai jika aktifitas Gunung Marapi kembali aktif diantaranya: Bulan Sarik, Guguk, Labuatan dan Batur (Kecamatan Pariangan); Lumbang Bapereng, Tanjung Ateh Bukik, Pasir Laweh dan Talang Tengah (Kecamatan Sungai Tarab); serta Koto Baru, Kayutanduak, Marapi, Hilia Balai (Kecamatan X Koto); Andaleh dan Sabu (Kecamatan Batipuh); daerah-daerah tersebut diindikasikan sebagai jalur lahar jika terjadi letusan.

Pengamanan daerah rawan letusan gunung api dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Kawasan Bahaya I dengan radius 0 – 2 Km dari puncak gunung.
- b. Kawasan Bahaya II dengan radius 3 – 7 Km dari puncak gunung.
- c. Kawasan bahaya III dengan radius 8 – 14 Km dari puncak gunung.

Dari pembahasan mengenai potensi bencana di atas, berdasarkan kriteria kawasan lindung untuk kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi dan tanah longsor serta gelombang pasang dan banjir, maka kawasan-kawasan yang berada pada jalur atau radius bencana diarahkan menjadi kawasan berfungsi lindung.



Gambar 2.5 Peta Rawan Bencana Gunung Api

2.1.1.4. Demografi

a. Jumlah dan Struktur Penduduk berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin

Data jumlah penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin merupakan karakteristik penduduk pokok yang digunakan dalam analisis perencanaan pembangunan. Suatu wilayah dikatakan berstruktur umur muda apabila kelompok penduduk yang berumur di bawah 15 tahun jumlahnya lebih dari 40% populasi dan jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas kurang dari 10%. Sebaliknya, suatu wilayah dikatakan berstruktur penduduk tua apabila kelompok penduduk yang berumur di bawah 15 tahun jumlahnya kurang dari 40% dan jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas lebih dari 10%.

Jumlah penduduk Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (semester I Tahun 2016) tercatat sebanyak 364.925 jiwa. Komposisinya menunjukkan penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan, yakni 182.796 jiwa laki-laki dan 182.129 jiwa perempuan dengan *sex ratio* 100,37, sebagaimana tergambar pada tabel berikut :

**Tabel 2.9
Jumlah Penduduk berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin, 2016**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Sex ratio
		Laki-laki	Perempuan	Total	
1.	X Koto	21.296	20.926	42.222	101.77
2.	Batipuh	16.072	16.146	32.218	99.54
3.	Rambatan	19.180	18.614	37.794	103.04
4.	Lima Kaum	18.705	18.793	37.498	99.53
5.	Tanjung Emas	11.896	11.984	23.880	99.27
6.	Lintau Buo	9.565	9.492	19.057	100.77
7.	Sungayang	9.309	9.505	18.814	97.94
8.	Sungai Tarab	16.038	15.750	31.788	101.83

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Sex ratio
		Laki-laki	Perempuan	Total	
9.	Pariangan	10.346	10.384	20.730	99.63
10.	Salimpaung	11.572	11.659	23.231	99.25
11.	Padang Ganting	7.220	7.455	14.675	96.85
12.	Tanjung Baru	7.159	7.009	14.168	102.14
13.	Lintau Buo Utara	18.800	18.726	37.526	100.40
14.	Batipuh Selatan	5.638	5.686	11.324	99.16
	Jumlah	182.796	182.129	364.925	100.37

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2016

Tabel 2.10
Sex ratio dan Pertumbuhan Penduduk, 2012 – 2016

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Total	Sex ratio	Pertumbuhan (%)
2009	166.034	174.699	340.733	95,04	0,43
2010	165.231	174.561	339.792	94,66	-0,28
2011	165.877	175.029	340.906	94,77	0,33
2012	166.481	175.430	341.911	94,90	0,29
2013	167.051	175.813	342.864	95,02	0,28
2014	167.677	176.198	343.875	95,16	0,29
2015 ¹⁾	181.557	181.202	362.759	100,19	0,28
2016 ¹⁾	182.796	182.129	364.925	100,37	0,59

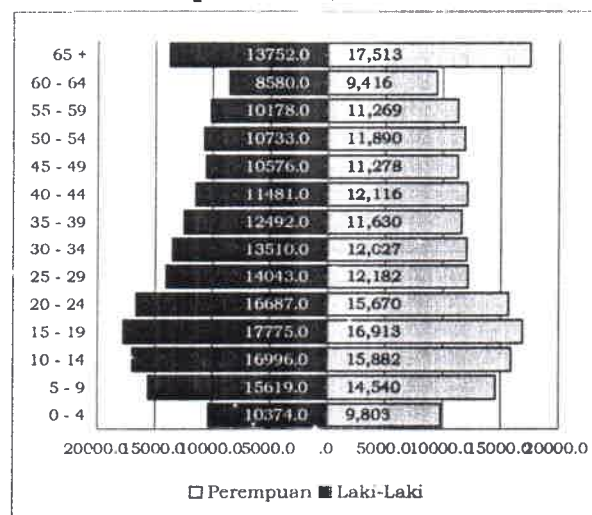
Sumber: Badan Pusat Statistik

¹⁾ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.11
Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur, 2016

Umur	Jumlah		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
0 - 4	10,374	9,803	20,177
5 - 9	15,619	14,540	30,159
10 - 14	16,996	15,882	32,878
15 - 19	17,775	16,913	34,688
20 - 24	16,687	15,670	32,357
25 - 29	14,043	12,182	26,225
30 - 34	13,510	12,027	25,537
35 - 39	12,492	11,630	24,122
40 - 44	11,481	12,116	23,597
45 - 49	10,576	11,278	21,854
50 - 54	10,733	11,890	22,623
55 - 59	10,178	11,269	21,447
60 - 64	8,580	9,416	17,996
65 +	13,752	17,513	31,265



Sumber: Dinas Dukcapil Kab. Tanah Datar, 2016

Komposisi penduduk Kabupaten Tanah Datar menurut kelompok umur memperlihatkan pola yang cukup menarik. Komposisi yang umumnya ditemukan untuk data penduduk Indonesia baik secara nasional maupun provinsi adalah berbentuk piramida segitiga. Kelompok umur paling muda mempunyai komposisi paling banyak dan semakin tua komposisinya semakin mengecil secara bertahap. Komposisi penduduk Kabupaten Tanah Datar tidak berbentuk piramida segitiga. Berdasarkan data pada tabel dan grafik di atas, Kabupaten Tanah Datar adalah wilayah dengan struktur umur muda yang ditandai dengan penduduk usia 15 – 64 tahun jumlahnya 68,63% atau lebih dari 40% dan penduduk usia lebih dari 65 tahun jumlahnya 8,57% atau kurang dari 10%.

Ditinjau dari rasio ketergantungan yaitu jumlah penduduk kelompok usia belum atau tidak produktif (anak sekolah dan lansia) dibandingkan dengan usia produktif (usia 15 – 64) maka angka ketergantungan di Kabupaten Tanah Datar secara keseluruhan dari tahun 2012 hingga tahun 2016 terlihat cenderung berfluktuasi, dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 cenderung meningkat namun pada tahun 2015 dan 2016 terjadi penurunan.

Tabel 2.12
Rasio Ketergantungan Kabupaten Tanah Datar, 2012- 2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016 ¹⁾
1.	Jumlah Penduduk usia < 15 tahun	106.102	99.319	101.068	98.890	83.214
2.	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	18.781	27.862	28.048	27.997	31.265
3.	Jumlah Penduduk usia tdk produktif (1) & (2)	124.883	127.181	129.116	126.887	114.479
4.	Jumlah Penduduk usia 15-64 tahun	218.108	215.683	217.120	216.988	250.446
5.	Rasio ketergantungan (3)/(4)*100	57,26	58,97	59,47	58,47	45,71

b. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tanah Datar secara rata-rata adalah 0,18% per tahun selama periode 2011 – 2015 dan cenderung mengecil. Jika dilihat dari laju pertumbuhan penduduk, maka tampak bahwa laju pertumbuhan penduduk antar kecamatan di Kabupaten Tanah Datar cukup bervariasi. Kecamatan paling tinggi laju pertumbuhan penduduknya adalah Kecamatan Lintau Buo dengan laju pertumbuhan penduduknya sebesar 0,85% pada tahun 2014. Jumlah penduduk tidak terlalu besar bila dibandingkan dengan kecamatan lainnya yakni hanya 18.091 jiwa namun cukup padat yakni 304 jiwa per km² dengan luas daerahnya 60,22 km².

c. Distribusi/Persebaran Penduduk

Aspek demografis berikutnya yang perlu dicermati adalah distribusi atau sebaran penduduk antar wilayah. Tabel 2.7 memperlihatkan bahwa distribusi penduduk Kabupaten Tanah Datar antar kecamatan cukup bervariasi. Ada 6 kecamatan berpenduduk lebih dari 25.000 jiwa dengan penduduk paling banyak terdapat pada Kecamatan X Koto dengan jumlah penduduk 42.222 jiwa, Kecamatan lainnya berpenduduk kurang dari 25.000 dan ada 3 kecamatan yang berpenduduk kurang dari 15.000, yaitu Batipuh Selatan, Padang Ganting dan Tanjung Baru.

Kecamatan berpenduduk paling sedikit adalah Batipuh Selatan dengan jumlah penduduk 11.324 jiwa.

Kepadatan penduduk antar kecamatan di Kabupaten Tanah Datar juga cukup bervariasi. Kecamatan paling padat penduduknya adalah Lima Kaum dengan jumlah penduduk 749 jiwa per km² pada hal luas wilayahnya paling kecil yakni hanya 50 km². Kondisi ini dapat dipahami karena ibu kota dan pusat pemerintahan Kabupaten Tanah Datar berada di wilayah kecamatan tersebut. Kecamatan berikutnya yang cukup padat penduduknya adalah Sungai Tarab dengan kepadatan 442 jiwa per km². Sebagian wilayah dari kecamatan ini juga termasuk wilayah ibu kota Kabupaten Tanah Datar yakni Kota Batusangkar. Sedangkan kecamatan yang paling sedikit dan paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Batipuh Selatan dengan tingkat kepadatan 136 jiwa per km². Secara keseluruhan, kepadatan penduduk di Kabupaten Tanah Datar adalah 273 jiwa per km².

Tabel 2.13
Distribusi Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan, 2016

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²
1.	X Koto	152,02	42.222	277
2.	Batipuh	144,27	32.218	223
3.	Rambatan	129,15	37.794	292
4.	Lima Kaum	50,00	37.498	749
5.	Tanjung Emas	112,05	23.880	213
6.	Lintau Buo	60,22	19.057	316
7.	Sungayang	65,45	18.814	287
8.	Sungai Tarab	71,85	31.788	442
9.	Pariangan	76,43	20.730	271
10.	Salimpaung	60,88	23.231	381
11.	Padang Ganting	83,50	14.675	175
12.	Tanjung Baru	43,14	14.168	328
13.	Lintau Buo Utara	204,31	37.526	183
14.	Batipuh Selatan	82,73	11.324	136
	Jumlah	1.336,00	364.925	273

d. Komposisi populasi masyarakat

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2016, penduduk Kabupaten Tanah Datar mayoritas beragama Islam dengan jumlah pemeluk 364.422 jiwa atau 99,86 %. Agama dengan pemeluk terbanyak kedua adalah agama Kristen dengan jumlah pemeluk 370 jiwa (0,10%). Komposisi penduduk berdasarkan agama yang dianut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.14
Komposisi Penduduk berdasarkan Agama yang Dianut, 2016

No.	Agama	Jumlah Pemeluk	%
1.	Islam	364.422	99,86
2.	Kristen	370	0,10
3.	Katholik	111	0,03
4.	Hindu	1	0,00
5.	Budha	20	0,01
6.	Kong Hu Chu	0	0,00
7.	Kepercayaan	1	0,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan pendidikan yang ditamatkan, komposisi penduduk Kabupaten Tanah Datar sebagaimana tergambar dalam tabel berikut :

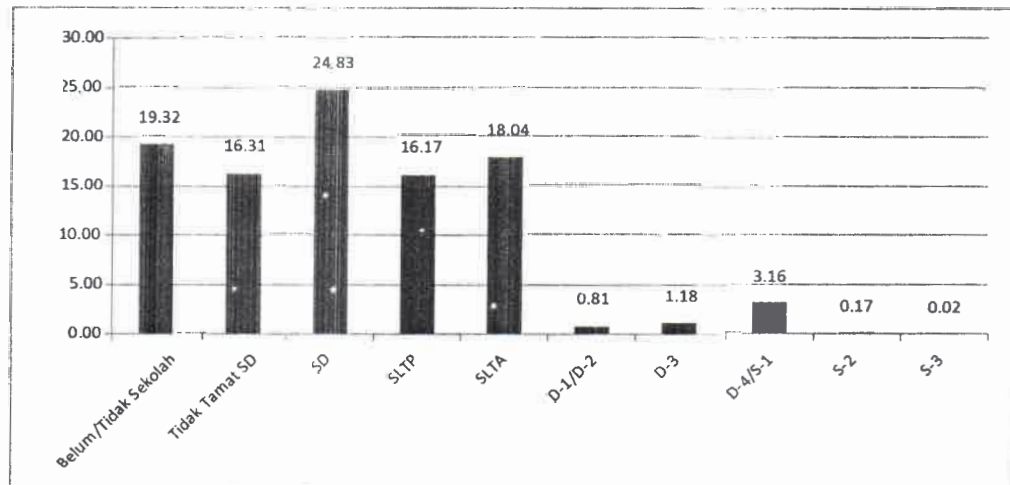
Tabel 2.15
Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan yang ditamatkan, 2016

No.	Pendidikan Terakhir	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	%
1.	Tidak/belum tamat sekolah	36.146	34.341	70.487	19,32
2.	Belum Tamat SD/Sederajat	30.867	28.666	59.533	16,31
3.	Tamat SD/Sederajat	45.415	45.193	90.608	24,83
4.	SLTP/Sederajat	30.489	28.525	59.014	16,17
5.	SLTA/Sederajat	32.419	33.396	65.815	18,04
6.	Diploma I/II	752	2.190	2.942	0,81
7.	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	1.594	2.700	4.294	1,18
8.	Diploma IV/Strata - 1	4.754	6.787	11.541	3,16
9.	Strata - 2	331	304	635	0,17
10.	Strata - 3	29	27	56	0,02

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pada umumnya, tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Tanah Datar masih cukup rendah, hanya 3,35% penduduk yang menyelesaikan pendidikan sampai jenjang D-4/S-1/S-2/S-3. Penduduk yang tidak tamat SD dan hanya mengenyam pendidikan sampai dengan jenjang SD jumlahnya mencapai 41,14%.

Grafik 2.1
Tingkat Pendidikan, 2016



2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pertumbuhan PDRB

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam satu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam satu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB-ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, yang dapat menggambarkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan suatu daerah, pergeseran dan struktur perekonomian daerah. Pada tahun 2016, PDRB-ADHB Kabupaten Tanah Datar nilainya 10,62 triliun rupiah dan pada tahun 2017 diproyeksikan sebesar 11.51 triliun rupiah.

Pada tahun 2016 nilai tambah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih dominan dibandingkan dengan nilai tambah sektor ekonomi lainnya dengan kontribusi sebesar 3,66 triliun rupiah atau 34,48% dari total PDRB Kabupaten Tanah Datar. Sementara itu, sektor Perdagangan Besar dan Eceran Reperasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan sektor kedua terbesar dalam memberikan sumbangannya terhadap pembentukan nilai PDRB Kabupaten Tanah Datar. Selama tahun 2016 sektor Perdagangan Besar dan Eceran Reperasi Mobil dan Sepeda Motor menghasilkan nilai tambah sebesar 1,22 triliun rupiah atau sekitar 12,41 persen terhadap total PDRB Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan sektor Pengadaan Listrik dan Gas merupakan sektor yang paling kecil memberikan sumbangan terhadap nilai PDRB Kabupaten Tanah Datar yang hanya menghasilkan nilai tambah sebesar 2,19 milyar rupiah atau sekitar 0,02 persen terhadap total PDRB Kabupaten Tanah Datar selama tahun 2015.

Tabel 2.16
PDRB Kabupaten Tanah Datar Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha, 2012 - 2016

No	Sektor	Tahun (Dalam Jutaan Rupiah)				
		2012	2013	2014	2015*)	2016**)
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.533.181,1	2.713.538,1	3.108.811,4	3.326.388,3	3.662.697,9
2.	Pertambangan dan Pengalihan	211.632,4	243.599,8	307.029,3	353.094,4	465.584,5
3.	Industri Pengolahan	990.882,2	1.048.553,8	1.128.220,5	1.180.503,9	1.185.486,2
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	1.288,8	1.332,9	1.551,1	2.196,6	1.789,3
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.340,6	8.927,1	9.563,8	10.907,8	10.233,3
6.	Konstruksi	640.021,6	751.182,3	834.939	924.985,0	926.782,3
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	883.337,8	979.992,4	1.097.672,4	1.125.480,6	1.228.478,5
8.	Transportasi dan Pergudangan	566.080,1	656.914,6	742.336,6	808.191,6	838.840,4
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	45.247,9	50.492,2	56.587,1	64.384,8	63.377,6
10.	Informasi dan Komunikasi	335.069,4	354.923,8	400.443,8	399.978,7	448.497,1

11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	192.183,7	211.309,9	233.621,9	252.122,6	256.984,1
12.	Real Estat	113.626,1	128.657,5	146.885,2	163.139,6	167.449,1
13.	Jasa Perusahaan	2.836,3	3.048,8	3.350,9	3.687,7	3.652,5
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	479.479,4	536.659,7	583.866,9	576.188,6	630.576,3
15.	Jasa Pendidikan	193.901,2	230.998,2	261.859,6	292.786,6	295.901,3
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	94.116,3	107.157,6	119.554	128.063,6	132.704,9
17.	Jasa lainnya	115.066,6	136.623,9	151.465,8	163.879,8	304.143,3
	Total	7.406.291,3	8.163.912,6	9.187.759,4	9.875.980,55	10,623,178.6

Sumber : BPS, Tanah Datar Dalam Angka Tahun 2016

*) Angka sementara

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Dalam kurun waktu tahun 2012-2016, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar berfluktuasi. Pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi 5,84%, dan pada tahun 2015 menurun 5,31%. Pada tahun 2016, pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Datar diproyeksikan mencapai 5,98%. Pertumbuhan ekonomi ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan aktivitas ekonomi Kabupaten Tanah Datar, khususnya aktivitas di bidang pertanian yang dari tahun ke tahun masih menjadi kegiatan ekonomi utama masyarakat Kabupaten Tanah Datar.

Tabel 2.17

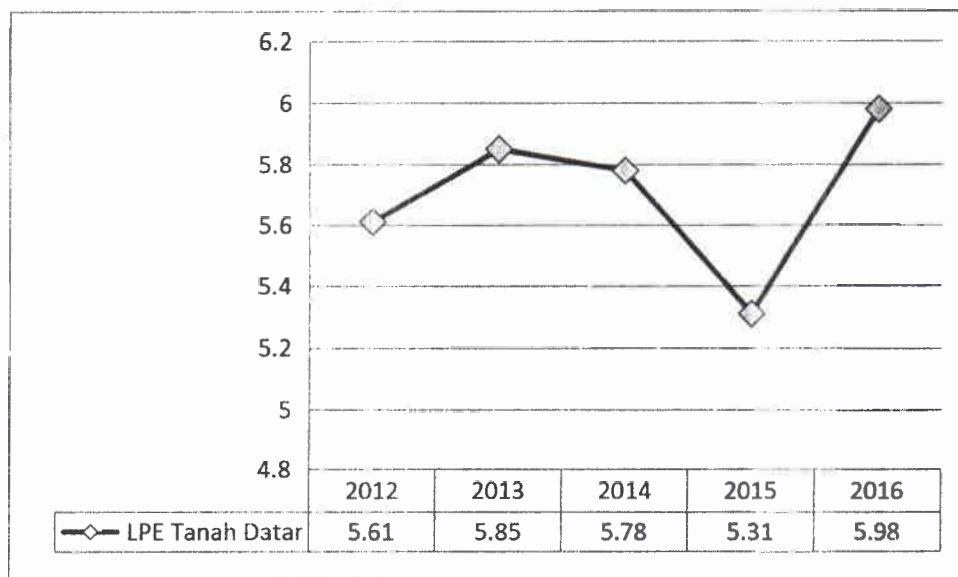
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha, 2012 – 2016

No	Sektor	Tahun				
		2012	2013	2014	2015*)	2016**)
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,90	2,10	4,87	4,00	4,00
2.	Pertambangan dan Penggalian	5,84	5,38	6,97	6,90	6,88
3.	Industri Pengolahan	6,78	4,03	4,63	5,00	5,02
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	5,91	1,66	8,69	8,00	8,00
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,93	6,25	5,89	9,00	8,80
6.	Konstruksi	8,55	11,38	5,76	5,99	5,96
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,42	8,04	7,73	6,99	7,22
8.	Transportasi dan Pergudangan	9,03	10,25	8,25	7,99	8,02
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,78	4,62	5,97	6,00	6,02
10.	Informasi dan Komunikasi	11,52	12,45	7,82	3,03	3,05
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,34	6,41	6,54	6,99	6,97
12.	Real Estat	4,84	6,49	6,56	6,00	6,20
13.	Jasa Perusahaan	5,25	5,45	5,76	5,99	5,89
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,97	6,83	2,84	2,99	2,90
15.	Jasa Pendidikan	9,67	3,42	6,32	6,00	6,42
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,17	7,42	7,75	8,00	7,98
17.	Jasa lainnya	5,39	5,40	5,61	6,00	6,04
	Pertumbuhan Ekonomi	5,61	5,85	5,78	5,31	5,98

Sumber : BPS, Tanah Datar Dalam Angka Tahun 2016

*) Data sementara **)Data diolah

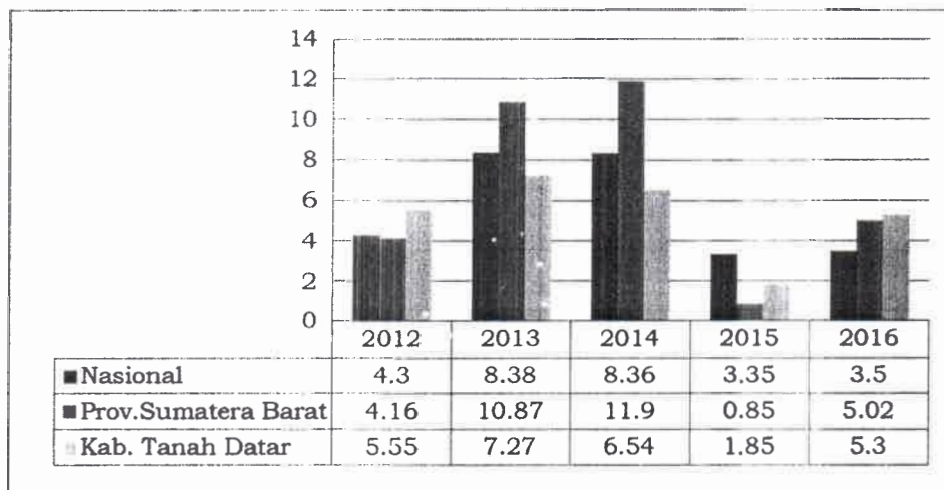
Grafik 2.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi, 2012 - 2016



1. Laju Inflasi Provinsi Sumatera Barat

Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Inflasi didasarkan pada indeks harga konsumen (IHK) yang dihitung secara sampel di 45 (empat puluh lima) kota di Indonesia yang mencakup 2.834.397 komoditas dan dihitung berdasarkan pola konsumsi hasil survei biaya hidup (SBH). Tabel dan grafik berikut ini menyajikan data inflasi provinsi Sumatera Barat dan Nasional, Kabupaten Tanah Datar tahun 2011-2016.

Grafik 2.3
Inflasi Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2012 - 2016



Sumber : Badan Pusat Statistik (2015)

*) Angka estimasi

2. PDRB Per Kapita

Indikator lain yang sering digunakan sebagai tolok ukur kekuatan ekonomi suatu daerah adalah nilai PDRB perkapita. Secara konsepsional PDRB perkapita merupakan hasil bagi antara nilai nominal PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Dengan demikian, PDRB perkapita hanya merupakan gambaran nilai tambah yang bisa diciptakan dan diterima secara rata-rata oleh masing-masing penduduk akibat dari adanya aktivitas produksi.

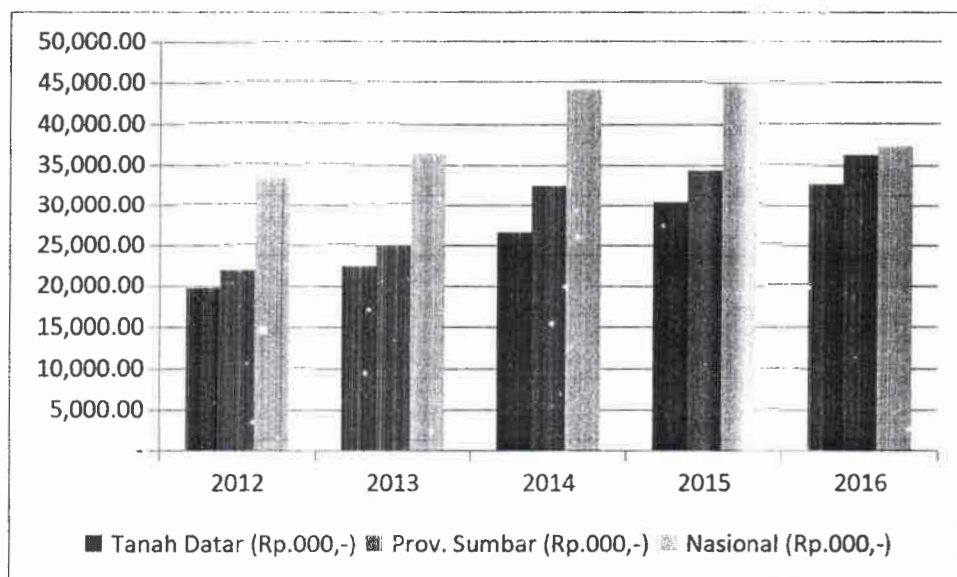
Pada tahun 2015, jumlah penduduk Kabupaten Tanah Datar berjumlah 344.828 jiwa, dengan demikian PDRB perkapita Kabupaten Tanah Datar mencapai kisaran Rp. 30.496.000,- per tahun. Tabel berikut ini merupakan perbandingan PDRB perkapita Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.

Tabel 2.18
PDRB Per Kapita Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, 2012-2016

No	Uraian	Tahun (X1000)				
		2012	2013	2014	2015	2016 ^{*)}
1.	PDRB Kab. Tanah Datar	19.700	22.500	26.720	30.496	32.770
2.	PDRB Prov. Sumatera Barat	22.035	25.086	32.550	34.410	36.410
3.	PDRB Nasional	33.531	36.508	44.360	44.780	37.460

^{*)}Sumber Data Konsultasi Publik RKPD Prov SUMBAR 2018

Grafik 2.4
PDRB Perkapita, 2012 - 2016



2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

a. Indeks Pembangunan Manusia

Angka IPM menjelaskan kesempatan masyarakat untuk mengakses pelayanan, khususnya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata ukur (geometrik) dari indeks harapan hidup (rata-rata usia harapan hidup saat lahir), indeks pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah) dan indeks standar hidup layak. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2011 – 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.19
IPM Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, 2012 – 2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	IPM Kabupaten Tanah Datar	67,29	68,12	68,51	69,49	n/a
2	IPM Provinsi Sumatera Barat	68,36	68,91	69,36	69,98	n/a
3	IPM Nasional	67,70	68,31	68,90	69,55	70,1

Kategori *Human Development Index reduction short fall* :

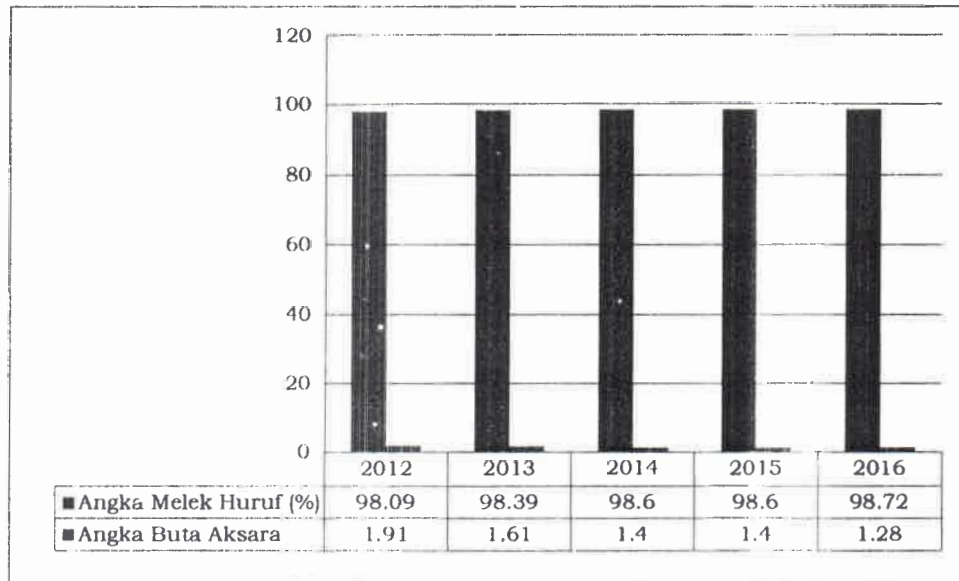
1. Sangat lambat jika $< 1,3$
2. Lambat jika $1,3 - 1,5$
3. Menengah jika $1,5 - 1,7$
4. Cepat jika $> 1,7$

Berdasarkan perhitungan kecepatan perkembangan IPM dengan menggunakan rumus *annual reduction in short fall*, diperoleh angka perkembangan IPM tahun 2011 – 2015 adalah 0,25 atau masuk kategori sangat lambat.

b. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf di Kabupaten Tanah Datar sudah tinggi, hal ini menunjukkan bahwa program-program pemberantasan buta huruf sudah berhasil dilaksanakan seperti belajar paket A, B dan C serta program penunjang kinerja seperti kelompok kegiatan belajar masyarakat. Angka melek huruf ini juga menunjukkan kemampuan penduduk Kabupaten Tanah Datar dalam menyerap informasi dari berbagai media yang mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah. Perkembangan angka melek huruf di Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2012 – 2016 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.5
Angka Melek Huruf dan Angka Buta Aksara, 2012 - 2016



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar (2016)

c. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang dijalani. Indikator RLS dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tanah Datar tahun 2016 sebesar 7,93 tahun hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pendidikan di Kabupaten Tanah Datar tidak tamat SMP/MTs atau hanya sampai kelas 2 SMP/MTs. Perkembangan rata-rata lama sekolah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.20
Angka Rata-rata Lama Sekolah, 2012 - 2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Angka rata-rata lama sekolah	7,63	7,78	7,8	7,82	7,93

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar (2016)

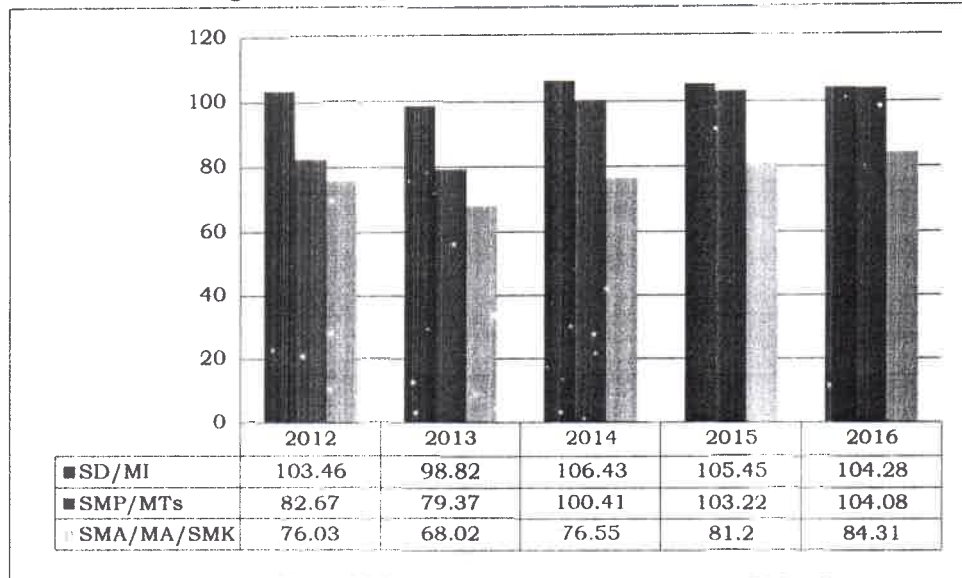
Rata-rata lama sekolah pada setiap tahun terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan telah berhasil dengan baik meskipun kenaikannya tidak signifikan.

d. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan yang merupakan indikator yang paling sederhana untuk mendukung daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Perkembangan angka partisipasi kasar di Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2012 - 2016 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.6
Angka Partisipasi Kasar (APK), 2012 – 2016



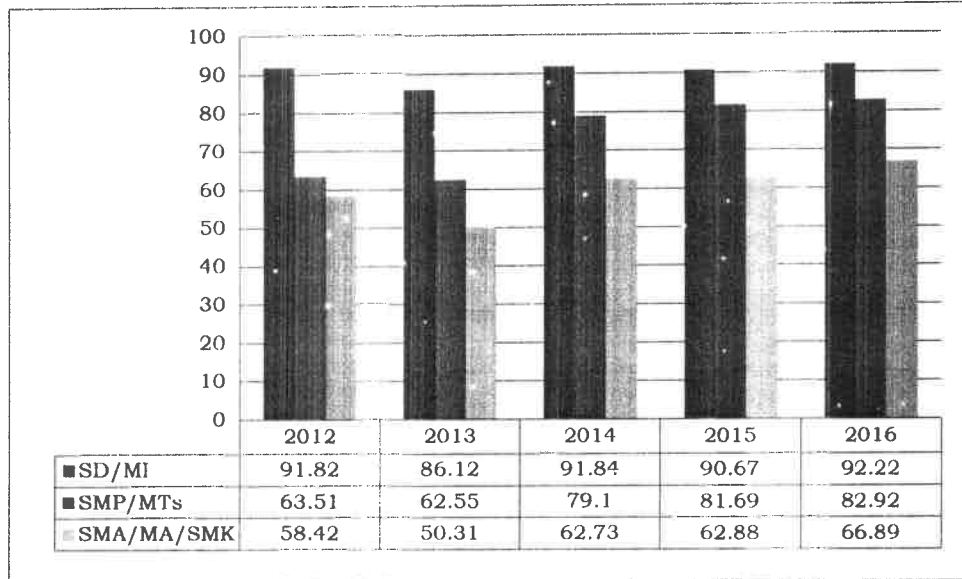
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar (2016)

Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan SMP/MTs dan SMA/MA/SMK pada tahun 2016 mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan tersebut. Sedangkan pada jenjang pendidikan SD/MI mengalami penurunan dari 105,45% pada tahun 2015 menjadi 104,28% pada tahun 2016. Hal ini disebabkan oleh siswa yang berada di perbatasan cenderung bersekolah ke daerah tetangga yang mutu pendidikannya lebih baik karena merupakan sekolah *boarding school* (sekolah percontohan) serta adanya kebijakan pembatasan usia masuk sekolah dan berkurangnya jumlah anak yang tinggal kelas.

e. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan penduduk usia antara 7 s.d 8 tahun yang mendaftar pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 s.d 18 tahun. Angka partisipasi murni menunjukkan angka partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu yang merupakan indikator daya serap yang lebih baik. Pada grafik dibawah ini dapat terlihat bahwa angka partisipasi murni meningkat dari tahun 2013. Hal ini disebabkan karena meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM.

Grafik 2.7
Angka Partisipasi Murni (APM), 2012 – 2016

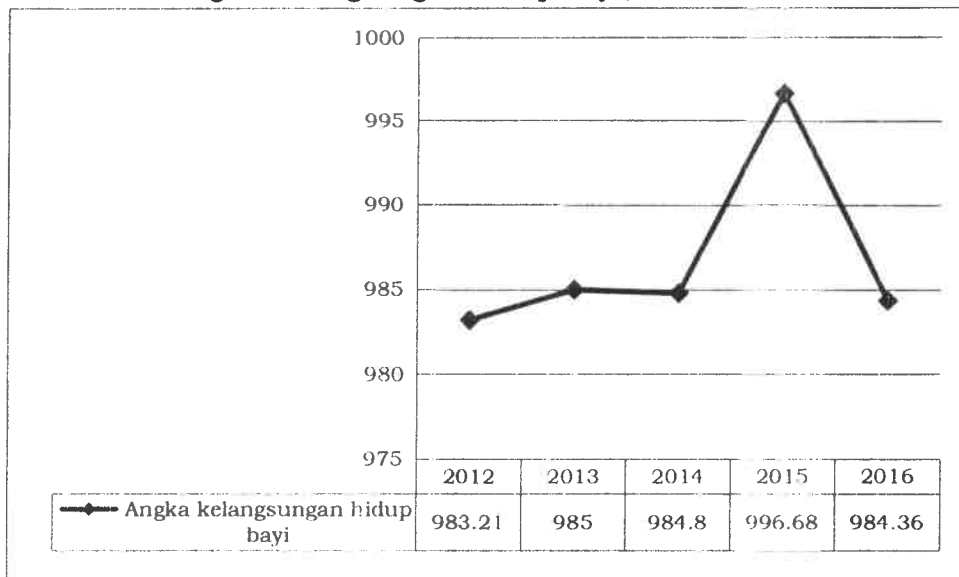


Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar (2016)

f. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka kelangsungan hidup bayi yaitu jumlah kematian bayi dalam satu tahun dibagi dengan jumlah bayi yang lahir dalam satu tahun. Angka kelangsungan hidup bayi di Kabupaten Tanah Datar berfluktuasi dari tahun ke tahun dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 2.8
Angka Kelangsungan Hidup Bayi, 2012 – 2016

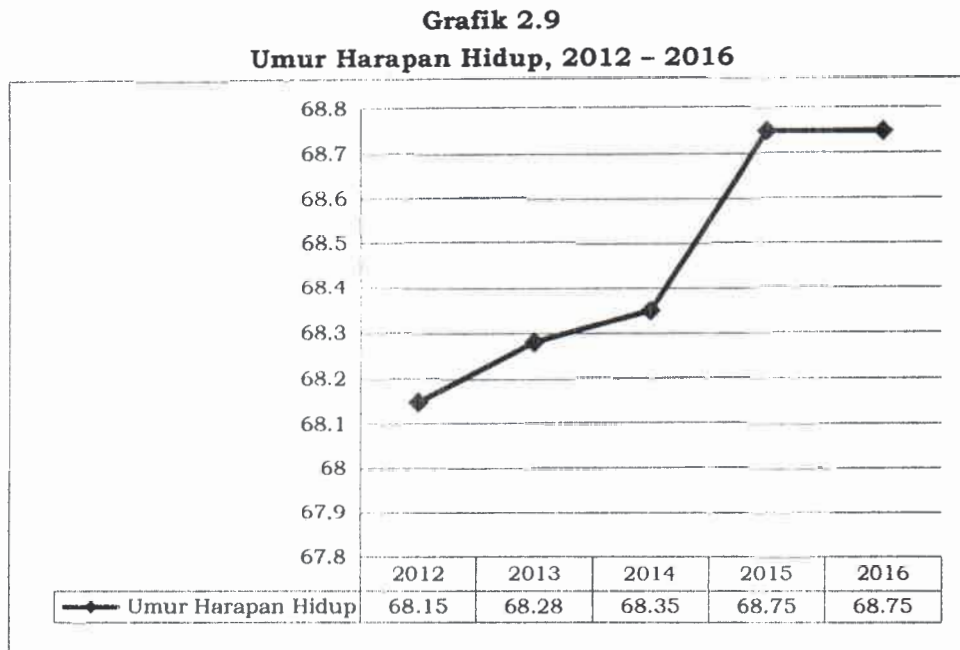


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar (2016)

Angka kelangsungan hidup bayi dipengaruhi oleh multi faktor antara lain penyakit infeksi, berat badan lahir rendah, persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan dan lain-lain.

g. Angka Usia Harapan Hidup

Untuk menilai kinerja pembangunan kesehatan salah satunya dapat dilihat pada indikator Umur Harapan Hidup sebagaimana tergambar pada grafik berikut :



Sumber: Tanah Datar Dalam Angka (2016)

Dari grafik di atas terlihat Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Tanah Datar mengalami peningkatan, yaitu 68,28 tahun pada tahun 2012 menjadi 68,45 tahun pada tahun 2016. Dengan kata lain, upaya pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat telah berhasil dilaksanakan dalam bentuk meningkatkan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas antara lain pelayanan preventif (pengendalian kesehatan lingkungan, pengawasan obat tradisional, pencegahan penyakit menular dan tidak menular) dan pelayanan promotif (PHBS) dan meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan di Rumah Sakit (kuratif dan rehabilitatif).

h. Rasio Penduduk yang Bekerja

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Penambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan lapangan kerja sehingga dapat menyerap penambahan angkatan kerja.

Tabel 2.21
Jumlah Angkatan Kerja, 2012 - 2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke atas	243.020	240.066	245.168	245.168	249.882
2	Angkatan Kerja	167.235	172.722	167.911	167.911	153.984
	- Bekerja	161.449	164.359	162.375	162.375	147.874
	- Pengangguran	5.786	8.363	5.536	5.536	6.189
3	Bukan Angkatan Kerja	75.785	67.614	82.793	82.793	95.898
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	68,82	71,95	68,49	68,49	61,64

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
5	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)/Rasio penduduk yang bekerja %	96,54	95,16	96,70	96,70	96,00
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3,46	4,84	3,30	3,30	4,02

Sumber : Tanah Datar Dalam Angka (Data Diolah, 2016)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas terus meningkat, Tingkat kesempatan kerja (rasio penduduk yang bekerja) di Kabupaten Tanah Datar cukup tinggi yaitu sebesar 96,70% sedangkan tingkat pengangguran terbuka hanya 3,30%, ini berarti angkatan kerja yang bekerja lebih banyak dibandingkan dengan yang masih mencari pekerjaan atau menganggur.

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

a. Perkembangan Seni dan Budaya

Pembinaan terhadap perkembangan seni budaya dan olahraga dapat dilihat dari jumlah grup kesenian dan jumlah sarana olah raga sebagaimana tergambar dalam Tabel berikut:

Tabel 2.22
Jumlah dan Jenis Grup Kesenian Yang Aktif, 2012 - 2016

No	Grup Kesenian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Tradisional	129	146	146	150	150
	- Randai	39	39	39	42	42
	- Talempong	39	39	39	40	40
	- Pencak Silat	7	7	7	7	7
	- Tari Rakyat	5	22	22	22	22
	- Saluang Rabab	39	39	39	39	39
2	Non Tradisional	147	120	120	120	120
	- Band	8	8	8	8	8
	- Rebana	75	47	47	47	47
	- Drama	-	1	1	1	1
	- Salawat Dulang	64	64	64	64	64
	Jumlah	276	266	266	270	270

Sumber : Dinas Budparpora Kabupaten Tanah Datar (2016)

Dari tabel di atas terlihat bahwa perkembangan jumlah grup kesenian tradisional pada tahun 2012 mengalami peningkatan sedangkan jumlah grup kesenian non tradisional tidak mengalami peningkatan. Hal ini dapat diketahui dari aktif tidaknya grup kesenian tersebut mengikuti lomba kesenian tradisional yang diadakan di tingkat kabupaten. Disamping itu belum semua grup kesenian yang ada di Kabupaten Tanah Datar terpublikasi.

b. Perkembangan Olahraga

Tabel 2.23
Jumlah Sarana Olah Raga, 2012 - 2016

No	Sarana Olahraga	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Sepak Bola	100	100	100	101	101
2	Bola Volley	200	200	200	209	209
3	Bulutangkis	88	88	88	88	88
4	Sepak Takraw	117	117	117	117	117
5	Tenis Lapangan	6	5	5	5	5
6	Bola basket	37	37	37	37	37
7	Panjat Tebing	2	1	2	2	2
8	Kolam Renang	3	3	3	3	3
	Jumlah	553	551	552	562	562

Sumber : Dinas Budparpora Kabupaten Tanah Datar (2016)

Dari tabel di atas terlihat jumlah sarana olah raga di Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2012 mengalami peningkatan terutama sarana olahraga sepak bola dan bola volley. Pelaksanaan turnamen sepak bola dan bola volley antar nagari yang rutin menjadi agenda Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan beberapa turnamen bersifat non-reguler. Hal ini menjadi salah satu pendorong meningkatnya jumlah sarana olahraga tersebut, disamping minat masyarakat untuk memanfaatkan sarana olahraga dari tahun ke tahun sudah optimal.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

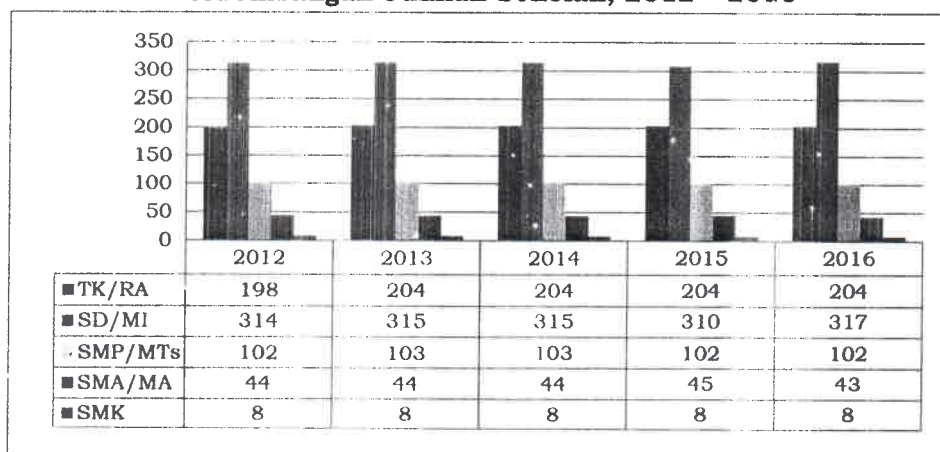
2.1.3.1. Layanan Urusan Wajib Dasar

a. Pendidikan

1) Fasilitas Pendidikan

Untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Tanah Datar perlu didukung dengan fasilitas yang memadai, dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.10
Perkembangan Jumlah Sekolah, 2012 - 2016



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar (2016)

Dari Grafik 2.16 terlihat bahwa peningkatan jumlah TK/RA hanya terjadi pada tahun 2013 yaitu bertambah 6 unit dari tahun 2012. Sedangkan sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 tidak terjadi penambahan jumlah TK maupun RA. Pada tahun 2014 juga terjadi perubahan pengelolaan sebanyak 8 unit dari TK menjadi RA oleh Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar.

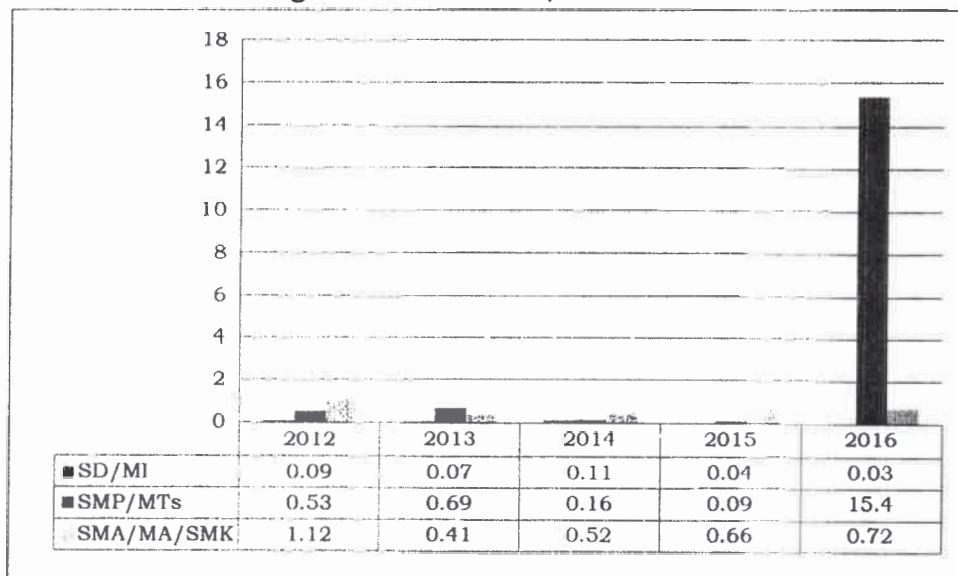
Perkembangan jumlah fasilitas pendidikan untuk jenjang pendidikan SD/MI dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 mengalami peningkatan, meskipun pada tahun 2015 terjadi penurunan jumlah sekolah SD/MI. Sedangkan jumlah SMP/MTs pada tahun 2012 – 2016, terjadi penambahan 1 (satu) unit sekolah pada tahun 2013, namun pada tahun 2015 jumlah SMP/MTs kembali menjadi 102 unit dan hal ini berlangsung sampai dengan tahun 2016.

Jumlah SMA/MA pada tahun 2012 - 2016 mengalami penurunan menjadi 43 unit tahun 2016. Sedangkan jumlah SMK pada tahun 2012-2013 tidak mengalami perubahan.

2) Angka Putus Sekolah

Salah satu indikator untuk menilai kinerja pendidikan yaitu angka putus sekolah adalah jumlah siswa yang drop out dibandingkan dengan seluruh siswa yang ada disekolah.

Grafik 2.11
Angka Putus Sekolah, 2012 – 2016



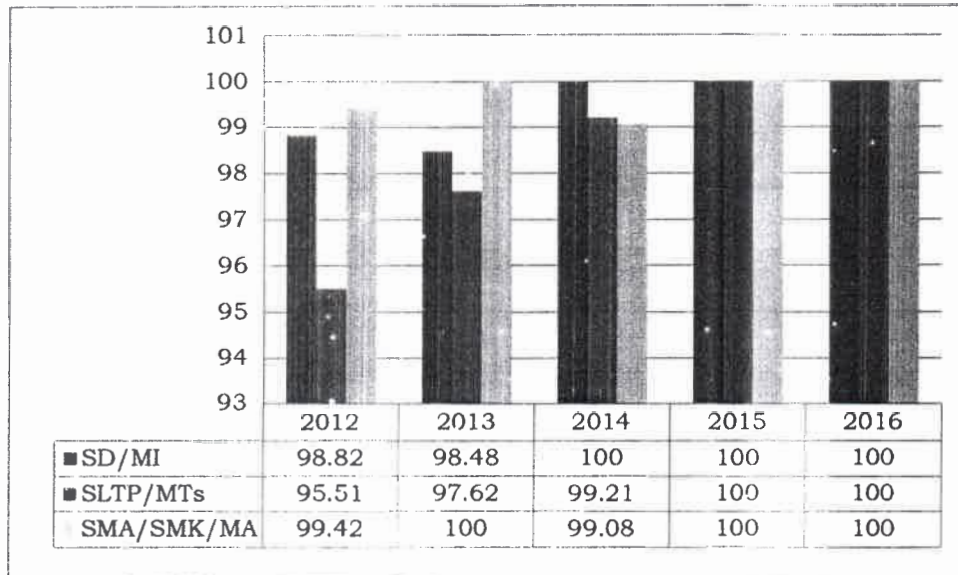
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar (2016)

Selama periode tahun 2012-2016, pemerintah mampu menurunkan persentase siswa putus sekolah untuk tingkat SD/MI, kecuali pada tahun 2014 persentase siswa putus sekolah pada tingkat SD/MI justru meningkat menjadi 0,11%. Tetapi kondisi ini dapat diperbaiki pada tahun 2016 menjadi 0,03%. Sementara untuk jenjang SMP/MTs, persentase siswa putus sekolah naik signifikan di tahun 2016 menjadi 15,40% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi yang sama juga terjadi pada jenjang SMA/SMK/MA, persentase siswa putus sekolah terus meningkat setiap tahunnya, terakhir mencapai 0,72% pada tahun 2016. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain oleh faktor lingkungan, pola asuh di keluarga dll.

3) Angka Kelulusan

Persentase siswa lulus ujian nasional tahun 2016 untuk seluruh jenjang pendidikan telah menunjukkan hasil yang sangat baik, yaitu seluruh siswa mampu lulus ujian nasional 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kabupaten Tanah Datar cukup berhasil dalam penyelenggaraan layanan pendidikan. Hal ini terbukti dengan Kabupaten Tanah Datar menjadi pengelola pendidikan terbaik selama 4 tahun berturut-turut.

Grafik 2.12
Angka Kelulusan, 2012 - 2016



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar (2016)

Adapun jumlah siswa yang diterima di Perguruan Tinggi meningkat dari tahun 2015 dari 51,36% menjadi 54,24% tahun 2016. Hal ini sebanding dengan prestasi yang diterima Kabupaten Tanah Datar sebagai pengelola pendidikan terbaik di Sumatera Barat, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.24
Persentase Siswa SMA/SMK/MA Diterima di Perguruan Tinggi Negeri, 2012 - 2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah siswa lulus SMA/SMK/MA	3.570	3.912	4.081	4.081	4.272
2	Jumlah siswa yang diterima di PTN	1.372	2.129	2.096	2.096	2.317
3	Persentase	38,55	54,44	51,36	51,36	54.24

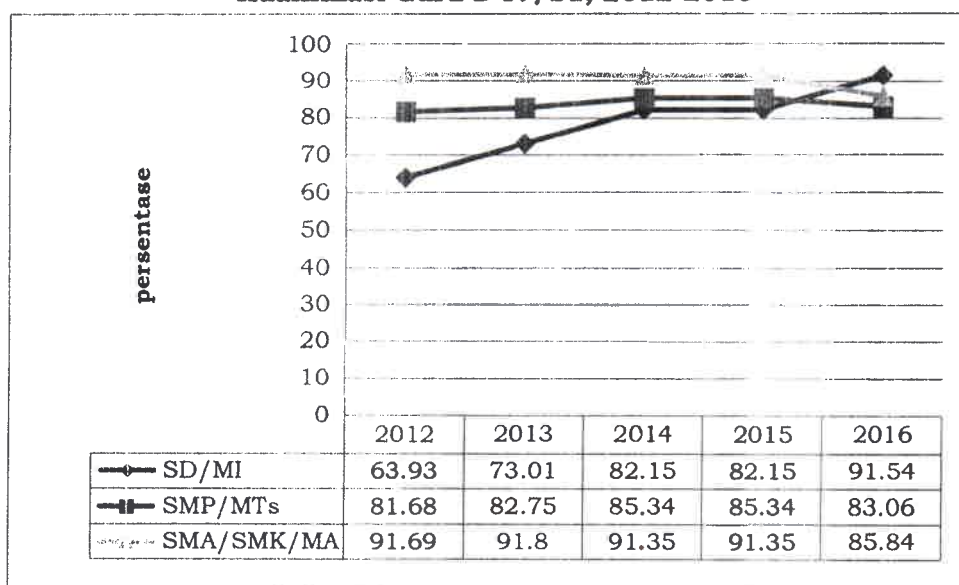
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar

4) Guru yang memenuhi kualifikasi D-IV/S1

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru bahwa seorang guru harus memiliki ijazah atau kualifikasi akademik S1 atau D4. Untuk menyikapi undang-undang tersebut pemerintah Kabupaten Tanah Datar setiap tahun memprogramkan peningkatan kualitas guru sehingga diharapkan secara bertahap, guru-guru di Kabupaten Tanah Datar telah memiliki kualifikasi pendidikan sarjana.

Jumlah guru yang berkualifikasi S1 mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun belum dapat memenuhi harapan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru yaitu paling lambat pada tahun 2015 semua guru sudah berkualifikasi S1. Hal ini disebabkan antara lain karena jika semua guru yang belum berpendidikan S1 direkomendasikan untuk mengikuti pendidikan S1, maka akan menghambat proses belajar mengajar dan sekolah-sekolah akan kekurangan guru. Selain itu masih banyak guru yang belum berpendidikan S1 akan memasuki masa pensiun sehingga tidak memungkinkan untuk mengikuti S1. Oleh karena itu perlu ditingkatkan kemampuan guru dan kualifikasi pendidikan guru dalam mengajar sehingga diharapkan setiap tingkat memiliki guru yang layak mengajar.

Grafik 2.13
Kualifikasi Guru D-IV/S1, 2012-2016



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar (2016)

b. Kesehatan

1) Angka Kematian (mortalitas)

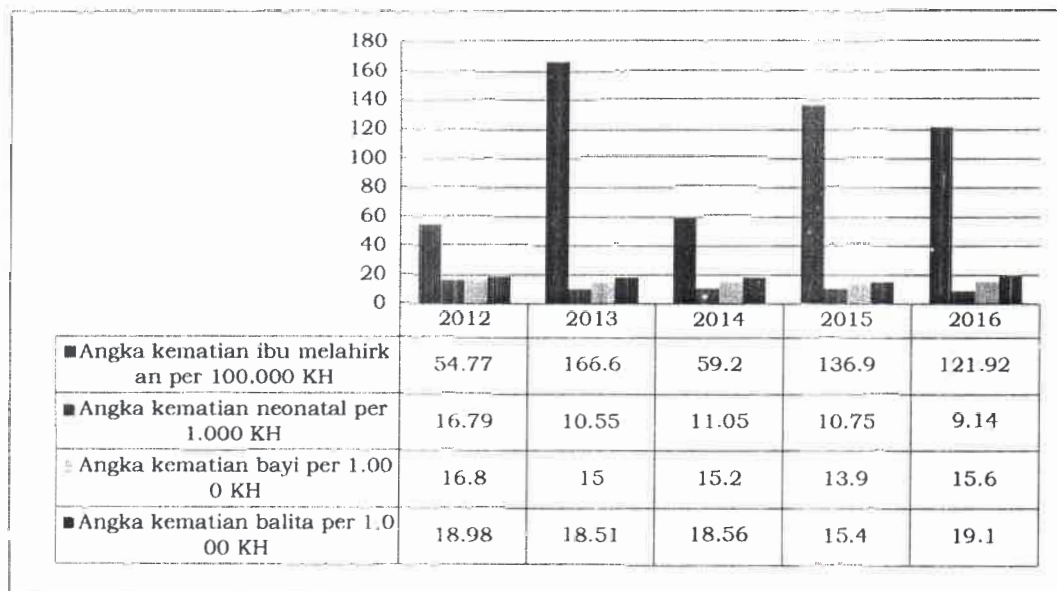
Indikator untuk menilai derajat kesehatan antara lain angka kematian ibu (AKI), angka kematian neonatal, angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian balita (AKABA).

Angka Kematian Ibu Melahirkan pada tahun 2016 terjadi penurunan bila dibandingkan tahun 2015. Angka Kematian Neonatal adalah angka kematian yang terjadi dari hari pertama melahirkan sampai rentang waktu 28 hari sejak kelahiran. Angka Kematian Neonatal dan Angka Kematian Bayi dari tahun 2012-2016 berfluktuasi. Demikian juga halnya dengan angka kematian balita yang angkanya juga berfluktuasi setiap tahun.

Hal ini dipengaruhi oleh upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan, seperti peningkatan keterampilan petugas dalam bentuk asuhan persalinan normal (APN) yang wajib diikuti oleh setiap petugas kesehatan yang menolong persalinan, pemasangan stiker (P4K) pada rumah ibu hamil untuk mendeteksi resiko dan akses ibu hamil ke fasilitas kesehatan serta penggunaan buku KIA secara tepat dan benar untuk memberikan informasi tentang kehamilan dan balita.

Perkembangan indikator-indikator tersebut di atas dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.14
Angka Kematian (Mortalitas), 2012-2016

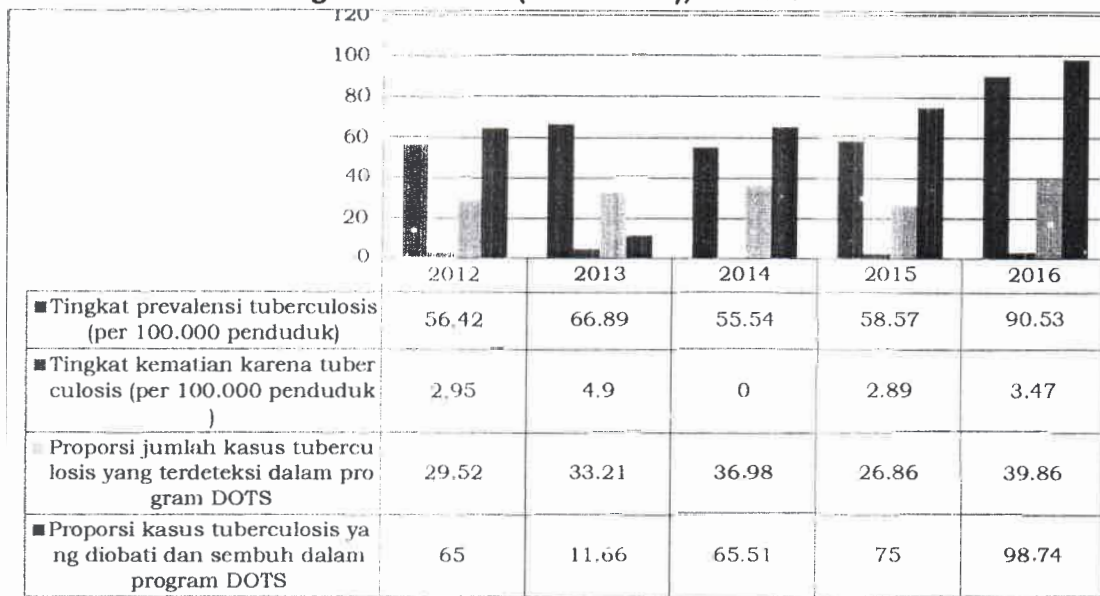


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar (2016)

2) Angka Kesakitan (morbidity)

Adapun indikator lain untuk menilai derajat kesehatan yaitu angka kesakitan yang dilihat dari kejadian penyakit menular yang dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.15
Angka Kesakitan (Morbidity), 2012-2016



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar (2016)

Penyakit Tuberculosis merupakan penyakit menular yang apabila tidak diobati beresiko 50% berakibat pada kematian. Tingkat prevalensi Tuberculosis (per 100.000 penduduk) pada tahun 2016 mengalami peningkatan cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 90,53% dengan tingkat kematian sebesar 3,47%. Strategi penanggulangan penyakit Tuberculosis dilakukan melalui pengobatan jangka pendek

dengan pengawasan langsung (*Directly Observed Treatment Short-course/DOTS*). Adanya peningkatan proporsi jumlah kasus Tuberculosis yang terdeteksi Program DOTS pada tahun 2016, juga mempengaruhi peningkatan jumlah pasien yang dapat disembuhkan dan diobati dalam Program DOTS.

3) Status Gizi

Adapun indikator lain yang dipakai untuk menilai derajat kesehatan masyarakat yaitu status gizi dengan indikator output cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.25
Cakupan Gizi Balita Buruk Mendapat Perawatan, 2012 - 2016

KEGIATAN	TAHUN				
	2012	2013	2014	2015	2016
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar (2016)

Dari tabel diatas terlihat bahwa sudah semua balita gizi buruk mendapat perawatan. Hal ini menunjukkan bahwa semua balita gizi buruk sudah ditangani oleh dinas kesehatan dan jajarannya.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indikator pembangunan daerah bidang pekerjaan umum dapat dilihat dari beberapa indikator, di antaranya sebagaimana tergambar pada berikut :

Tabel 2.26
Indikator Fokus Layanan Wajib Bidang Pekerjaan Umum

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	52,34	53,01	50,14	52,85	42,73
2.	Panjang jalan dilalui Roda 4	0,0035	0,0036	0,0037	0,0038	0,0037
3.	Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4)	100	100	100	100	100
4.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	737,32	706,31	670,38	744,10	642,3
5.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	34,87	45,8	62,62	75,44	76,30
6.	Persentase penduduk dengan akses sanitasi layak	57,32	59,1	65,56	70	78,6
7.	Jumlah irigasi dalam kondisi baik (DI)	880	950	993	1.051	415
8.	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk per 1.000	-	-	0,003	0,0027	

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
	penduduk					
9.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	4,95	4,43	4,42	4,51	4,67

1) Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

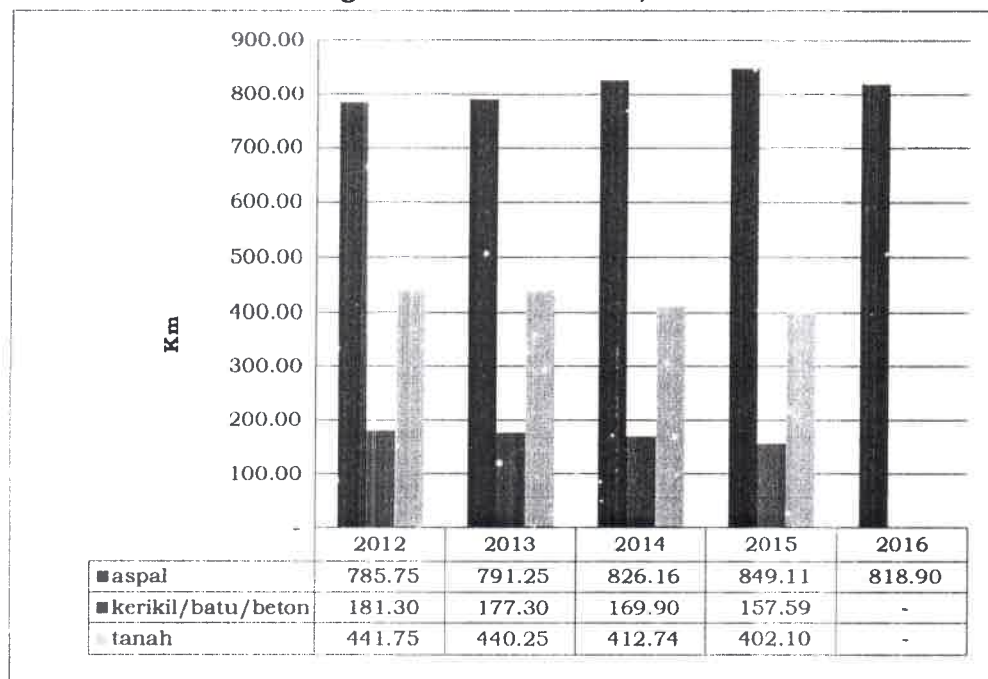
Jalan merupakan salah satu elemen perhubungan yang dominan digunakan dan dimanfaatkan oleh penduduk, keberadaan jalan memiliki peranan penting dalam pembangunan suatu daerah dimana fungsinya sebagai penghubung dan memberikan akses dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan pada sektor-sektor prioritas seperti pertanian, industri, pariwisata, pendidikan dan kesehatan.

Secara keseluruhan panjang jalan yang ada di Kabupaten Tanah Datar adalah 1.695,60 Km yang terdiri dari :

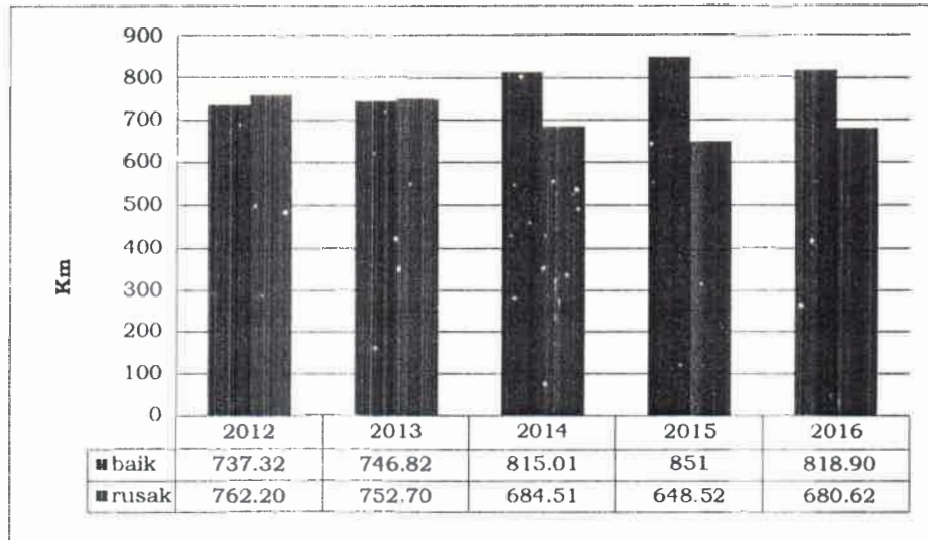
- Jalan Nasional sepanjang 42,2 Km
- Jalan Provinsi sepanjang 153,88 Km
- Jalan Kabupaten sepanjang 1.499,52 Km

Untuk Jalan Nasional dan Jalan Provinsi umumnya memiliki kondisi cukup baik hanya jalan kabupaten yang memiliki kondisi yang bervariasi yaitu rusak dan baik. Pada tahun 2016 jalan kabupaten mengalami penambahan panjang jalan sepanjang 90,72 Km berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 620/164/DPU-2016 tentang Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten. Adapun perkembangan jenis permukaan dan kondisi Jalan Kabupaten dapat dilihat pada grafik :

Grafik 2.16
Perkembangan Jenis Permukaan, 2012 - 2016



Grafik 2.17
Perkembangan Kondisi Jalan, 2012 – 2016



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar

Pada tahun 2012, panjang jalan aspal adalah 785,75 km, dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 818,90 Km. Demikian juga halnya dengan jalan dengan kondisi baik, dimana pada tahun 2012 adalah 737,32 km dan meningkat menjadi 818,90 Km pada tahun 2016.

Masih tingginya persentase jalan rusak disebabkan oleh kondisi geografis Kabupaten Tanah Datar dan berada diatas jalur patahan semangko, sehingga sering terjadi pergeseran-pergeseran pada permukaan bumi yang mengakibatkan rusaknya infrastruktur jalan. Selain itu juga sering dijadikan sebagai jalan alternatif oleh kendaraan pengangkut barang antar Provinsi yang bertonase tinggi serta melebihi daya dukung Jalan Kabupaten.

2) Persentase Rumah Tangga Bersanitasi

Salah satu yang menjadi penilaian rumah layak huni adalah rumah berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi sebagai berikut ; 1) fasilitas air bersih, 2) pembuangan air besar/tinja, 3) pembuangan air limbah (air bekas) dan pembuangan sampah. Persentase rumah tangga bersanitasi sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.27
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi dan Persentase Penduduk Berakses Sanitasi Layak, 2012 – 2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	34,87	45,8	62,62	75,44	76,50
2	Persentase Penduduk Berakses Sanitasi Layak	57,32	59,1	65,56	70	78,6

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa sampai tahun 2016 persentase rumah tinggal bersanitasi dan persentase penduduk berakses sanitasi layak di Kabupaten Tanah Datar terus meningkat.

3) Jaringan Irigasi Kabupaten

Pembangunan irigasi ditujukan untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi hasil pertanian. Saat ini jumlah Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Tanah Datar adalah sebanyak 1.512 DI yang terdiri dari 1 (satu) DI merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yaitu Irigasi Batang Sinamar, 2 (dua) DI merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi yaitu Irigasi Batang Selo dan Galo Gandang, 9 (sembilan) DI merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi lintas kabupaten dan 1.500 DI yang merupakan kewenangan kabupaten, dari 1500 DI tersebut 635 DI sudah masuk dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Tabel 2.28
Aspek Pelayanan Umum Bidang Pekerjaan Umum - Irigasi, 2012 - 2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016 ^{*)}
1	Irigasi berkondisi baik	880	950	993	1051	380
2	Irigasi kondisi rusak	632	562	519	461	255

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar

*) Data berdasarkan Keputusan Menteri PUPR

Secara umum DI dengan kondisi baik setiap tahunnya terus meningkat disebabkan karena meningkatnya alokasi anggaran pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi dari tahun ke tahun seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Irigasi dan meningkatnya partisipasi masyarakat khususnya kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) bersama GP3A dalam pemeliharaan jaringan irigasi. Khusus pada tahun 2016, irigasi yang menjadi kewenangan Dinas PUPR adalah irigasi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri PUPR, yaitu berjumlah 635 DI; yang berkondisi baik adalah 380 DI, sisanya sebanyak 255 DI dalam kondisi rusak.

4) Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

Penduduk Kabupaten Tanah Datar adalah mayoritas beragama islam, sehingga tempat ibadah untuk agama non muslim secara resmi tidak ada. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk pada tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.29
Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk, 2012-2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Tempat Ibadah	1.692	1.519	1.519	1.666	1.695
2.	Jumlah Penduduk	341.911	342.864	343.875	362,579	362,759
3.	Rasio per 1.000 penduduk	4,95	4,43	4,42	4,59	4,67

Sumber : Tanah Datar Dalam Angka

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rasio untuk 1.000 penduduk Kabupaten Tanah Datar dapat ditampung pada 4 - 5 tempat ibadah atau satu tempat ibadah dapat menampung kurang lebih 214 orang penduduk.

5) Penataan Ruang

Penataan ruang di Kabupaten Tanah Datar diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Datar tahun 2011-2031 dengan tujuan "Terwujudnya ruang wilayah kabupaten yang serasi, selaras dan seimbang antara lingkungan alam dan lingkungan binaan melalui pengaturan, pengendalian serta pemanfaatan struktur dan pola ruang wilayah kabupaten, yang berbasis pertanian dan pariwisata untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan masyarakat yang dilandasi *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*".

Berdasarkan rencana struktur ruang, dengan mengacu pada RTRWN dan RTRW Provinsi Sumatera Barat maka Kota Batusangkar diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Kabupaten Tanah Datar.

Disamping Kota Batusangkar sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) juga terdapat Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang terdiri dari 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Pariangan dengan pusat di Nagari Simabur, Kecamatan Tanjung Emas dengan pusat di Nagari Saruaso, Kecamatan Salimpaung dengan pusat di Nagari Tabek Patah dan Kecamatan Sungai Tarab di Nagari Sungai Tarab dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan yaitu Kecamatan X Koto dengan pusat di Nagari Koto Baru, Kecamatan Batipuh Selatan dengan pusat di Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuh dengan pusat di Nagari Batipuh Baruah, Kecamatan Rambatan dengan pusat di Nagari Rambatan, Kecamatan Sungai Tarab dengan pusat di Nagari Sungai Tarab, Kecamatan Sungayang dengan pusat di Nagari Sungayang, Kecamatan Padang Ganting dengan pusat di Nagari Padang Ganting, Kecamatan Lintau Buo dengan pusat di Nagari Buo, dan Kecamatan Tanjung Baru dengan pusat di Nagari Tanjung Alam. Pusat-pusat ini berfungsi sebagai pusat yang melayani kegiatan skala antar nagari.

Berdasarkan rencana pola ruang, peruntukan ruang Kabupaten Tanah Datar terdiri atas Kawasan Lindung seluas 46.883 Ha (35.09%) dan Kawasan Budidaya seluas 86.717 Ha (64.91%). Kawasan lindung meliputi Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sedangkan Kawasan Budidaya meliputi Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Hutan yang dapat dikonversi, kawasan pertanian, kawasan perkebunan dan kawasan permukiman.

Disamping PPL, di Kabupaten Tanah Datar juga terdapat kawasan perdesaan. Permasalahan dalam pemanfaatan ruang kawasan perdesaan antara lain belum tersedianya perencanaan tata ruang kawasan perdesaan.

Dalam impementasi pemanfaatan ruang, perizinan pemanfaatan ruang merupakan salah satu bentuk pengendalian pemanfaatan ruang yang bertujuan agar pemanfaatan ruang dapat berjalan sesuai dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. Perizinan merupakan kebijakan operasional pemanfaatan ruang yang berkaitan dengan penetapan lokasi, kualitas ruang dan tata bangunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hukum adat dan kebiasaan yang berlaku.

Capaian kinerja penataan ruang dapat dilihat dari indikator sebagai berikut:

- a) Rasio Ruang Terbuka Hijau Perkotaan per Satuan Luas Wilayah Perkotaan
Ruang terbuka hijau merupakan area mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Adapun kriteria ruang terbuka hijau kota adalah sebagai berikut:
 1. Lahan dengan luas paling sedikit 2.500 m²

2. Merupakan suatu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur
3. Terdapat komunitas tumbuhan.

Tabel 2.30

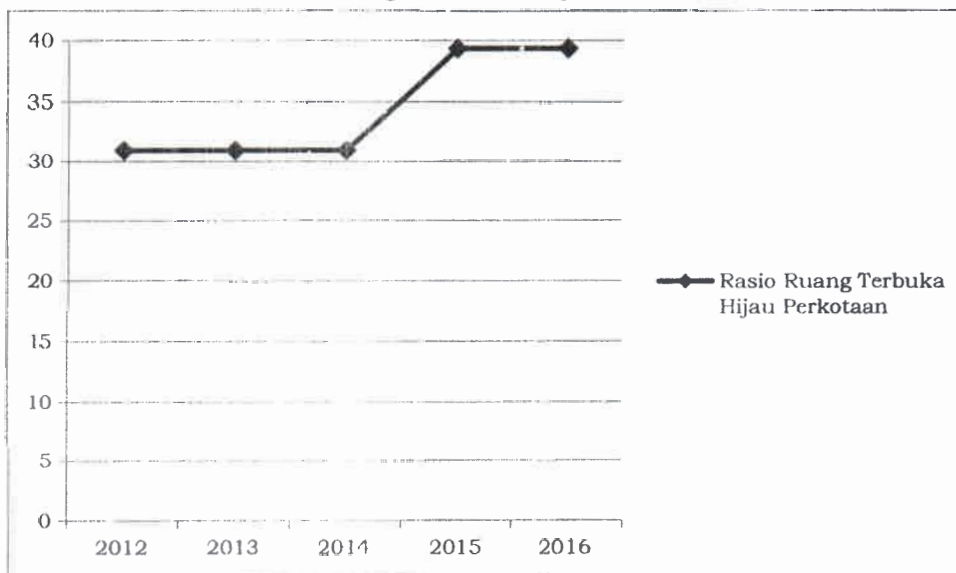
Rasio Ruang Terbuka Hijau Perkotaan per Satuan Luas Wilayah, 2012 - 2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Luas Ruang Terbuka Hijau Perkotaan (Ha)	4.049	4.050	4.050	5.150	4.232,75
2	Luas wilayah perkotaan (Ha)	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
3	Rasio Ruang Terbuka Hijau Perkotaan	30,91	30,92	30,92	39,31	32,30

Sumber : Dokumen RAKH Kabupaten Tanah Datar

Luas RTH hanya dihitung dari RTH perkotaan. Rasio perhitungannya didasarkan pada luas RTH perkotaan dibagi luas seluruh kawasan perkotaan di Kabupaten Tanah Datar.

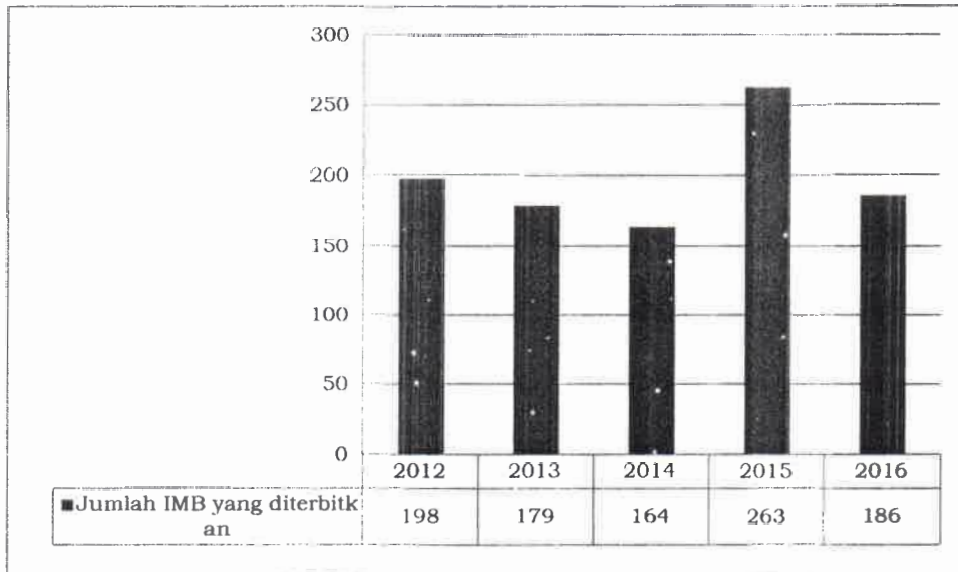
Grafik 2.18
Rasio Ruang Terbuka Hijau Perkotaan



b) Jumlah IMB yang Diterbitkan

Pelayanan urusan penataan ruang dapat dilihat dari jumlah bangunan yang memiliki izin di Kabupaten Tanah Datar. Izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Jumlah IMB yang diterbitkan periode tahun 2012 - 2016 tergambar dalam grafik berikut :

Grafik 2.19
Jumlah IMB yang Diterbitkan, 2012 - 2016



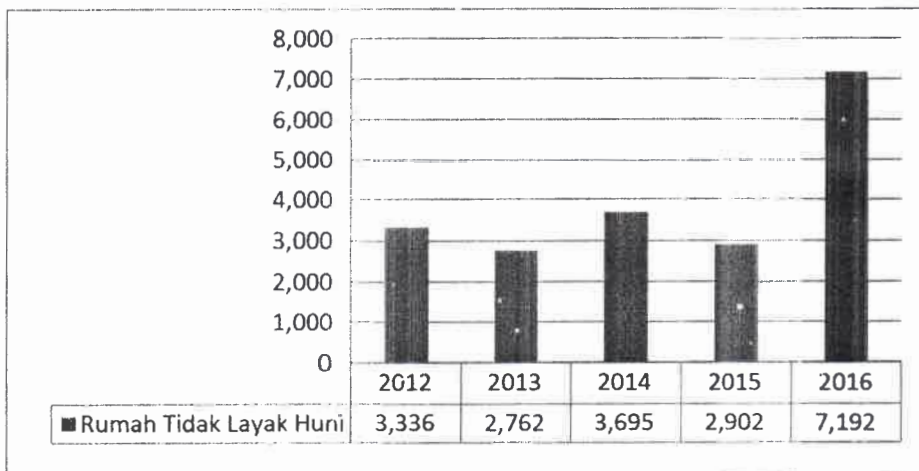
Sumber : Data diolah

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

1) Rumah Tidak Layak Huni

Kinerja pembangunan pelayanan bidang perumahan di Kabupaten Tanah Datar tahun 2012-2016 dapat dilihat dari menurunnya jumlah rumah tidak layak huni, dimana pada tahun 2012 terdapat 3.336 unit rumah tidak layak huni dan pada tahun 2016 menjadi 7.192 unit sebagaimana terlihat pada grafik berikut :

Grafik 2.20
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni, 2012 - 2016



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar

Untuk meningkatkan kualitas perumahan, telah dilaksanakan pembangunan atau rehab rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah antara lain melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

e. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus melakukan upaya untuk menjaga stabilitas ketertiban dan kemanaan lingkungan, termasuk di dalamnya adalah upaya-upaya untuk mencegah terjadinya konflik horizontal di masyarakat dan kerawanan politik. Beberapa hal yang menjadi perhatian serius di antaranya adalah perkembangan kasus narkoba yang cenderung menunjukkan peningkatan.

Data dan indikator yang terkait dengan kegiatan stabilisasi dan keamanan lingkungan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.31
Indikator Stabilitas dan Keamanan Lingkungan

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	53	54	54	12	5
2.	Kegiatan pembinaan politik daerah	1	1	1	2	
3.	Kasus Kriminalitas	347	354	416	495	147
4.	Kasus Narkoba	23	14	23	18	21

Sumber : Kantor Kesbangpol

Kondisi pelayanan keamanan di Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada indikator layanan wajib ketertiban Umum dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.32
Indikator Layanan Wajib Ketertiban Umum

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	2	1	1	1,24	1,24
2.	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	22	8	7	20	20
3.	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	n/a	n/a	n/a	4	4
4.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan)	n/a	n/a	n/a	25	25
5.	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan				1,06	1,06
6.	Cakupan patroli petugas Satpol PP				15	15
7.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	20	20	20	20	20
8.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	20	20	20	20	20
9.	Sistim Informasi Manajemen Pemda	3	3	3	6	
10.	Nilai Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat	79,15	70,08	72,38	71,58	

Sumber Data : Satpol PP dan Damkar (2016)

Pada tabel tersebut di atas kapasitas pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan tergambar dari rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk yaitu 1,24 % pada tahun 2016 hal ini masih belum terjadi peningkatan dari tahun 2015 hal ini disebabkan masih kurangnya aparatur pada Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebaran. Jumlah Linmas per 10.000 penduduk. Sampai dengan tahun 2016, berjumlah 20 sedangkan petugas Linmas di kabupaten Tanah Datar berjumlah 4 rasio jumlah Pol – PP masih sangat rendah, yaitu 1,24 per 10.000 penduduk; rasio jumlah Linmas juga masih rendah, yaitu 22 per 10.000 penduduk. Hal ini berakibat pada kemampuan Pol PP dalam melakukan patroli harian.

Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten juga baru mencapai 20% karena dari 5 Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang seharusnya ada, baru satu yang berfungsi dengan baik. Sehingga, response time rate-nya juga baru mencapai 20%.

Berdasarkan data pada tersebut, pada tahun 2012 – 2016 telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dalam bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana, bidang pemerintah nagari, bidang ketahanan pangan, dan bidang pelayanan langsung. Nilai capaian masing-masing bidang yang disurvei berada di atas 70 dan masuk kategori “Baik”. Apabila dihitung rata-ratanya, maka nilai kinerja unit pelayanan selama periode 4 (empat) tahun tersebut mencapai 73,30 sehingga masuk dalam kategori “Baik”. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah telah mampu memenuhi harapan masyarakat, meskipun belum seluruhnya.

Kriminalitas (Angka Kriminalitas Yang Ditangani)

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah dapat tersejenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat serta menanggulangi kriminalitas. Angka kriminalitas yang tertangani adalah penanganan kriminal oleh aparat penegak hukum (Kepolisian/Kejaksaan). Angka kriminalitas yang ditangani merupakan jumlah tindak kriminal yang ditangani selama satu tahun.

Tabel berikut menyajikan tindak pidana yang dapat ditangani di Kabupaten Tanah Datar selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2016.

Tabel 2.33
Tindak Pidana Yang Ditangani, 2012 – 2016

No	Jenis Kasus	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Pencurian dengan pemberatan	20	24	17	113	
2	Pencurian dengan kekerasan	4	4	5	18	
3	Curanmor	15	8	8	61	30
4	Pencurian biasa	13	16	20	46	12
5	Penipuan	8	19	18	44	14
6	Percobaan curas	-	-	-	-	3
7	Ancam dengan senjata tajam	-	-	-	-	7
8	Perampasan/pemerasan	-	2	-	2	0
9	Membawa BBM subsidi tanpa surat	5	4	6	2	0
10	Pembunuhan	2	-	-	1	1
11	Penganiayaan berat/pengeroyokan	12	14	18	22	0
12	Penganiayaan biasa	47	57	62	18	40

No	Jenis Kasus	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
13	Penganiayaan ringan	42	53	61	38	24
14	Penggelapan	9	12	13	26	19
15	Pemalsuan surat	6	7	9	7	4
16	Perjudian	24	15	21	12	14
17	Pemeriksaan	2	1	1	1	1
18	Perbuatan cabul	17	27	30	20	21
19	Poligami/Kawin liar	4	8	9	3	2
20	Kebakaran	21	18	20	14	9
21	Pengancaman	-	-	-	-	7
22	Penyerobotan tanah	31	13	17	20	6
23	Kekerasan di depan umum	-	-	-	-	0
24	Pengrusakan	20	19	22	9	15
25	Narkoba (orang)	23	14	23	18	21
26	Pertambangan tanpa izin (PETI)	-	-	-	-	-
27	Percobaan perkosaan	-	-	-	-	-
28	Perkosaan di bawah umur	-	-	-	-	-
29	Membuat perasaan tidak senang	22	29	36	-	7
	Jumlah	347	354	416	495	147
	Angka Kriminalitas yang ditangani	10,15	10,32	12,00		26 %

Sumber : Kesbangpol Kabupaten Tanah Datar (2016)

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa angka kriminalitas pada tahun 2016 terjadi penurunan yaitu sebesar 147 kasus sedangkan angka kasus yang ditangani tahun 2016 sebesar 26% meningkat dari tahun sebelumnya berarti kasus kriminalitas yang ditangani meningkat akibat adanya keseriusan dalam menangani kasus kriminalitas. Walaupun demikian kasus pemakai narkoba menaik menjad 21 kasus dari 18 kasus tahun sebelumnya. Dari data yang ada masih terdapat kasus kriminalitas ditengah masyarakat. Upaya penurunan kasus kriminalitas ini disebabkan karena meningkatnya koordinasi dengan instansi terkait (Kepolisian dan Kejaksaan) sehingga semua laporan masyarakat terhadap kriminalitas dapat ditangani dalam waktu singkat. Untuk menurunkan kasus kriminalitas, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menggalakkan pemahaman terhadap nilai-nilai agama dan budaya, diantaranya melalui Program Magrib Mengaji, Didikan Subuh, Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT), Pembinaan lembaga adat nagari dan sosialisasi adat dan budaya kepada generasi muda.

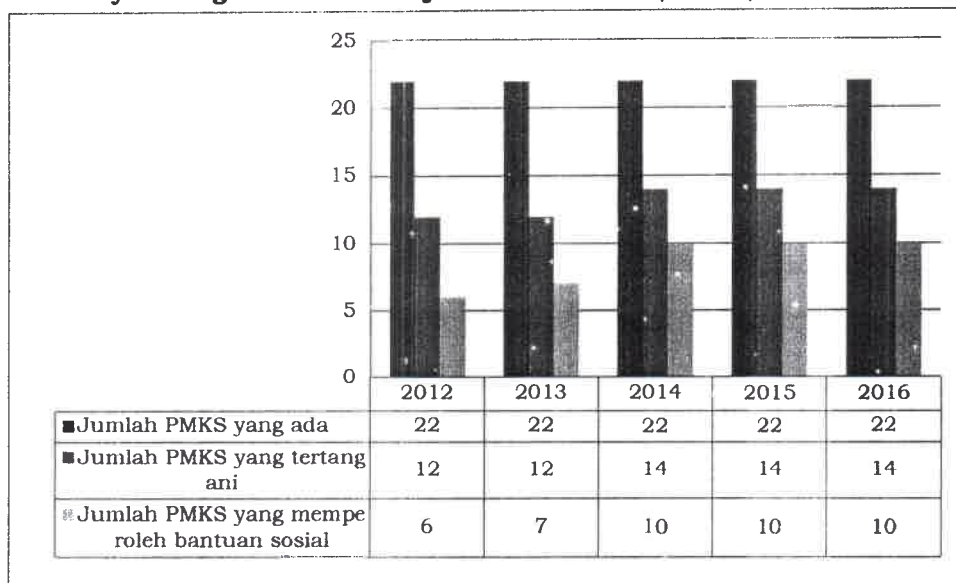
f. Sosial

1) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/keterpencilan dan perubahan

lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana. Adapun perkembangannya dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.21
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), 2012-2016



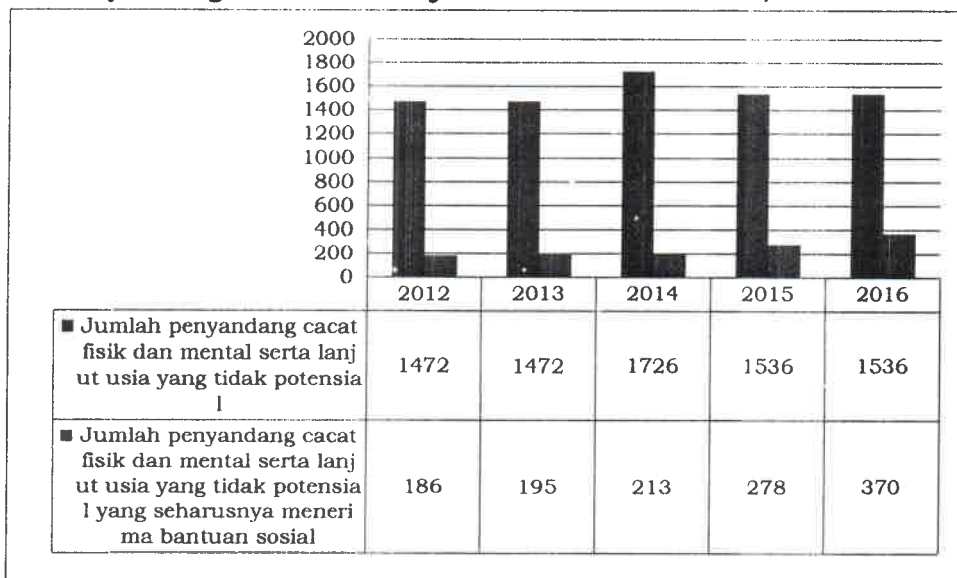
Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016

Jumlah PMKS yang ada di Kabupaten Tanah Datar sebanyak 22 jenis PMKS dari 28 jenis PMKS yang ada, yang ditangani masih 14 jenis PMKS sampai tahun 2016 serta yang memperoleh bantuan sosial sebanyak 10 jenis PMKS.

2) Penyandang Cacat

Penyandang cacat adalah orang dengan cacat mental dan fisik. Cacat mental yaitu psikotik (gila) dan keterbelakangan mental. Adapun perkembangan penyandang cacat Kabupaten Tanah Datar tahun 2012 – 2016 sebagai berikut:

Grafik 2.22
Penyandang Cacat dan Lanjut Usia Tidak Potensial, 2012-2016



Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2106

Adapun jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia yang tidak potensial setiap tahun meningkat dari 1.472 orang tahun 2012 menjadi 1.536 tahun 2016 dan yang mendapat bantuan sosial terus meningkat dari tahun 186 orang tahun 2012 menjadi 370 orang tahun 2016.

2.1.3.2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

a. Tenaga Kerja

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Penambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan lapangan kerja sehingga dapat menyerap penambahan angkatan kerja.

Angkatan Kerja (*labor force*)

Angkatan kerja adalah penduduk yang telah memasuki usia kerja baik yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja atau mencari pekerjaan atau penduduk yang sudah memasuki usia kerja yakni minimal berusia 15 tahun sampai 65 tahun. Akan tetapi tidak semua penduduk yang memasuki usia kerja termasuk angkatan kerja.

Tabel 2.34
Angkatan Kerja & Bukan Angkatan Kerja

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Penduduk Usia Kerja	243.020	240.066	245.168	246.737	249.882
2	Angkatan Kerja	167.235	172.722	167.911	164.485	153.984
	- Bekerja	161.449	164.359	162.375	157.144	147.874
	- Pengangguran	5.786	8.363	5.536	7.341	6.189
3	Bukan Angkatan Kerja	75.785	67.344	77.257	82.252	95.898
	- Sekolah	22.684	10.874	24.595	24.384	
	- Mengurus Rumah Tangga	35.082	35.619	42.375	44.852	
	- Lainnya	18.019	20.851	10.287	13.016	
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	68.82	71.95	68.49	66.66	61.64
5	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)/Rasio penduduk yang bekerja	96.54	95.16	96.70	95.54	96.00
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3.46	4,84	3.30	4.46	4.02

Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar berdasarkan data Badan Pusat Statistik (Sakernas Agustus tahun 2012 - 2016) yang diolah oleh Pusdatinaker

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas cenderung meningkat, sementara angkatan kerja jumlahnya justru menurun di tahun 2016. Tingkat kesempatan kerja (rasio penduduk yang bekerja) cukup tinggi yaitu sebesar 95% sedangkan tingkat pengangguran terbuka hanya 4,46%, ini berarti angkatan kerja yang bekerja lebih banyak dibandingkan dengan yang masih mencari pekerjaan atau menganggur.

Pemerintah daerah selalu berupaya mengurangi jumlah pengangguran melalui peningkatan SDM pencari kerja (*job training*) dan mengundang pemilik usaha untuk membuka bursa lapangan kerja (*job fair*).

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a) Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan pengarusutamaan gender, Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) dan perlindungan anak melalui lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Hal ini dapat meningkatkan peranan perempuan dalam pembangunan dan meminimalisir tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kasus KDRT meliputi kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Adapun rasio KDRT dapat dilihat pada tabel:

Tabel 2.35
Rasio KDRT, 2012 - 2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Kasus KDRT yang ditangani	13	5	19	16	55
2.	Jumlah Rumah Tangga	86.061	87.712	84.170	85.118	85.302
3.	Rasio KDRT	0,02	0,01	0,02	0,02	0,08

b) Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

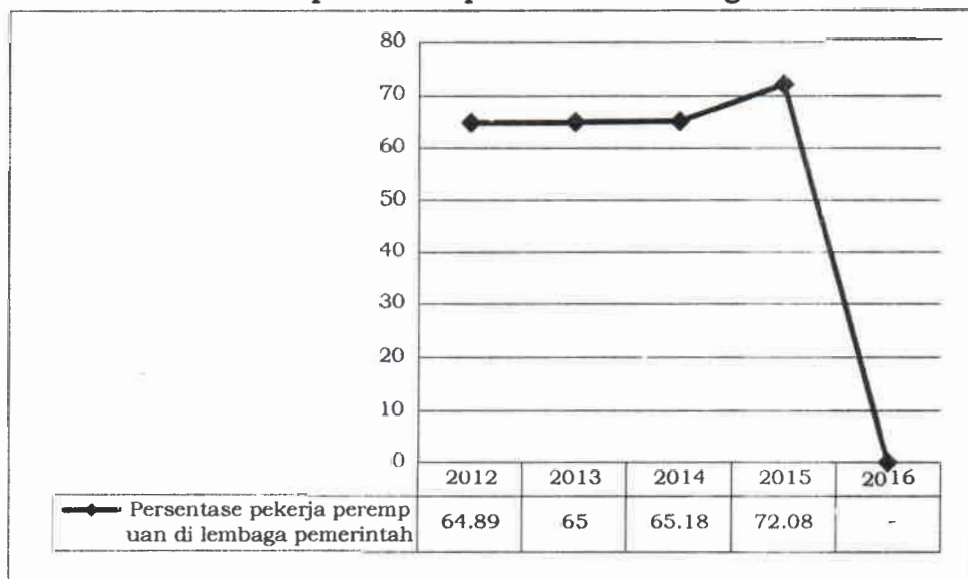
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Pekerja perempuan di lembaga pemerintahan dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah dan persentase perempuan yang menempati posisi Eselon II-IV. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.36
Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah, 2012 - 2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon II	4	5	5	5	
2.	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon III	16	17	16	17	
3.	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon IV	198	200	204	204	
4.	Pekerja perempuan di pemerintah	4.908	4.797	4.698	4.598	
5.	Jumlah PNS (Laki-Laki dan Perempuan)	7.563	7.380	7.208	7.356	
6.	Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah	64,89	65,00	65,18	72,08	

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah cukup tinggi dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun dimana dari tahun 2010 sebesar 63,87% dan pada tahun 2015 sebesar 72,08%. Hal ini menunjukkan meningkatnya peran perempuan di sektor publik, sebagaimana tergambar dalam grafik berikut :

Grafik 2.23
Persentase Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Pemerintah



c. Pangan

Ketahanan pangan secara umum sangat terkait dengan ketersediaan pangan, yaitu kemampuan memiliki sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar. Secara umum, berdasarkan tabel di bawah ini, ketersediaan pangan utama di Kabupaten Tanah Datar telah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini tampak dari persentase ketersediaan pangan utama yang lebih dari 100%, artinya terdapat surplus ketersediaan pangan utama.

Tabel 2.37
Indikator Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pangan

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Regulasi ketahanan pangan	1	1	1	1	1
2.	Ketersediaan pangan utama (%)	234,70	244,35	230,33	237,02	280,77

d. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup sebagai tempat kelangsungan makhluk hidup yang di dalamnya terdapat air, tanah dan udara yang harus selalu dijaga kondisinya agar selalu bersih dan layak, serta berada pada ambang batas minimal pencemaran sehingga tidak berpengaruh buruk pada kesehatan masyarakat. Secara umum, kondisi pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tanah Datar tergambar dalam tabel dan grafik sebagai berikut :

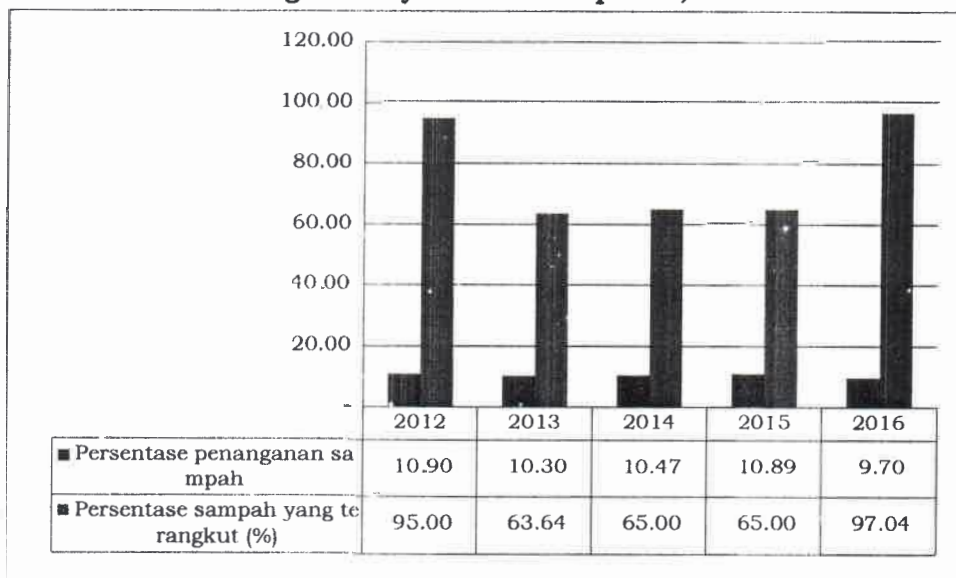
Tabel 2.38
Indikator Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Lingkungan Hidup

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Persentase penanganan sampah	10,9	10,3	10,47	10,89	9,70
2.	Cakupan pelayanan persampahan (orang)	34.958	95.878	95.878	95.878	42.49
3.	Persentase sampah yang terangkut (%)	95,00	63,64	65,00	65,00	9,704
4.	Persentase Penduduk berakses air minum (air bersih)	64,00	64,30	68,87	76,84	70,90
5.	Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air	40	40	40	40	2,5
6.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal/UKL-UPL	20,00	15,79	15,79	23,26	20,00
7.	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	0,045	0,050	0,063	0,051	0,01
8.	Penegakan hukum lingkungan	100	100	100	88,89	87,5

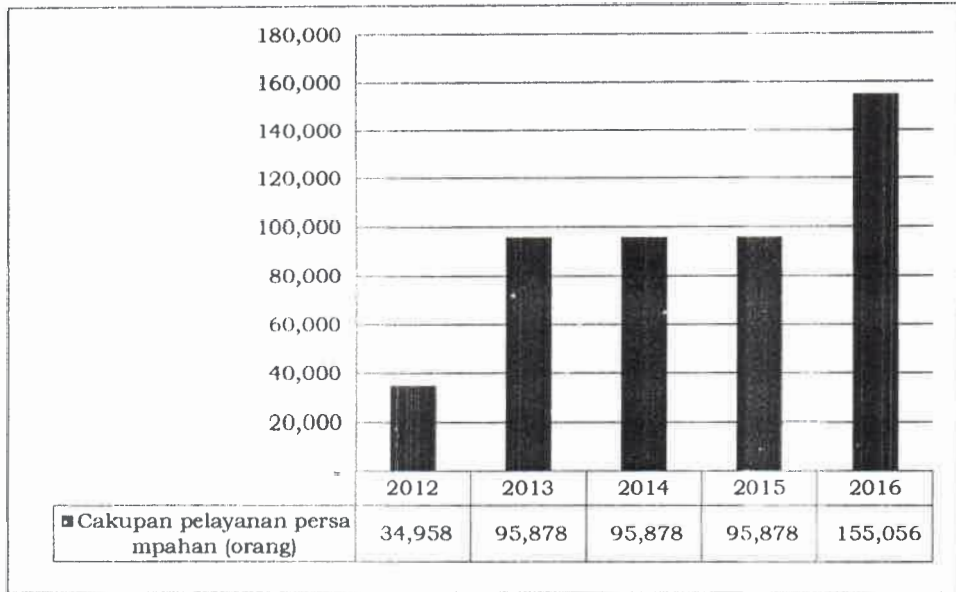
a) Persentase Penanganan Sampah

Secara umum pelayanan Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tanah Datar tahun 2012-2016 sudah mengalami peningkatan terutama di bidang persampahan. Hal ini terlihat dengan meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana persampahan. Di samping bidang persampahan, pengelolaan kualitas lingkungan juga menjadi prioritas, ini terlihat dari penerbitan rekomendasi izin pengelolaan lingkungan yang dikeluarkan oleh Kantor Lingkungan Hidup. Perkembangan pelayanan umum bidang lingkungan hidup selama periode 2011-2016 dapat dilihat pada Grafik berikut:

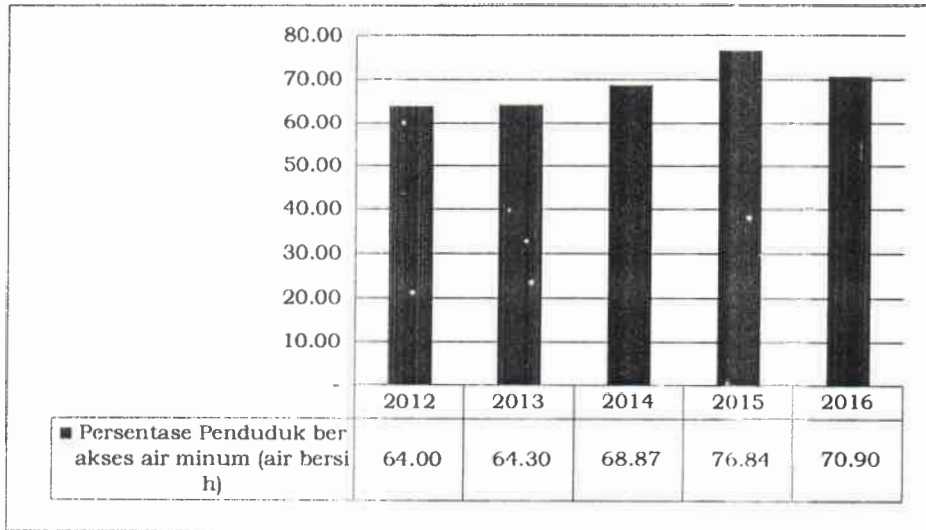
Grafik 2.24
Perkembangan Pelayanan Persampahan, 2012-2016



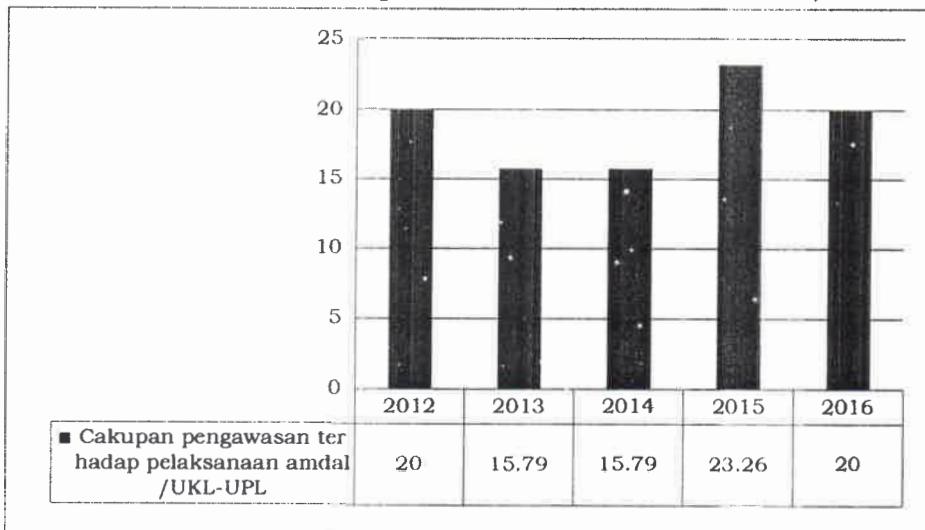
Grafik 2.25
Cakupan Pelayanan Persampahan, 2012-2016



Grafik 2.26
Persentase Penduduk Berakses Air Minum (Air Bersih), 2012-2016



Grafik 2.27
Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Amdal/UKL-UPL, 2012-2016



Sumber: Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar (2016)

b) Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk

Penurunan jumlah TPS pada tahun 2016 yang hanya berjumlah 40 unit berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup yang mengatakan bahwa yang termasuk tempat pembuangan sampah adalah TPS permanen dan kontainer, sedangkan tempat sampah di fasilitas umum tidak termasuk kategori TPS.

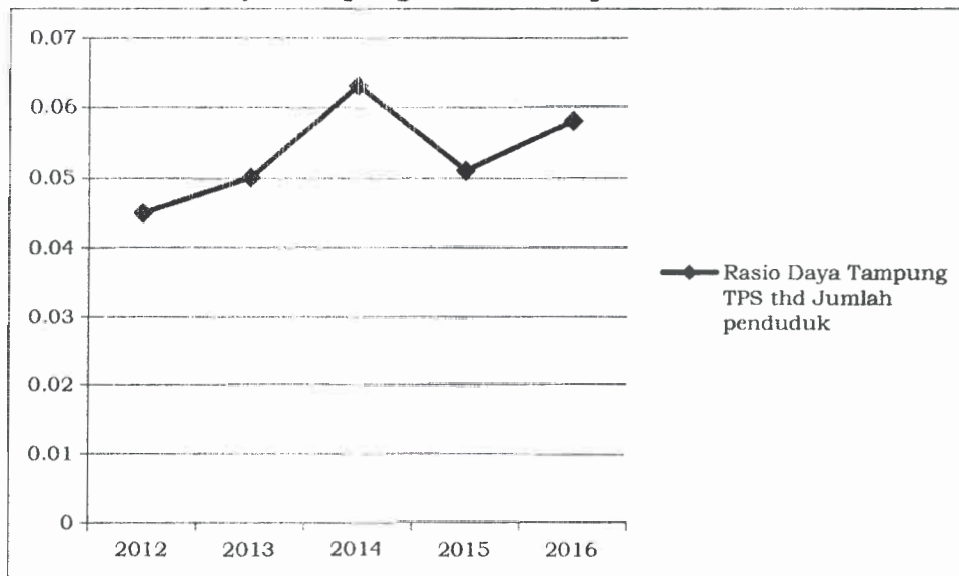
Tabel 2.39
Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk, 2012 - 2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah TPS	207	216	279	177	55*
2	Jumlah Daya Tampung TPS	153	171,3	216,05	185	211,40
3	Rasio Daya Tampung TPS thd Jumlah penduduk	0,045	0,050	0,063	0,051	0,060

Sumber : Kantor Lingkungan Hidup Kab. Tanah Datar

* Berdasarkan dokumen PTMP (+) pengadaan tahun 2016

Grafik 2.28
Rasio Daya Tampung TPS terhadap Jumlah Penduduk



Grafik di atas memperlihatkan bahwa rasio daya tampung TPS terhadap jumlah penduduk pada tahun 2015 mengalami penurunan namun pada tahun 2016 kembali mengalami peningkatan.

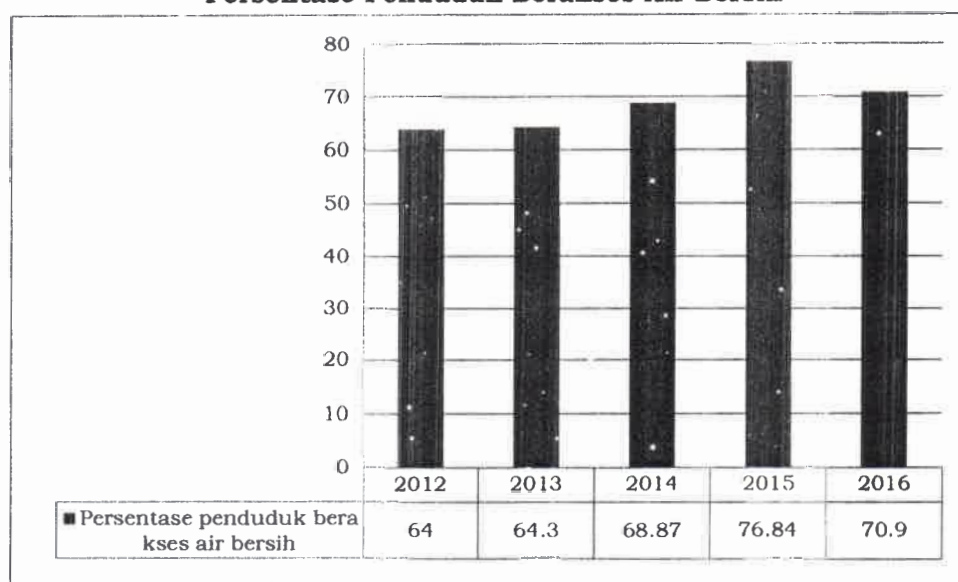
c) Persentase Penduduk Berakses Air Bersih

Persentase penduduk berakses air bersih di Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2012-2016 cenderung meningkat dari 64,00% menjadi 70,90%.

Tabel 2.40
Persentase Penduduk Berakses Air Bersih, 2012-2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air bersih	218.823	220.461	236.826	278.744	258.813
2.	Jumlah penduduk	341.911	342.864	343.875	362.759	365.040
3.	Persentase penduduk berakses air bersih	64,00	64,30	68,87	76,84	70,90

Grafik 2.29
Persentase Penduduk Berakses Air Bersih



Selama tahun 2012-2016 telah dilaksanakan pembangunan prasarana air bersih pada 61 lokasi di Kabupaten Tanah Datar melalui program pamsimas dan 23 lokasi program air bersih perdesaan.

e. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 2.41
Indikator Layanan Wajib Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2012- 2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk (%)	70,84	81,73	87,61	89,94	91,10
2.	Rasio bayi berakte kelahiran	n/a	n/a	n/a	70,54	
	Penduduk Usia 0 – 18 Tahun ber-akte kelahiran (%)	26,57	26,45	21,55	23,00	68,00
3.	Rasio pasangan berakte nikah (%)	9,91	9,93	10,97	23,44	28,00
4.	Kepemilikan KTP (orang)	201.213	230.552	244.371	242.185	267.328

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
5.	Kepemilikan akta kelahiran per satuan penduduk (%)	28,18	27,74	32,85	79,94	30,00
6.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada	ada	Ada	ada	ada
7.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	sudah	Sudah	sudah	Sudah

a) Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk akan selalu dikaitkan dengan tingkat kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk atau migrasi. Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan atau penurunan jumlah penduduk suatu daerah dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk yang minus berarti jumlah penduduk yang ada pada suatu daerah mengalami penurunan yang bisa disebabkan oleh banyak hal. Pertumbuhan penduduk meningkat jika jumlah kelahiran dan perpindahan penduduk dari luar ke dalam lebih besar dari jumlah kematian dan perpindahan penduduk dari dalam keluar.

Tabel 2.42
Rasio Perpindahan Penduduk Imigrasi Dan Emigrasi, 2012 - 2016

No	Indikator	Tahun				
		2012 ^{*)}	2013 ^{*)}	2014 ^{*)}	2015 ^{**)}	2016
1	Jumlah Penduduk	341.911	342.864	343.875	362.759	267.328
2	Penduduk Masuk					
	- Migrasi	324	829	879	5.092	1.822
	- Rasio	0,00095	0,00242	0,00256	0,000396	0,00682
3	Penduduk Keluar					
	- Migrasi	785	1.251	1.465	6.361	1.225
	- Rasio	0,00230	0,00365	0,00426	0,0175	0,00458

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tanah Datar (2016)

*) BPS Kabupaten Tanah Datar

***) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, data diolah

Tabel 2.43
Jumlah Penerbitan Akta Lahir, Akta Mati, KTP-E dan KK, 2012 - 2016

No	Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Akta Lahir	16.867	9.561	17.065	12.956	108.968
2.	Akta Mati	8	14	160	3.023	2.289
3.	KTP-el	4.286	7.846	3.804	242.185	364.925
4.	Kartu Keluarga (KK)	6.397	5.438	4.029	75.983	75.620

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tanah Datar

Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa kesadaran masyarakat khusus untuk memiliki dokumen kependudukan sudah semakin baik.

b) Pengelompokan Penduduk

1. Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur

Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) adalah banyaknya penduduk laki-laki per seratus penduduk perempuan sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

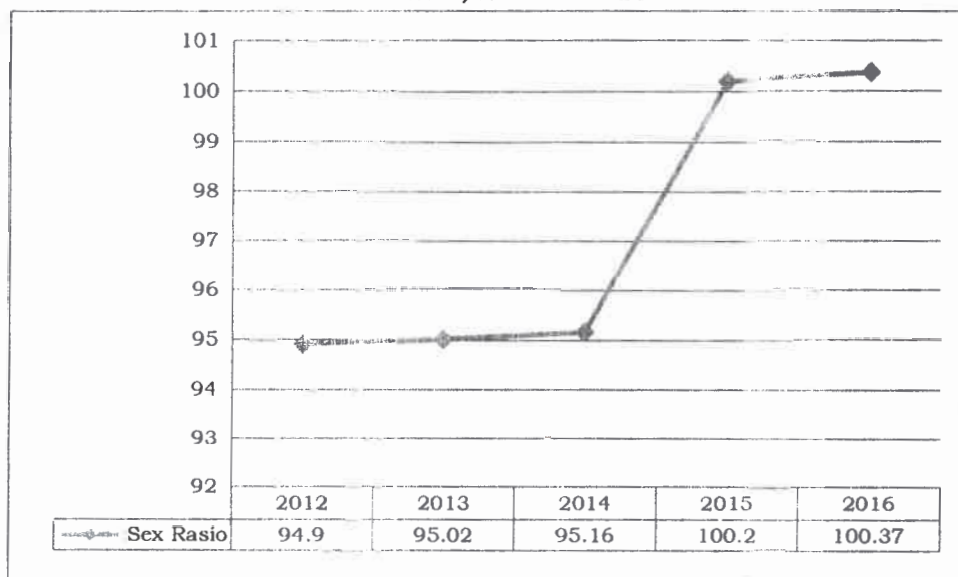
Tabel 2.44
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, 2012 - 2016

No	Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015 ¹⁾	2016 ¹⁾
1.	Jumlah Penduduk	341.911	342.864	343.875	362.579	364.925
2.	Laki - laki	166.481	167.051	167.677	181.557	182.796
3.	Perempuan	175.430	175.813	176.198	181.202	182.129
	Rasio	94,90	95,02	95,16	100,20	100,37

Sumber : Tanah Datar Dalam Angka (2016)

¹⁾ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Grafik 2.30
Sex ratio, 2012 - 2016



Grafik di atas menggambarkan bahwa pada tahun 2016, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, *sex ratio* tercatat sebesar 100,37. Hal ini menandakan bahwa penduduk laki-laki jumlahnya lebih banyak dari penduduk perempuan.

2. Pengelompokan Penduduk Berdasar persebaran penduduk/geografis

Tabel 2.45
Jumlah Penduduk Menurut Sebaran Penduduk/Geografis, 2012 - 2016

No	Kecamatan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015 ¹⁾	2016 ¹⁾
1.	X Koto	42,772	42,989	43,116	42,116	42.222
2.	Batipuh	30,037	30,050	30,138	32,644	32.218
3.	Batipuh Selatan	10,521	10,542	10,573	10,846	11.324
4.	Pariangan	19,601	19,603	19,661	20,602	20.730
5.	Rambatan	33,445	33,458	33,557	38,300	37.794
6.	Lima Kaum	36,219	36,352	36,459	37,683	37.498

No	Kecamatan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015 ¹⁾	2016 ¹⁾
7.	Tanjung Emas	21,956	22,040	22,105	23,573	23.880
8.	Padang Ganting	13,744	13,767	13,807	14,661	14.675
9.	Lintau Buo	17,948	18,091	18,145	19,065	19.057
10.	Lintau Buo Utara	35,277	35,420	35,525	36,346	37.526
11.	Sungayang	17,050	17,087	17,137	18,510	18.814
12.	Sungai Tarab	29,536	29,600	29,687	31,710	31.788
13.	Salimpaung	20,946	20,990	21,052	22,987	23.231
14.	Tanjung Baru	12,864	12,875	12,913	13,716	14.168
	Total	341,911	342,864	343,875	362,759	364.925

Sumber : Tanah Datar Dalam Angka

¹⁾ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dari tabel tersebut di atas tergambar bahwa persebaran penduduk Kabupaten Tanah Datar belum merata ke seluruh wilayah. Pada umumnya konsentrasi penduduk terbesar masih di wilayah perkotaan atau wilayah yang dekat dengan perkotaan, seperti X Koto, Lima Kaum, Sungai Tarab, Rambatan, Batipuh, dan Lintau Buo Utara.

f. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat desa diupayakan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya yang dilaksanakan meliputi pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat, pembinaan PKK, LSM, dan Posyandu. Selama kurun waktu 5 tahun, jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) mengalami peningkatan. Hal ini dapat diartikan bahwa keaktifan masyarakat untuk ikut serta dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah terus menunjukkan peningkatan. Kondisi pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dilihat dari tabel berikut:

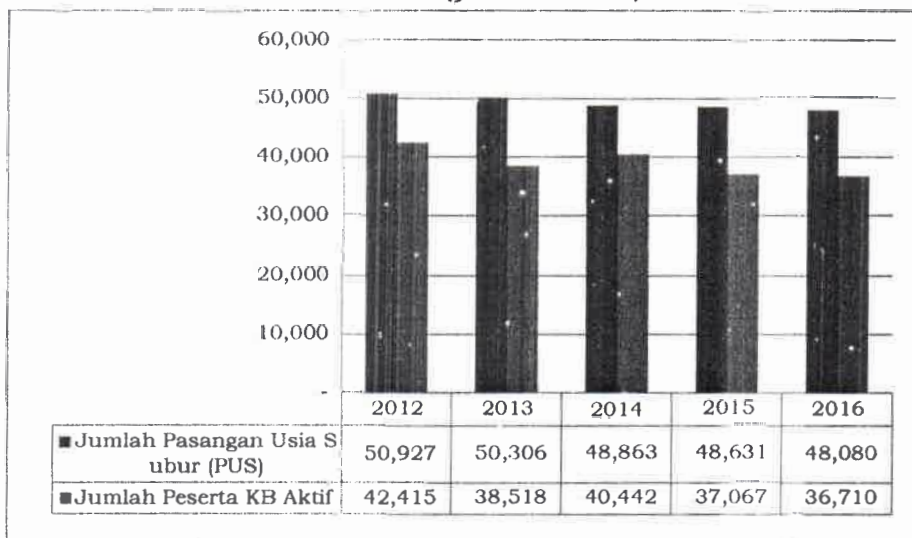
Tabel 2.46
Indikator Layanan Urusan Pemerintahan Wajib
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	8	9	9	15	15
2.	Rata-rata Jumlah kelompok binaan PKK	0,93	0,98	1,09	1,09	1,09
3.	Jumlah LSM (pemberdayaan masyarakat dan perempuan)	1	1	1	1	1
4.	LPM Berprestasi	1	1	1	3	3
5.	PKK aktif	90	90	90	90	90
6.	Posyandu aktif	596	596	599	599	599

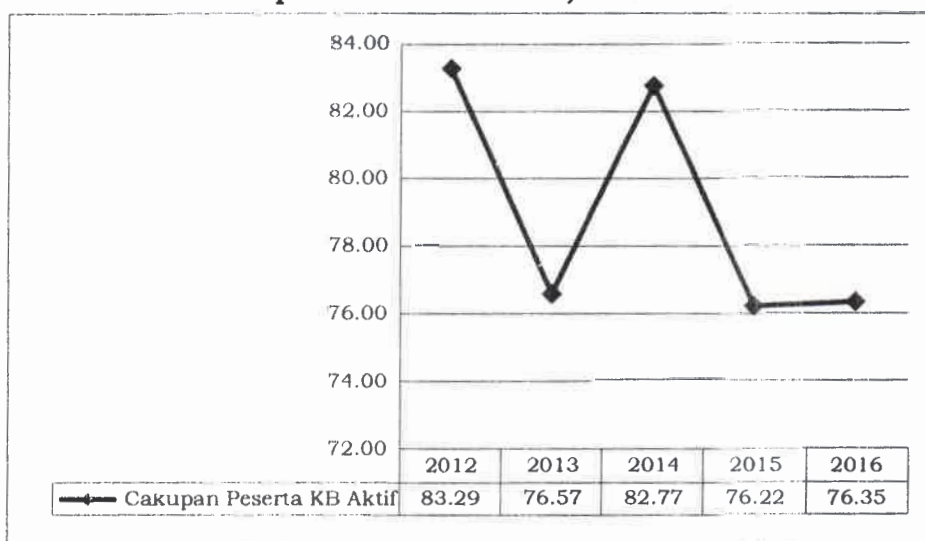
g. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera

Salah satu indikator keberhasilan keluarga berencana adalah penurunan rata-rata jumlah anak per keluarga. Rata-rata jumlah anak per keluarga adalah jumlah anak dibagi dengan jumlah keluarga. Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Grafik 2.31
Peserta Keluarga Berencana, 2012-2016

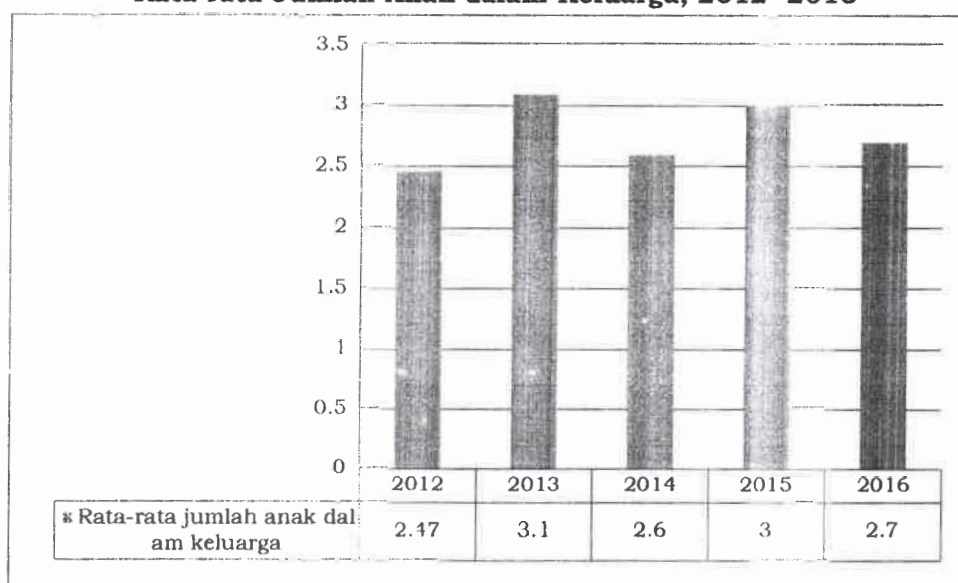


Grafik 2.32
Cakupan Peserta KB Aktif, 2012-2016



Sumber : Dinas PMD, Dalduk dan KB Tahun 2016

Grafik 2.33
Rata-rata Jumlah Anak dalam Keluarga, 2012- 2016



Sumber : Dinas PMD, Dalduk dan KB Tahun 2016

h. Perhubungan

Pelayanan Urusan Perhubungan belum optimal karena sistem transportasi barang dan orang belum terkoneksi dengan pasar sebagai pusat aktivitas ekonomi. Berdasarkan data sarana dan prasarana penunjang bidang perhubungan seperti rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, *traffic light* dan *warning light* tahun 2012-2016, pada tahun 2015 jumlah rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, demikian juga dengan jumlah kendaraan wajib uji mengalami peningkatan.

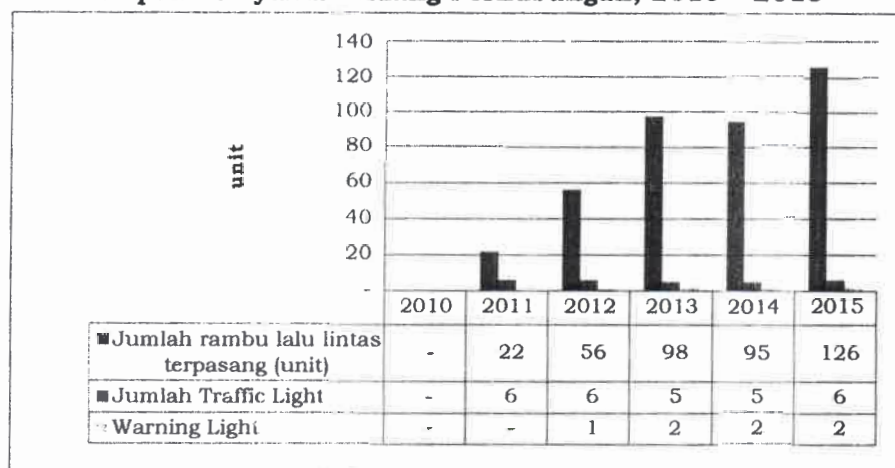
Tabel 2.47
Indikator Pembangunan Bidang Perhubungan

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum (orang)	341.911	342.864	343.875	342.762	332.635
2.	Angkutan darat	-	6.376	6.700	6.079	6.069
3.	Kepemilikan KIR angkutan umum (unit)	5.344	6.115	6.485	6.495	6.765
4.	Lama pengujian kelayakan angkutan umum/KIR (hari)	30	30	30	30	30
5.	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (rupiah):					
	- Bus	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	- Mobil Penumpang	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
6.	Pemasangan Rambu-rambu (unit)	56	98	95	79	86

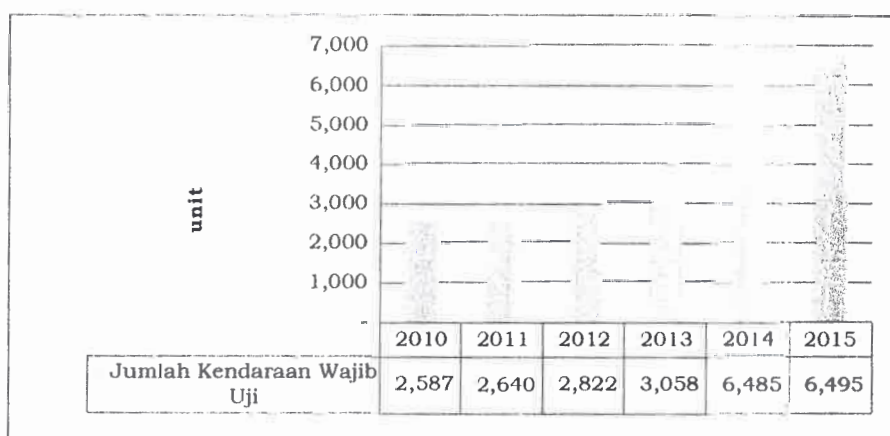
Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar, 2016

Perkembangan pelayanan umum bidang perhubungan selama periode 2010 – 2015 dapat dilihat pada grafik berikut :

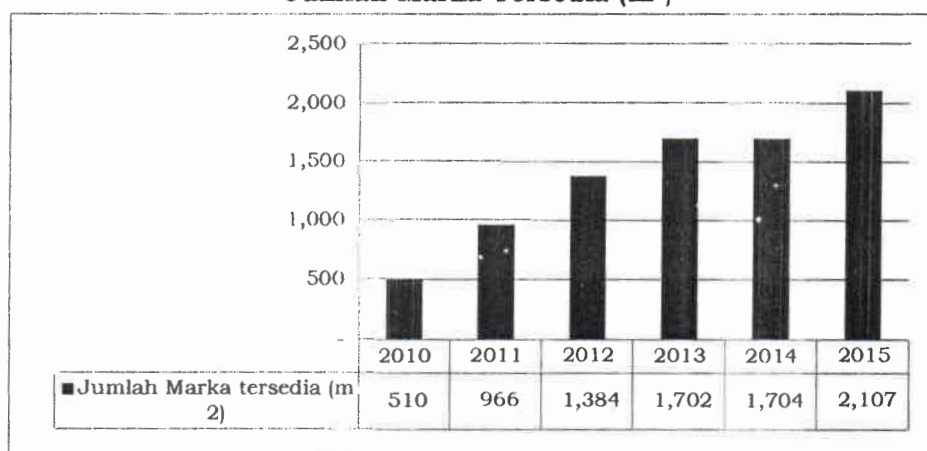
Grafik 2.34
Aspek Pelayanan Bidang Perhubungan, 2010 - 2015



Grafik 2.35
Jumlah Kendaraan Wajib Uji



Grafik 2.36
Jumlah Marka Tersedia (m²)



Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Tanah Datar (2015)

a) Rasio Izin Trayek

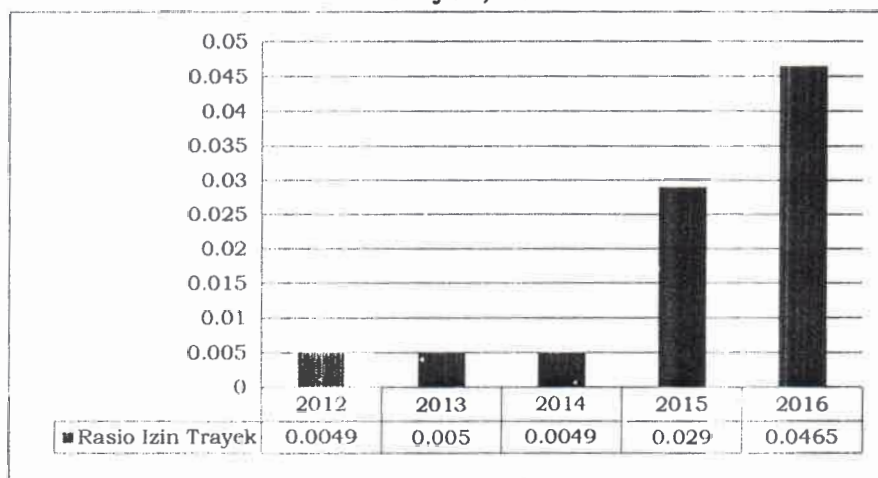
Izin trayek merupakan izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek sebagaimana tergambar dalam tabel di bawah ini. Izin trayek diberikan dalam bentuk rekomendasi yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar.

Tabel 2.48
Rasio Izin Trayek, 2012 - 2016

No	Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Izin Trayek Perkotaan	1	1	1	17	17
2.	Izin Trayek Perdesaan	16	16	16	104	80
3.	Jumlah Izin Trayek	17	17	17	121	97
4.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	341.911	342.864	343.875	362.759	332.635
	Rasio Izin Trayek	0,0049	0,005	0,0049	0,029	0,0465

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Tanah Datar

Grafik 2.37
Rasio Izin Trayek, 2012 - 2016

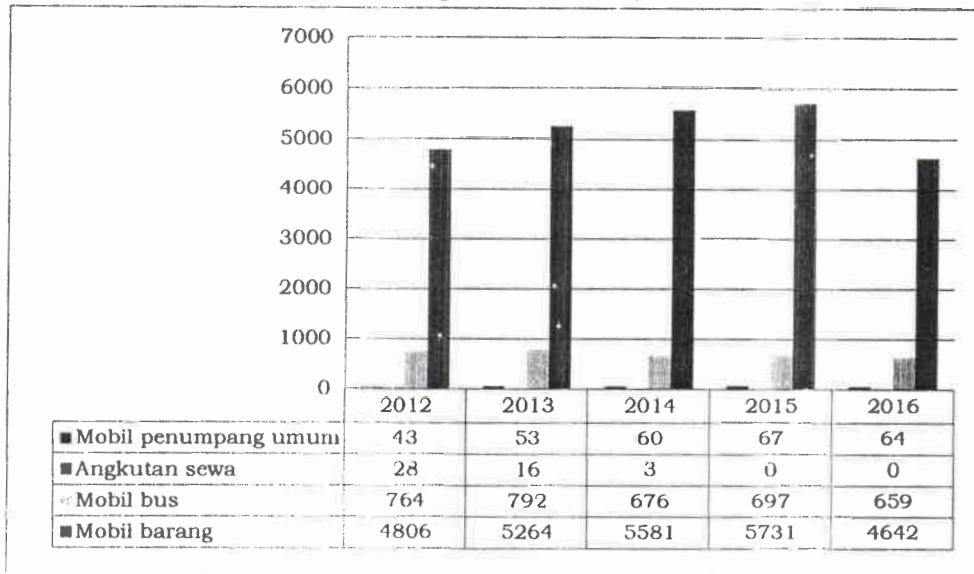


b) Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Uji KIR angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang akan dioperasikan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian dimaksud meliputi :

- a. Uji tipe, yaitu pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi tipenya.
- b. Uji berkala, yaitu diwajibkan untuk mobil penumpang umum, penumpang bus, mobil barang yang meliputi pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji

Grafik 2.38
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum, 2012 - 2016



Sumber : Tanah Datar Dalam Angka

Perhubungan merupakan urat nadi perekonomian suatu daerah, jika dilihat dari tabel diatas terdapat peningkatan jumlah uji KIR kendaraan umum baik angkutan orang maupun angkutan barang. Hal ini membuktikan adanya peningkatan jumlah kendaraan dan kesadaran masyarakat untuk melakukan pengujian laik jalan kendaraan bermotor yang dimilikinya.

c) Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Terminal bus dapat diartikan sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan jalan untuk menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.

Tabel 2.49
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus, 2012 - 2016

No	Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah pelabuhan laut	-	-	-	-	-
2.	Jumlah pelabuhan udara	-	-	-	-	-
3.	Jumlah terminal bus	1	1	1	3	3
	Jumlah	1	1	1	3	3

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Tanah Datar

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa di Kabupaten Tanah Datar terdapat 3 (tiga) terminal bis yang melayani Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP).

i. Komunikasi dan Informatika

Perkembangan dunia teknologi informasi yang sangat cepat telah mendorong kemudahan akses informasi dan komunikasi, bahkan hingga ke daerah yang dulunya tidak terjangkau sekalipun. Hal ini tampak dari perkembangan jumlah jaringan komunikasi

(tower penyedia jasa komunikasi seluler) yang terus meningkat setiap tahun. Rasio wartel/warnet, meskipun cenderung turun angkanya, tetap menunjukkan bahwa masyarakat masih membutuhkan keberadaan wartel/warnet untuk berkomunikasi. Keberadaan wartel, secara khusus, memang telah tergerus oleh kemudahan komunikasi yang ditawarkan oleh perangkat seluler. Sementara warnet, masih punya segmen pasar tersendiri, khususnya masyarakat yang memerlukan akses internet dengan biaya terjangkau. Perkembangan pembangunan komunikasi dan informatika dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.50
Indikator Layanan Urusan Pemerintahan Wajib
Bidang Komunikasi dan Informatika

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah jaringan komunikasi (tower)	84	88	98	106	108
2.	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	0,04	0,04	0,03	0,02	0,03
3.	Jumlah surat kabar nasional/lokal	22	18	18	18	18
4.	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	4	4	5	7	7
5.	Web site milik pemerintah daerah	ada	ada	ada	ada	ada
6.	Pameran/Expo	-	-	-	1	0

j. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi dan UMKM mempunyai peranan penting dalam menunjang perekonomian masyarakat, dalam bentuk penyerapan tenaga kerja serta membuka lapangan usaha baru. Upaya peningkatan UMKM dilakukan melalui pembinaan SDM pengelola dan penambahan modal usaha, serta mempromosikan produk-produk UMKM. Perkembangan koperasi dan UMKM selama tahun 2012 – 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.51
Indikator Layanan Wajib Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Persentase koperasi aktif	89,59	89,68	89,77	89,95	89,91
2.	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	1.533	1.603	1.722	1.846	2.351
3.	Jumlah BPR/LKM	21	21	21	21	21
4.	Usaha Mikro dan Kecil	3.642	3.484	3.583	3.596	2.351
5.	Perusahaan kecil	307	355	313	265	268
6.	Perusahaan mikro	106	144	79	78	70

a) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM)

a. Persentase Koperasi Aktif

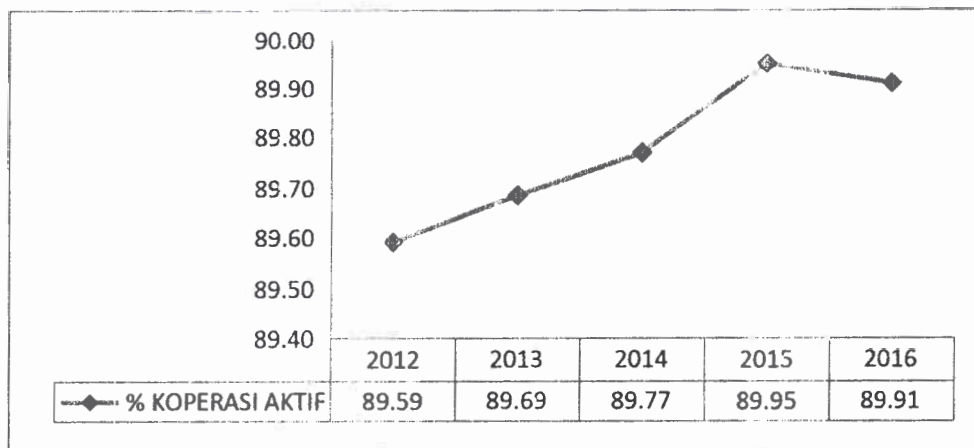
Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang yang kegiatannya berdasarkan prinsip kekeluargaan. Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Dari tabel di bawah dapat digambarkan persentase koperasi aktif di Kabupaten Tanah Datar tahun 2012-2016.

Tabel 2.52
Persentase Koperasi Aktif, 2012 - 2016

No	Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah koperasi aktif	198	200	202	206	205
2.	Jumlah koperasi	221	223	225	229	228
3.	Persentase koperasi aktif	89,59	89,68	89,77	89,95	89,91

Sumber : Dinas Koperasi UKM Perindag Kabupaten Tanah Datar

Grafik 2.39
Persentase Koperasi Aktif, 2012 - 2016

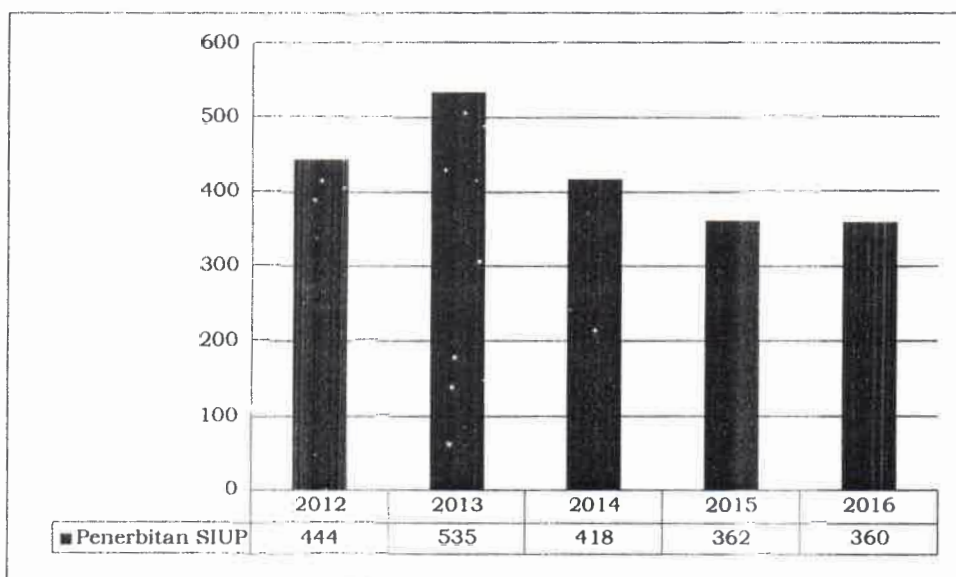
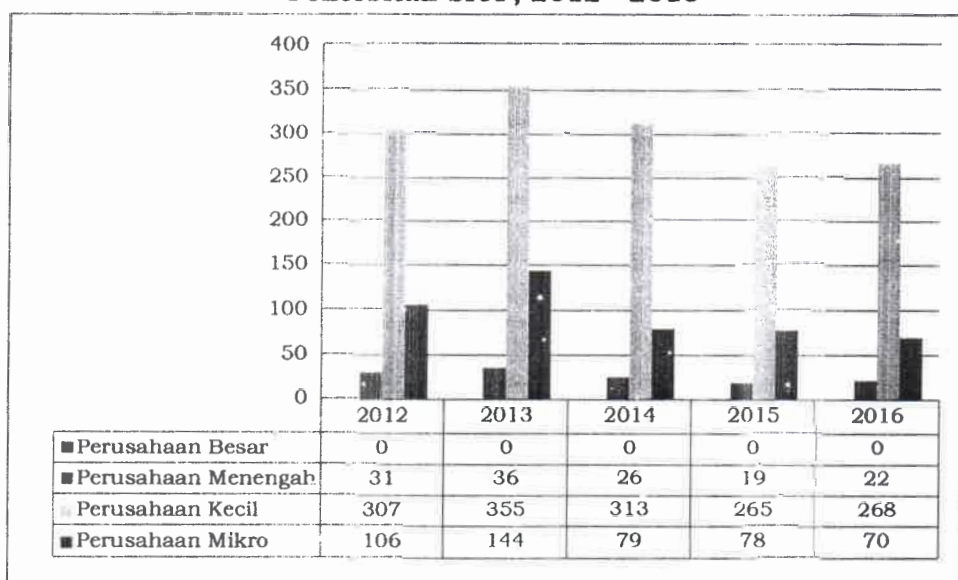


Perkembangan jumlah koperasi di Kabupaten Tanah Datar mengalami fluktuasi. Dibandingkan dengan tahun 2015, jumlah koperasi aktif pada tahun 2016 mengalami penurunan dari 206 unit menjadi 205 unit koperasi yang aktif pada tahun 2016.

b. Jumlah UKM non BPR/LKMUKM

Upaya peningkatan UMKM dilakukan melalui pembinaan SDM pengelola UMKM dan penambahan modal usaha. Perkembangan UMKM selama tahun 2010 - 2016 dapat dilihat melalui grafik berikut :

Grafik 2.40
Penerbitan SIUP, 2012 - 2016

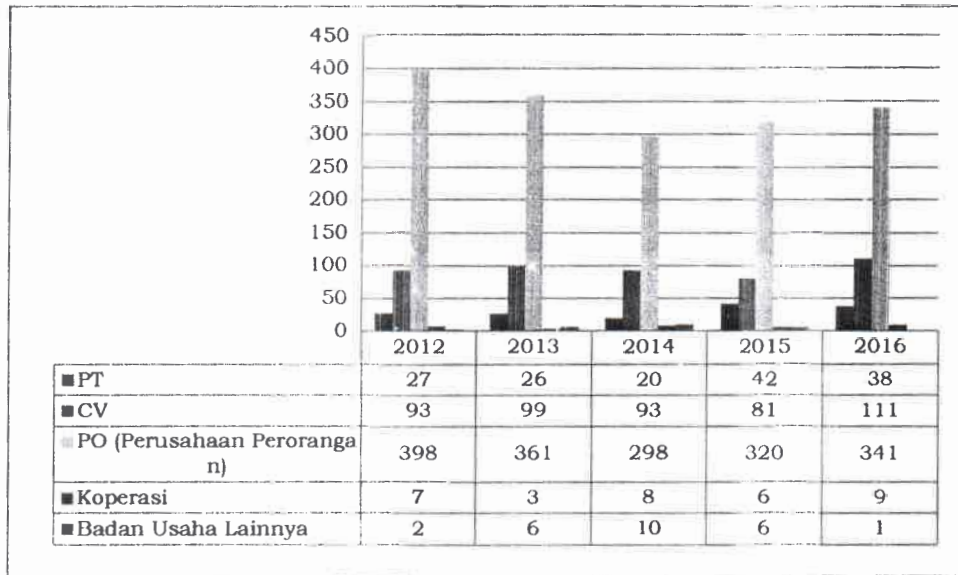


Sumber: Dinas Penanaman Modal PTSP dan Naker (2016)

Berdasarkan grafik di atas terlihat adanya penurunan penerbitan SIUP baru pada tahun 2016 dibanding tahun 2015 yaitu dari 362 menjadi 360, hal ini terjadi akibat adanya penurunan penerbitan SIUP untuk perusahaan mikro, sedangkan penerbitan SIUP untuk perusahaan menengah dan kecil tetap mengalami peningkatan. Penerbitan SIUP sekali lima tahun mempengaruhi terhadap pengurusan SIUP baru dan adanya perusahaan yang tidak melanjutkan usahanya lagi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan menurunnya penerbitan SIUP.

Data pada Grafik 2.44 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pendaftaran perusahaan pada tahun 2016 dibandingkan tahun 2015 yaitu dari 455 perusahaan menjadi 500 perusahaan kenaikan terbesar terdapat pada pendaftaran CV yaitu dari 81 CV menjadi 111 CV atau bertambah 30 CV.

Grafik 2.41
Pendaftaran Perusahaan, 2012 - 2016



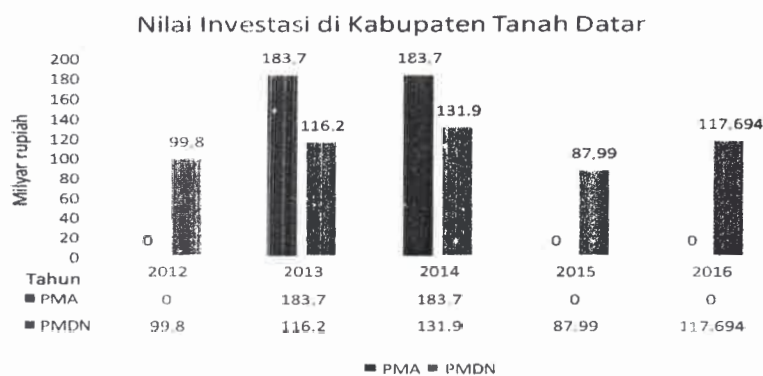
Sumber: Dinas Penanaman Modal PTSP dan Naker Kab. Tanah Datar (2016)

k. Penanaman Modal

a) Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Penanaman modal asing (PMA) merupakan penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang - undangan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut. Grafik berikut ini menyajikan jumlah investasi PMDN dan PMA.

Grafik 2.42
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA), 2012 - 2016

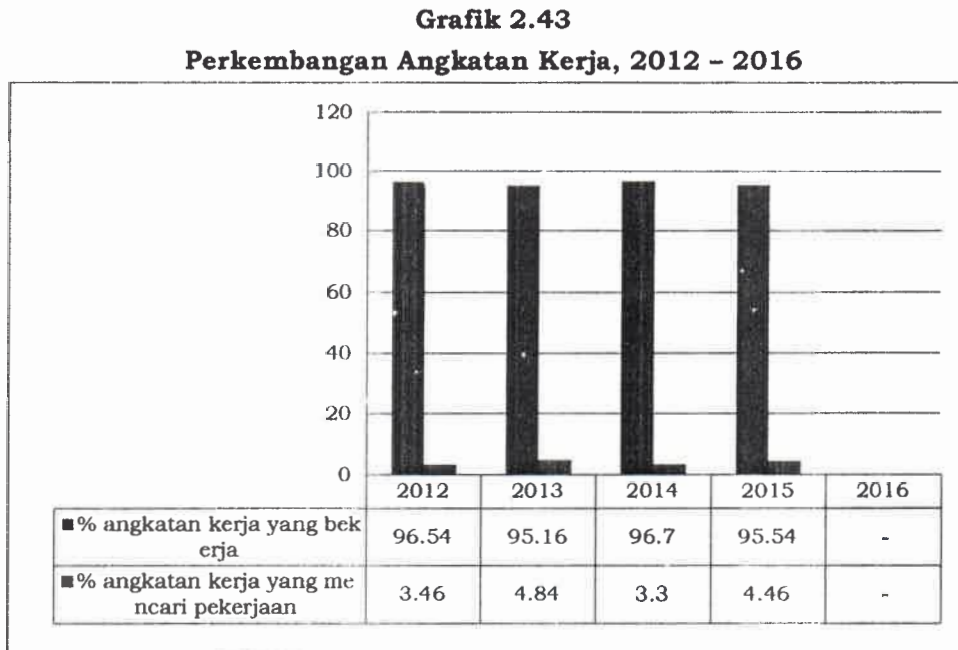


Sumber: Dinas Penanaman Modal PTSP dan Naker Kab. Tanah Datar

Berdasarkan bgrasfik di atas, nilai investasi PMDN pada Tahun 2016 terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2015. Sedangkan PMA belum terealisasi sejak tahun 2014. Hal ini menjadi tantangan bagi SOPD yang menangani Urusan Penanaman Modal agar lebih meningkatkan upaya promosi potensi investasi yang dimiliki oleh Kabupaten Tanah Datar.

b) Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Kondisi angkatan kerja di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2012-2016 dapat dilihat dari angkatan kerja yang bekerja dan yang mencari pekerjaan sebagaimana yang tergambar pada grafik berikut :



Sumber: Tanah Datar Dalam Angka (2016)

Dilihat dari grafik di atas persentase angkatan kerja yang mencari pekerjaan cenderung meningkat dari tahun 2012 sebesar 3,46% menjadi 4,46%. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan jumlah lapangan kerja tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja yang mencari pekerjaan.

1. Pemuda dan Olah Raga

Pemuda merupakan aset pembangunan yang harus mendapat perhatian dari pemerintah. Salah satu bentuk perhatian yang telah diberikan oleh pemerintah selama ini adalah fasilitasi kegiatan kepemudaan dan olahraga. Tabel berikut menggambarkan kondisi pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga:

Tabel 2.53
Indikator Layanan Urusan Pemerintahan Wajib
Bidang Kepemudaan dan Olahraga

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah organisasi pemuda	11	5	7	6	625
2.	Jumlah organisasi olahraga	28	28	30	30	30
3.	Jumlah kegiatan kepemudaan	11	5	7	6	-
4.	Jumlah kegiatan olahraga	8	13	5	9	9
5.	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	11	11	11	11	11
6.	Sarana olahraga ^{*)} :	553	551	552	562	552

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
-	Sepak Bola	100	100	100	101	101
-	Bola Volley	200	200	200	209	209
-	Bulutangkis	88	88	88	88	88
-	Sepak Takraw	117	117	117	117	117
-	Tenis Lapangan	6	5	5	5	5
-	Bola basket	37	37	37	37	37
-	Panjat Tebing	2	1	2	2	-
-	Kolam Renang	3	3	3	3	3
-	Lapangan futsal	n/a	n/a	n/a	4	4

Berdasarkan data di atas, perkembangan jumlah organisasi pemuda tidak begitu signifikan, bahkan dalam periode 3 tahun terakhir cenderung menurun jumlahnya. Jumlah organisasi olahraga sesuai dengan jumlah cabang olahraga yang ada di Kabupaten Tanah Datar, yaitu 30 cabang olahraga. Sarana olahraga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir juga tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan, jumlahnya cenderung tidak berubah, kecuali bola volley dan sepak bola.

m. Kebudayaan

Sebagai daerah yang dikenal sebagai asal usul orang minang, Kabupaten Tanah Datar mempunyai potensi yang sangat besar di bidang budaya. Sampai dengan tahun 2015, upaya pemerintah untuk melestarikan budaya loka ditandai dengan banyaknya festival seni budaya yang diselenggarakan, baik skala kecil maupun skala yang cukup besar, baik yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat maupun pemerintah. Salah satu contohnya adalah penyelenggaraan Festival Pacu Jawi yang telah menjadi agenda rutin daerah dan dilaksanakan beberapa kali dalam satu tahun. Kinerja pemerintah dalam pelestarian seni dan budaya lokal tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 2.54
Indikator Fokus Layanan Urusan Wajib Bidang Kebudayaan

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	28	45	26	65	
2.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	4	4	4	4	
3.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	64	67	67	67	

n. Perpustakaan

Perpustakaan mempunyai posisi yang strategis dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia karena keberadaannya disamping sebagai sumber informasi dan pengetahuan, juga menjadi salah satu alat untuk mengukur minat baca masyarakat. Guna menunjang hal tersebut, pemerintah setiap tahun selalu berupa untuk meningkatkan kualitas perpustakaan, baik melalui penambahan koleksi wisata, maupun peningkatan pelayanan lainnya, seperti layanan perpustakaan keliling. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan jumlah pengunjung ke perpustakaan. tabel berikut menggambarkan perkembangan pengelolaan perpustakaan daerah :

Tabel 2.55
Indikator Layanan Wajib Bidang Perpustakaan

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah perpustakaan daerah (unit)	1	1	1	1	1
2.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (orang)	5.473	5.338	6.953	7.706	22.885
3.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (judul buku)	11.564	11.877	12.226	12.420	12.733

o. Kearsipan

Penyelenggaraan urusan kearsipan diarahkan terutama untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan kearsipan, di antaranya melalui bimbingan teknis dan pembinaan pengelolaan arsip secara baku. Sampai dengan tahun 2016, sudah 38 SKPD yang diberikankan bimbingan teknis dan pembinaan pengelolaan arsip secara baku. Namun hal ini belum menggambarkan secara lebih akurat apakah sistem pengelolaan arsip secara baku sudah benar-benar dilaksanakan oleh SKPD.

Dalam rangka peningkatan SDM pengelola kearsipan telah diupayakan peningkatan kapasitas, meskipun selama kurun waktu 5 tahun terakhir baru dilaksanakan satu kali. Hasil-hasil pembangunan urusan kearsipan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.56
Indikator Layanan Wajib Bidang Kearsipan

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Pengelolaan arsip secara baku	15	14	14	37	38
2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	0	0	1	0	0

2.1.3.3. Layanan Urusan Pilihan

a. Pariwisata

Perkembangan pariwisata masih sangat tergantung pada keberadaan Istano Basa Pagaruyung, yang sampai saat ini masih belum tergantikan posisinya sebagai ikon pariwisata di Kabupaten Tanah Datar, bahkan di Provinsi Sumatera Barat. Namun demikian, bukan berarti pengembangan pariwisata hanya difokuskan pada Istano Basa Pagaruyung. Event-event budaya dan tradisi lokal yang telah rutin dilaksanakan juga turut membantu meningkatkan kunjungan wisata di Kabupaten Tanah Datar. Salah satunya adalah event reguler Pacu Jawi yang banyak menarik minat wisatawan asing untuk berkunjung. Tabel berikut menggambarkan perkembangan jumlah wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Tanah Datar.

Tabel 2.57
Indikator Layanan Urusan Pilihan Bidang Pariwisata

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Kunjungan wisata	249.671	275.935	926.300	984.929	1.189.173
	- Jumlah wisatawan asing	22.215	29.503	101.245	115.444	142.424
	- Jumlah wisatawan domestik	227.456	246.432	825.055	869.485	1.046.749
2.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Berdasarkan Tabel 2.65, jika dilihat dari tahun 2012 kunjungan wisatawan mengalami peningkatan, baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Hal ini tidak lepas dari promosi dan Event Pariwisata yang dilakukan seperti : Tour De Singkarak, Pameran foto, Festival Pagaruyung, Pacu Jawi dan lain-lain.

b. Pertanian

Produktivitas padi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir secara umum menunjukkan penurunan, dari 5,74 ton/ha pada tahun 2012 menjadi 5,19 ton/ha pada tahun 2016. Hal ini disebabkan karena musim kemarau dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). Beberapa upaya Pemerintah Daerah telah dilakukan untuk meningkatkan produksi padi antara lain : intensifikasi, penerapan teknologi Padi Salibu dan pengendalian OPT. Perkembangan indikator pertanian dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.58
Indikator Layanan Pilihan Bidang Pertanian

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Produktivitas padi (ton/ha)	5,74	5,63	5,34	5,31	5,19
2.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%)	34,20	33,24	33,84	33,88	33,88*
3.	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB (%)	3,5	3,5	3,3	3,4	3,4*
4.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras/perkebunan tahunan) terhadap PDRB (%)	9,3	9,3	9,1	9,03	9,03*
5.	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (%)	34,20	33,24	33,84	33,88	33,88*
6.	Cakupan bina kelompok petani (%)	100	100	100	100	100*

d. Energi dan Sumber Mineral

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dilihat dari ketersediaan energi untuk kebutuhan masyarakat sudah dinikmati oleh masyarakat, tetapi pemanfaatan daya listrik oleh masyarakat belum 100%. Untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat di masa yang akan datang, telah dikembangkan pembangkit listrik mikro hidro yang memanfaatkan potensi sumber daya air.

Disamping itu sektor pertambangan merupakan salah satu sektor yang berkontribusi terhadap pembentukan PDRB. Permasalahan yang dihadapi pada sektor pertambangan saat ini adalah keterbatasan dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi karena terkendala permasalahan kepemilikan lahan, skala eksploitasi yang masih rendah dan peruntukan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). serta belum bersatunya pelaku usaha ekonomi sejenis.

Adapun kontribusi sektor pertambangan dan ketersediaan energi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.59
Indikator Layanan Urusan Pilihan Bidang Energi
dan Sumber Daya Mineral

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Pertambangan tanpa ijin (ha)	6	6	6	2	6,5
2.	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (%)	2.86	2.98	3.34	4.44	4,38
3.	Rasio ketersediaan daya listrik	100	100	100	100	100
4.	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	79,96	86,78	88,63	77,21	91,48
	- Rumah Tangga menggunakan listrik	70.137	73.047	75.444	79.957	83,677
	- Jumlah Rumah Tangga	87.712	84.170	85.118	103.561	91.470

Sumber : BPS Tanah Datar (diolah)

e. Perdagangan

Tabel 2.60
Indikator Layanan Urusan Pilihan Bidang Perdagangan

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Kontribusi sektor Perdagangan (perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor) terhadap PDRB	11,93	12	11,95	11,83	11,56
2.	Ekspor Bersih Perdagangan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	971	1.030	955	434	-

Sumber : BPS Tanah Datar (diolah)

f. Perindustrian

Industri yang berkembang di Kabupaten Tanah Datar masih didominasi oleh industri kecil menengah (IKM). Kontribusi IKM terhadap pembentukan PDRB masih relatif kecil. Perkembangan industri dan kontribusinya terhadap pembentukan PDRB tergambar pada tabel berikut :

Tabel 2.61
Indikator Layanan Urusan Pilihan Bidang Perindustrian

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Kontribusi sektor Industri (industri pengolahan) terhadap PDRB	13,38	12,84	12,28	12,16	11,16
2.	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3.	Pertumbuhan Industri	n/a	n/a	7,42	7,20	25,46
4.	Cakupan bina kelompok pengrajin	n/a	12	12	12	10

Sumber : BPS Tanah Datar (diolah)

g. Kelautan dan Perikanan

Perkembangan pembangunan bidang perikanan selama kurun waktu tahun 2012–2016 telah menunjukkan hasil yang optimal. Hal ini tampak pada produksi perikanan yang menunjukkan peningkatan setiap tahun. Kondisi yang sama juga terlihat pada konsumsi ikan yang juga meningkat setiap tahun, dari 27,5 kg per kapita/tahun pada tahun 2012, meningkat menjadi 35,00 kg per kapita/tahun pada tahun 2016. Tabel berikut menggambarkan perkembangan pembangunan bidang perikanan di Kabupaten Tanah Datar:

Tabel 2.62
Indikator Layanan Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Produksi perikanan (ton)	3.056,9	3.785,2	3.903,1	4.398,9	5.524,8
2.	Konsumsi ikan (kg)	27,5	30,6	31,6	33,1	35,00
3.	Cakupan bina kelompok nelayan (%)	31	31	33	34	35
4.	Produksi perikanan kelompok nelayan (ton)	1.448,20	1.826,90	1.805,60	1.936,3	1.860,7

2.1.3.4. Penunjang Urusan

a. Perencanaan Pembangunan

Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka 20 – 25 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka 1 tahun. Ketersediaan masing-masing dokumen tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.63
Indikator Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	Ada	ada	ada
2.	Dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada	ada	Ada	ada	ada
3.	Dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada	ada	Ada	ada	ada
4.	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	ada	ada	Ada	ada	ada

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tanah Datar telah mengadopsi prinsip perencanaan partisipatif yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif. Namun demikian, konsep perencanaan pembangunan partisipatif yang berbasis budaya Minangkabau dan berwawasan lingkungan dalam pelaksanaannya masih belum optimal. Hal ini disebabkan karena belum semua lapisan masyarakat berpartisipasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan (Musrenbang).

b. Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pengelolaan keuangan daerah tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 merupakan implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021.* Keuangan daerah merupakan salah satu faktor yang sangat strategis untuk mencapai/mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, disamping faktor sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

Kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari indikator Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah dan persentase peningkatan PAD, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 2.64
Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah, 2012 - 2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	-
2.	Persentase Peningkatan PAD	4,15	18,89	56,17	12,42	22,19

c. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Selama kurun waktu tahun 2012 - 2016, jumlah PNS menunjukkan kecenderungan menurun. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan moratorium penerimaan PNS yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Penerimaan pegawai baru sangat dibatasi hanya untuk bidang tertentu, seperti kesehatan dan pendidikan.

Pada tahun 2016, jumlah PNS mencapai 6.154 orang, dengan komposisi 65,6 % adalah PNS perempuan dan sisanya 34,4 % adalah PNS laki-laki. Dari sisi tingkat pendidikan, terbanyak adalah PNS dengan pendidikan D-4/S-1, yaitu 51,5%; sementara jumlah PNS dengan pendidikan S-2 baru mencapai 2,71% dan belum ada PNS dengan pendidikan S-3. PNS dengan pendidikan SLTA atau di bawahnya mencapai 18,19 %. Tabel berikut menggambarkan jumlah PNS berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan.

Tabel 2.65
PNS berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan, 2012 - 2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah PNS	7.563	7.380	7.226	7.356	6.154
	a. Laki-laki	2.655	2.583	2.517	2.532	2.056
	b. Perempuan	4.908	4.797	4.709	4.824	4.098
2.	Tingkat pendidikan PNS					
	a. SD	79	80	75	74	64
	b. SMP	136	112	109	110	97
	c. SMA	1.260	1.140	1.071	1.154	959
	d. D-1/D-2	1.608	1.444	1.315	1.194	913
	e. D-3	859	797	771	857	757
	f. D-4/S-1	3.454	3.630	3.710	3.788	3.222
	g. S-2	167	177	175	199	142
	h. S-3	-	-	-	-	-

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik dan mampu meningkatkan daya saing daerah.

Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukkan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor.

Tabel 2.66
PDRB Kabupaten Tanah Datar Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha, 2012 – 2016

No	Sektor	Tahun (Dalam Jutaan Rupiah)				
		2012	2013	2014	2015*)	2016
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.533.181,1	2.713.538,1	3.108.811,4	3.326.388,3	3.662.697,9
2.	Pertambangan dan Penggalian	211.632,4	243.599,8	307.029,3	353.094,4	465.584,5
3.	Industri Pengolahan	990.882,2	1.048.553,8	1.128.220,5	1.180.503,9	1.185.486,2
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	1.288,8	1.332,9	1.551,1	2.196,6	1.789,3
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.340,6	8.927,1	9.563,8	10.907,8	10.233,3
6.	Konstruksi	640.021,6	751.182,3	834.939	924.985,0	926.782,3
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	883.337,8	979.992,4	1.097.672,4	1.125.480,6	1.228.478,5
8.	Transportasi dan Pergudangan	566.080,1	656.914,6	742.336,6	808.191,6	838.840,4
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	45.247,9	50.492,2	56.587,1	64.384,8	63.377,6
10.	Informasi dan Komunikasi	335.069,4	354.923,8	400.443,8	399.978,7	448.497,1
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	192.183,7	211.309,9	233.621,9	252.122,6	256.984,1
12.	Real Estat	113.626,1	128.657,5	146.885,2	163.139,6	167.449,1
13.	Jasa Perusahaan	2.836,3	3.048,8	3.350,9	3.687,7	3.652,5
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	479.479,4	536.659,7	583.866,9	576.188,6	630.176,3
15.	Jasa Pendidikan	193.901,2	230.998,2	261.859,6	292.786,6	295.901,3
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	94.116,3	107.157,6	119.554	128.063,6	132.704,9
17.	Jasa lainnya	115.066,6	136.623,9	151.465,8	163.879,8	304.143,3
	Total	7.406.291,3	8.163.912,6	9.187.759,4	9.875.980,55	10.623.178,6

Sumber : BPS, Tanah Datar Dalam Angka Tahun 2016

*) Angka sementara

Pada tahun 2015 nilai tambah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih dominan dibandingkan dengan nilai tambah sektor ekonomi lainnya dengan kontribusi sebesar 3,32 triliun rupiah atau 33,68% dari total PDRB Kabupaten Tanah Datar. Sementara itu, sektor Perdagangan Besar dan Eceran Reperasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan sektor kedua terbesar dalam memberikan sumbangannya terhadap pembentukan nilai PDRB Kabupaten Tanah Datar. Selama tahun 2015 sektor Perdagangan Besar dan Eceran Reperasi Mobil dan Sepeda Motor menghasilkan nilai tambah sebesar 1,125 triliun rupiah atau sekitar 12,41 persen terhadap total PDRB Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan sektor Pengadaan Listrik dan Gas merupakan sektor yang paling kecil memberikan sumbangan terhadap nilai PDRB Kabupaten Tanah Datar yang hanya menghasilkan nilai tambah sebesar 2,19 milyar rupiah atau sekitar 0,02 persen terhadap total PDRB Kabupaten Tanah Datar selama tahun 2015.

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih dominan dibandingkan dengan nilai tambah sektor ekonomi lainnya dengan

kontribusi sebesar 3,32 triliun rupiah atau 33,68% dari total PDRB Kabupaten Tanah Datar. Sementara itu, sektor Perdagangan Besar dan Enceran Reperasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan sektor kedua terbesar dalam memberikan sumbangannya terhadap pembentukan nilai PDRB Kabupaten Tanah Datar. Selama tahun 2015 sektor Perdagangan Besar dan Enceran Reperasi Mobil dan Sepeda Motor menghasilkan nilai tambah sebesar 1,125 triliun rupiah atau sekitar 12,41 persen terhadap total PDRB Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan sektor Pengadaan Listrik dan Gas merupakan sektor yang paling kecil memberikan sumbangan terhadap nilai PDRB Kabupaten Tanah Datar yang hanya menghasilkan nilai tambah sebesar 2,19 milyar rupiah atau sekitar 0,02 persen terhadap total PDRB Kabupaten Tanah Datar selama tahun 2015

Tabel 2.67
Jumlah Tenaga Kerja per Sektor, 2012 - 2016

No	Sektor	Tahun				
		2012	2013	2014	2015*	2016
1.	Pertanian	61.417	68.515	72.465	72.465	72.465
2.	Pertambangan dan Penggalian	481	3.269	1.389	1.389	1.389
3.	Industri Pengolahan	17.328	9.679	14.771	14.771	14.771
4.	Listrik dan air	-	593	420	420	420
5.	Bangunan	7.517	5.567	5.910	5.910	5.910
6.	Perdagangan, hotel dan restoran	37.139	38.525	34.035	34.035	34.035
7.	Angkutan dan komunikasi	7.776	9.434	6.045	6.045	6.045
8.	Keuangan, persewaan dan jasa pemerintahan	3.608	3.065	3.710	3.710	3.710
9.	Jasa-jasa	26.183	25.712	23.630	23.630	23.630
	Total	161.449	164.359	115.758	115.758	115.758

Sumber : Tanah Datar Dalam Angka (2016)

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah tenaga kerja terbesar diserap pada sektor pertanian (62,60%) yang diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran (29,40 %) dan sektor jasa-jasa (20,41%).

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

a. Fasilitas Bank dan Non Bank

Jenis Dan Jumlah Bank

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Tabel 2.68
Jenis dan Jumlah Bank, 2012 – 2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Bank Umum					
	- Konvensional	3	3	3	3	3
	- Syariah	-	-	1	1	1
2.	BPR					
	- Konvensional	21	21	21	21	21
	- Syariah	-	-	-	-	-
3.	Jumlah	24	24	25	25	25

Sumber : Tanah Datar Dalam Angka Tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa perekonomian Kabupaten Tanah Datar sudah difasilitasi oleh lembaga keuangan berupa bank umum dan BPR.

Ketersediaan Restoran

Ketersediaan restoran pada suatu daerah menunjukkan tingkat daya tarik investasi suatu daerah. Tabel berikut ini menyajikan jumlah dan jenis restoran di Kabupaten Tanah Datar.

Tabel 2.69
Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran, 2012 - 2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Restoran/Rumah makan/ Warung makan/Cafe	179	220	220	220	220

Sumber : BPS, Tanah Datar Dalam Angka Tahun 2016

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tidak ada peningkatan jumlah Restoran/Rumah makan/Warung makan/Café.

Ketersediaan Penginapan

Ketersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah. Semakin berkembangnya investasi ekonomi daerah akan meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut. Dengan semakin banyaknya jumlah kunjungan orang dan wisatawan ke suatu daerah perlu didukung oleh ketersediaan penginapan/hotel. Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012-2016 sebagaimana dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.70
Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan, 2012 – 2016

No	Uraian	Tahun														
		2012			2013			2014			2015			2016		
		hotel	Kamar	tempat tidur	Hotel	kamar	tempat tidur	hotel	kamar	tempat tidur	hotel	kamar	tempat tidur	hotel	kamar	tempat tidur
1.	Hotel Bintang 1	2	78	164	2	78	164	2	78	164	2	78	164	2	78	164
2.	Melati	4	79	168	4	79	168	4	79	168	4	79	168	4	79	168
3.	Wisma	2	18	25	2	18	25	2	18	25	2	18	25	2	18	25
4.	Cottage	1	20	30	1	20	30	1	20	30	1	20	30	1	20	30
5.	Home stay	1	6	12	3	12	23	3	12	23	3	12	23	3	12	23

Sumber : Tanah Datar Dalam Angka

Dari tabel di atas terlihat bahwa perkembangan hotel dan penginapan lainnya semakin meningkat hal ini disebabkan karena meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dari luar daerah ke Kabupaten Tanah Datar.

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Kemudahan Perizinan

Kemudahan perizinan adalah proses pengurusan perizinan yang terkait dengan persoalan investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Lama proses perizinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perizinan (dalam hari).

Tabel 2.71
Lama Proses Perizinan, 2012 – 2016

No	Uraian	Tahun														
		2012			2013			2014			2015			2016		
		Lama Mengurus (Hari)	Jumlah Persyaratan (dokumen)	Biaya resmi	Lama Mengurus (Hari)	Jumlah Persyaratan (dokumen)	Biaya resmi	Lama Mengurus (Hari)	Jumlah Persyaratan (dokumen)	Biaya resmi	Lama Mengurus (Hari)	Jumlah Persyaratan (dokumen)	Biaya resmi	Lama Mengurus (Hari)	Jumlah Persyaratan (dokumen)	Biaya resmi
1	SIUP	3	6	-	3	6	-	3	6	-	3	6	-	2	6	-
2	TDP	4	4	-	3	4	-	3	4	-	3	4	-	2	4	-
3	IUI	5	6	-	5	6	-	5	6	-	3	6	-	3	6	-
4	TDUH	14	4	-	5	4	-	5	4	-	4	4	-	3	4	-
5	IMB	15	7	-	7	7	-	7	7	-	7	7	-	5	7	-
6	HO	15	10	-	15	10	-	15	10	-	10	10	-	5	10	-

Sumber : Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Tanah Datar (2016)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan perizinan di Kabupaten Tanah Datar semakin singkat, hal ini disebabkan karena meningkatnya pelayanan perizinan seperti sarana dan prasarana perizinan serta sumber daya manusia.

Peraturan Bupati yang Mendukung Iklim Usaha

Peraturan Bupati (Perbup) merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui perbup inilah dapat diindikasikan adanya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perbup yang mendukung iklim usaha dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.72
Jumlah Perbup Yang Mendukung Iklim Usaha, 2012-2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Perbup terkait perizinan	12	25	34	44	48

Sumber : Bagian Hukum Setda Kab. Tanah Datar (2016)

Dari tabel di atas dapat dijelaskan jumlah Perbup yang mendukung iklim usaha di Kabupaten Tanah Datar tahun 2012-2016 sebanyak 48 Perbup.

2.1.4.4. Fokus Sumberdaya Manusia

a. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)

Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan, dimana semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan D1/D2/D3 sampai dengan S1, S2 dan S3.

Tabel 2.73
Rasio Kualitas Tenaga Kerja Terhadap Jumlah Penduduk, 2012-2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015*)	2016*)
1.	Jumlah Lulusan DI/DII/DIII	4,874	4,587	4.790	3.225	3.225
2.	Jumlah Lulusan DIV/S1/S2/S3	16,270	14,110	12.834	15.539	15.539
3.	Jumlah	21,144	18,697	17.624	18.764	18.764
4.	Jumlah Penduduk	341,911	342,864	343.864	344.428	344.428
5.	Rasio Lulusan S1/S2/S3	0,05	0,04	0,03	0,05	0,05

Sumber : Tanah Datar Dalam Angka (2016)

*) Angka sementara

Sedangkan rasio kualitas tenaga kerja menurut PNS dan lulusan perguruan tinggi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.74
Rasio Kualitas Tenaga Kerja Terhadap Jumlah Pegawai, 2012-2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015*)	2016*)
1.	Jumlah Lulusan S1	3,453	3,618	11.507	3.788	3.788
2.	Jumlah Lulusan S2/S3	167	191	877	199	199
3.	Jumlah Lulusan S1/S2/S3	3,620	3,809	12.384	3.987	3.987
4.	Jumlah Pegawai	7,561	7,381	-	7.356	7.356
5.	Rasio Lulusan S1/S2/S3	0.48	0.52	-	0,54	0,54

Sumber : Tanah Datar Dalam Angka (2016)

b. Tingkat Ketergantungan (*dependency ratio*)

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.75
Rasio Ketergantungan, 2012 - 2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Penduduk usia < 15 tahun	106.102	99.319	101.068	98.890	
2.	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	18.781	27.862	28,048	27.997	
3.	Jumlah Penduduk usia tdk produktif (1) & (2)	124.883	127.181	129.116	126.887	
4.	Jumlah Penduduk usia 15-64 tahun	218.108	215.683	217.120	216.988	
5.	Rasio ketergantungan (3)/(4)*100	57,26	58,97	59,47	58,47	

Sumber : Tanah Datar Dalam Angka (2016)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rasio ketergantungan Kabupaten Tanah Datar cukup tinggi yang berarti bahwa tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Namun angka rasio ketergantungan cenderung menurun dari tahun 2012 sebesar 57,26% menjadi 58,47% pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan semakin berkurangnya beban yang ditanggung oleh penduduk produktif karena berkurangnya jumlah penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

2.2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD

Hasil pengukuran capaian 22 indikator kinerja utama untuk mewujudkan 11 sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 3.2.1.

2.2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD

Sasaran 1 : Meningkatkan Pemahaman Ajaran Agama di Tengah-Tengah Masyarakat

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran 1 terdiri atas 5 (lima) indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Indikator Sasaran Meningkatnya Pemahaman Ajaran Agama di Tengah-Tengah Masyarakat

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Pemahaman Ajaran Agama di Tengah-Tengah Masyarakat	Persentase pengurus remaja mesjid yang dibina	16	7,8	48
2.		Persentase peserta tahfidz yang hafidz alquran	0	0	0
3.		Rasio Rumah Tahfidz di kecamatan	30	36	120
4.		Persentase perolehan medali pada MTQ	33	0	0
5.		Persentase penurunan kasus siswa yang bermasalah	1	0	0

Sasaran 2 : Meningkatnya Peran dan Fungsi Lembaga Keagamaan di Tengah-Tengah masyarakat Membina Kehidupan Beragama di Masyarakat

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya peran dan fungsi lembaga keagamaan dan alim ulama dalam membina kehidupan beragama di masyarakat terdiri atas 3 (tiga) indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya peran dan fungsi lembaga keagamaan dan alim ulama dalam membina kehidupan beragama di masyarakat

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Meningkatnya peran dan fungsi lembaga keagamaan dan alim ulama dalam membina kehidupan beragama di masyarakat	Persentase kelompok keagamaan yang difasilitasi (kelompok)	0	2	200%
		Persentase TPA, TPSA yang telah terakreditasi	0	0	0
		Persentase guru TPA/TPSA yang bersertifikat	0	0	0
				Rata-rata capaian	200%

Sasaran 3 : Meningkatnya Pengetahuan, Pemahaman, Penghayatan dan Penerapan Nilai-Nilai Adat dan Budaya di Tengah-Tengah Masyarakat

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Pengetahuan, Pemahaman, Penghayatan dan Penerapan Nilai-Nilai Adat dan Budaya di Tengah-Tengah Masyarakat	Persentase Nagari yang menerbitkan peraturan nagari tentang adat dan budaya	0	0	-
		Persentase TPA, TPSA yang telah terakreditasi	17	0	-
		Persentase guru TPA/TPSA yang bersertifikat	16	0	0

Sasaran 4 : Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan seni dan budaya

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan seni dan budaya	1. Persentase penyelenggaraan festival seni budaya	100 %		
		2. Persentase sanggar seni dan budaya yang aktif	30 %		
		3. Peningkatan benda situs dan kawasan cagar budaya			

Sasaran 5 : Meningkatnya perilaku positif siswa, pendidik dan tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya perilaku positif siswa, pendidik dan tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat	1. Jumlah siswa yang hafizd Qur'an :			
		a. SD/MI minimal 1 juz	3.149		
		b. SMP/MTs minimal 2 juz	1.494		
		2. Jumlah siswa berprestasi dalam:			
		a. OSN SD/MI	2		
		b. OSN SMP/MTs	3		
		c. FLS2N SD/MI	7		
		d. FLS2N SMP/MTs	7		
		e. O2SN SD/MI	21		
		f. O2SN SMP/MTs	21		
		g. LCP SD/MI	1		
		3. Indeks integritas siswa	77,5		
		4. Jumlah orang dewasa yang berpartisipasi aktif dalam pendidikan	0		
		5. Persentase guru yang berkinerja baik	75 %		

Sasaran 6 : Meningkatnya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
1.	Meningkatnya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar PAUD	58,8%	0	-	
		Angka Partisipasi Kasar SD/MI	105,51%		-	
		SMP/MTs	103,29%			
		SMA/SMK/MA	82,2%			
		Angka Partisipasi Murni				
		SD/MI	90,89%	92,22%	101,46%	
		SMP/MTs	81,73%	82,92%	101,46%	
		SMA/SMK/MA	63,3%			

Sasaran 7 : Meningkatkan Mutu Layanan dan Lulusan Serta Tata Kelola Pendidikan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Mutu Layanan dan Lulusan Serta Tata Kelola Pendidikan	Angka Putus Sekolah SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA	58,8%	0	-
		Angka Merlanjutkan Sekolah SD/MI ke SMP/MTs SMP/MTs ke SMA/SMK/MA			
		Rasio Guru/murid SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA			
		Guru yang memenuhi kualifikasi D-4/S-1 SD/MI SMP/MTs SMAK/SMK/MA			

Sasaran 8 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Persentase rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat	58,8%	0	-
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 KH			
		Persentase Ibu yang selamat dalam proses melahirkan			
		Prevalensi tekanan darah tinggi			
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak balita			
		Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk			
		Prevalensi HIV (persen)			

		Persentase nagari yang Universal Child Immunization (UCI)			
		Persentase Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi			
		Persentase RS yang tersertifikasi akreditasi			
		Persentase ketersediaan obat dan vaksin dipuskesmas			
		Persentase kepersertaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan			

Sasaran 9 : Meningkatnya Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	Angka kelahiran (total fertility Rate/TFR)			
		Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)			
		Rata-rata jumlah anak per keluarga			

Sasaran 10 : Meningkatnya Pelindungan Terhadap Perempuan dan Anak

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Pelindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Indeks pembangunan gender (IPG)			
		Rasio KDRT			
		Prevalensi kekerasan terhadap anak			
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			

Sasaran 11 : Meningkatkan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Pelindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Indeks pembangunan gender: (IPG)			
		Rasio KDRT			
		Prevalensi kekerasan terhadap anak			
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			

Sasaran 12 : Menurunnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran terbuka

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Menurunnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran terbuka	1. Persentase penduduk miskin	5,27 %	5,82 %	89,56 %
		2. Persentase pengangguran terbuka	4,41 %		

Sasaran 13 : Pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial	1. Persentase penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	13,8 %		

Sasaran 14 : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Akuntabel

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	Diklat PIM	115 orang	211 orang	183,47 %
		Diklat Perencanaan	225 orang	229 orang	101,77 %

Sasaran 15 : Meningkatnya Transparansi Informasi Publik

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi				Capaian Kinerja (%)			
			2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
1.	Meningkatnya Transparansi Informasi Publik	Cakupan penerbitan kartu keluarga	107.873	110.241	145.273		130,18	101,43	140,27	

Sasaran 16 : Meningkatnya Penegakan dan Kepastian Hukum

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Penegakan dan Kepastian Hukum	Cakupan penegakan peraturan daerah (%)	25	25	100 %
		Kasus kriminalitas (kasus)	495	160	33 %
		Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	1,24	1,24	100 %
		Cakupan patroli Satpol PP	15	15	100 %
		Angka kriminalitas	13,64	13,64	100 %

Sasaran 17 : Meningkatnya kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah	1. Persentase peningkatan PAD	2,82 milyar		
		2. Peningkatan jumlah objek pajak dan retribusi daerah			

Sasaran 18 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur jalan, Jembatan, Irigasi, Perumahan dan Pemukiman

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun					
				2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur jalan, Jembatan, Irigasi,	Jenis Permukaan:							
		a. Aspal	Km	778,15	785,75	791,25	826,16	848,81	835,42
		b. Kerikil/ batu/beton	Km	183,4	181,3	177,3	169,90	157,59	265,60

2.	Perumahan dan Pemukiman	c. Tanah	Km	447,25	441,75	440,25	412,74	402,40	402,20
		Jumlah	Km	1.408,80	1.408,80	1.408,80	1.408,80	1.408,80	1.503,22
		Kondisi Jalan:							
		a. Baik (Mantap)/sedang	Km	714,75	737,32	746,82	815,01	847,8	862,64
		b. Rusak/Rusak Berat (Tidak Mantap)	Km	694,05	671,49	661,98	593,79	561,00	640,58
		Jumlah	Km	1.408,80	1.408,80	1.408,80	1.408,80	1.408,80	1503,22

Sasaran 19 : Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan tata ruang

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan tata ruang	1. Persentase perencanaan tata ruang daerah			
		2. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	100 %		
		3. Jumlah Bangunan ber IMB			

Sasaran 20 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi					Capaian Kinerja				
			2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	Persentase Cakupan Wilayah Persampahan (Nagari)	5	5	11	15		100 %	100%	100%	70,30%	
		Status mutu lingkungan hidup (kualitas air)	n/a	5	5	5		n/a	100%	100%	100%	100%

Sasaran 21 : Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Penanganan Penanggulangan Bencana

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Penanganan Penanggulangan Bencana	Persentase sarana dan prasarana yang direhabilitasi dan di rekonstruksi	38,46	38,46	100%

Sasaran 22 : Meningkatnya kesiagaan dalam penanggulangan bahaya kebakaran

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya kesiagaan dalam penanggulangan bahaya kebakaran	1. Cakupan pelayanan bahaya kebakaran	33,33 %		
		2. Pemenuhan standar sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran			

Sasaran 23 : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi yang Mengandalkan Produk Unggul dan Potensi Sumber Daya Daerah

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi yang Mengandalkan Produk Unggul dan Potensi Sumber Daya Daerah	Peningkatan produksi komoditi unggulan: a. Padi b. Jagung c. Ubi jalar d. Cabe e. Tomat f. Kubis g. Pisang h. Karet i. Kakao j. Kopi k. Tebu	251.326,93 22.454,25 68.424,96 11.927,42 10.825,61 17.124,47 11.592,01 6.518,45 3.859,87 118,06 4.785,13	232.386 21.955 48.831 13.931,3 13.366,8 19.600,4 15.936,6 6.509,96 3.787,37 101,64 4.677,54	92,46 97,77 71,36 116,80 123,47 114,45 137,47 99,86 98,12 86,09 97,75
2.		Jumlah populasi ternak besar (sapi potong, kerbau)	41.223	40.222	97,57%
3.		Jumlah populasi ternak kecil (kambing)	31.151	28.776	92,37%
4.		Jumlah populasi unggas	2.093.758	2.403.616	114,74%
5.		Produksi Daging a. Daging sapi b. Daging kerbau c. Daging kambing d. Daging ayam pedaging	951.680,73 52.975,56 115.173 1.987.450	1.099.244 128.200 113.800 3.000.146	115,5% 241,99% 98,80% 150,95%
6.		Produksi telur	8.639.728	8.872.759	102,69%

Sasaran 24 : Meningkatnya kunjungan wisatawan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya kunjungan wisatawan	1. Peningkatan Jumlah kunjungan wisatawan (orang)	1.005.000 orang	1.189.173 orang	118,32 %
		2. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD (Rp)	3.176.140.900	3.497.059.000	110,10%

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah**2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah****Prioritas 1 : Peningkatan Pemahaman dan Pengalaman Nilai-Nilai Agama, Adat dan Budaya**

1. Belum optimalnya pemberdayaan organisasi masyarakat, sosial dan keagamaan.
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap norma-norma/aturan hukum yang berlaku yang diindikasikan dengan masih adanya sengketa sako dan pusako.

Prioritas 2 : Peningkatan Kualitas Pendidikan, Derajat Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

1. Masih rendahnya angka Rata-rata Lama Sekolah yang diindikasikan dengan belum tuntasnya Wajib Belajar 9 Tahun.
2. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) semakin rendah pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
3. Masih tingginya tingkat kematian ibu saat melahirkan.
4. Belum terpenuhinya rasio tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk.
5. Masih belum optimalnya penerapan PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat).
6. Masih adanya keterbatasan peningkatan kualitas SDM yang tercermin dari masih terbatasnya kemampuan meningkatkan nilai IPM.
7. Masih terjadi kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Prioritas 3 : Optimalisasi Pembangunan Pariwisata Daerah

1. Belum optimalnya pemanfaatan potensi kepariwisataan, baik dari segi penyediaan fasilitas maupun event pariwisata yang mendorong tingkat kunjungan ke objek wisata dan perekonomian di wilayah kawasan wisata.

Prioritas 4 : Pengurangan Pengangguran dan Kemiskinan

1. Masih adanya masyarakat (angkatan kerja) yang menganggur serta penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

Prioritas 5 : Peningkatan Ketahanan Pangan, Pemberdayaan UMKM dan Pengembangan Perdagangan

1. Walaupun lapangan usaha pertanian mendominasi dalam kontribusi PDRB tetapi belum mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi.
2. Masih terjadinya ketimpangan ekonomi secara umum.
3. Belum terpenuhinya standarisasi produk dan jasa yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi daerah.
4. Masih rendahnya daya saing produk yang dihasilkan oleh masyarakat.
5. Belum terwujudnya swasembada pangan dalam upaya peningkatan ketahanan pangan daerah dan nasional.
6. Masih terbatasnya kesadaran penerapan pola konsumsi pangan yang aman, bergizi, seimbang, beragam, merata dan terjangkau.
7. Belum terwujudnya peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat melalui diversifikasi usaha dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat.
8. Masih terbatasnya kualitas kelembagaan yang dikelola oleh masyarakat untuk mendorong peningkatan aktivitas perekonomian.
9. Masih terbatasnya kualitas SDM pengelola kelembagaan ekonomi dan sosial yang ada di dalam masyarakat.

Prioritas 6 : Peningkatan Kuantitas dan kualitas Infrastruktur Daerah

1. Masih terjadinya alih fungsi lahan terutama pada lahan produktif untuk kegiatan non pertanian.
2. Infrastruktur jalan belum memadai, selain masalah kualitas dan memiliki jurang terjal dan dalam sehingga menyulitkan untuk meningkatkan akses perekonomian masyarakat dan cenderung menghambat percepatan pembangunan pada sektor prioritas seperti pertanian, industri dan pariwisata.
3. Belum memadainya sarana dan prasarana perhubungan antar daerah dalam wilayah kabupaten.
4. Cakupan pelayanan air bersih yang memenuhi standar kesehatan masih terbatas.
5. Kondisi kualitas dan kuantitas drainase belum memadai sehingga berpotensi terjadi genangan air yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.
6. Masih terbatasnya sarana prasarana sanitasi permukiman.
7. Belum berkembangnya kawasan strategis dan cepat tumbuh karena pertumbuhan daerah masih terkonsentrasi di ibukota kabupaten dan kecamatan.

8. Masih adanya wilayah di Kabupaten Tanah Datar yang belum terlayani oleh jaringan Komunikasi dan Informatika.

Prioritas 7 : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Penerapan E-Government

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, aspiratif dan partisipatif.
2. Masih ada perangkat daerah yang belum memenuhi standar pelayanan minimum.
3. Belum meratanya penyebaran sumber daya manusia (ASN) sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
4. Masih lemahnya upaya pengawasan dan penegakan peraturan.
5. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi.
6. Terbatasnya kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan sehingga ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat masih sangat tinggi.

Prioritas 8 : Penanggulangan Bencana dan Pelestarian Lingkungan Hidup

1. Belum optimalnya pemanfaatan rencana tata ruang yang berwawasan lingkungan dalam perencanaan pembangunan.
2. Masih rendahnya kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap pengurangan resiko bencana, lingkungan dan pelestarian sumberdaya alam.
3. Masih terdapatnya lahan kritis, sehingga menyebabkan rendahnya kualitas dan daya dukung sumberdaya alam dalam peningkatan produktivitas ekonomi daerah.
4. Belum tuntasnya regulasi untuk legalitas perencanaan pengelolaan lingkungan dan pengembangan ekonomi terpadu pada kawasan Danau Singkarak sehingga belum dapat dijadikan acuan atau rujukan dalam mengaplikasikan pelaksanaan pembangunan daerah.
5. Sebagian besar daerah berada pada kawasan rawan bencana alam, sehingga memiliki resiko tinggi dalam melakukan aktivitas ekonomi, sosial dan budaya di kawasan tersebut.

Prioritas 9 : Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

2.3.2.1. Isu Strategis Nasional

No	Bidang/Tema	Isu Strategis	
1	SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA	1.1	Kependudukan dan Keluarga Berencana
		1.1.1.	Pengendalian kuantitas penduduk melalui keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
		1.1.2.	Penguatan landasan hukum dan penyerasian kebijakan pembangunan bidang kependudukan dan KB (KKB);
		1.1.3.	Penguatan kelembagaan pembangunan bidang kependudukan dan KB;
		1.1.4.	Penguatan data dan informasi kependudukan dan KB.
		1.2	Kesehatan dan Gizi Masyarakat
		1.2.1.	Peningkatan kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia;
		1.2.2.	Percepatan perbaikan status gizi masyarakat;
		1.2.3.	Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
		1.2.4.	Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas;
		1.2.5.	Pemenuhan ketersediaan farmasi, alat kesehatan, dan pengawasan obat dan makanan;
		1.2.6.	Pemenuhan sumber daya manusia kesehatan;
		1.2.7.	Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
		1.2.8.	Peningkatan manajemen, penelitian dan pengembangan, serta sistem informasi kesehatan;
		1.2.9.	Pengembangan dan peningkatan efektifitas pembiayaan kesehatan;
		1.2.10.	Pengembangan jaminan kesehatan nasional.
		1.3	Pendidikan
		1.3.1.	Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun yang berkualitas;
		1.3.2.	Peningkatan kualitas pembelajaran;
		1.3.3.	Peningkatan manajemen guru, pendidikan keguruan, dan reformasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK);
		1.3.4.	Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan tinggi;
		1.3.5.	Peningkatan akses dan kualitas PAUD;
		1.3.6.	Peningkatan keterampilan kerja dan penguatan pendidikan orang dewasa;
		1.3.7.	Peningkatan pendidikan keagamaan;
		1.3.8.	Penguatan pendidikan agama, pendidikan kewargaan dan pendidikan karakter untuk mendukung Revolusi Mental;
		1.3.9.	Peningkatan efisiensi pembiayaan pendidikan;
		1.3.10.	Penguatan tata kelola pendidikan.
1.4	Perpustakaan		
1.4.1.	Pengembangan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca.		
1.5	Pemuda dan Olahraga		
1.5.1.	Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan;		
1.5.2.	Peningkatan budaya dan prestasi olahraga.		
1.6	Kebudayaan		
1.6.1.	Penguatan karakter dan jati diri bangsa;		
1.6.2.	Peningkatan apresiasi seni dan kreativitas karya budaya;		

No	Bidang/Tema	Isu Strategis	
		1.6.3.	Pelestarian warisan budaya;
		1.6.4.	Peningkatan promosi, diplomasi, dan pertukaran budaya; dan
		1.6.5.	Pengembangan sumber daya kebudayaan.
		1.7	Agama
		1.7.1.	Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
		1.7.2.	Peningkatan kerukunan umat beragama;
		1.7.3.	Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama;
		1.7.4.	Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;
		1.7.5.	Peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama.
		1.8	Kesejahteraan Sosial
		1.8.1.	Peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas dan lanjut usia;
		1.9	Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
		1.9.1.	Peningkatan kapasitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan
		1.10	Perlindungan Anak
		1.10.1.	Peningkatan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak yang optimal;
		1.10.2.	Peningkatan perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya;
		1.10.3.	Peningkatkan efektivitas kelembagaan perlindungan anak.
2	EKONOMI	2.1	Perkembangan Ekonomi Makro
		2.2	Reformasi Keuangan Negara
		2.2.1.	Peningkatan penerimaan negara;
		2.2.2.	Peningkatan kualitas belanja negara melalui sinergitas perencanaan dan penganggaran baik di pusat maupun di daerah.
		2.3	Stabilitas Moneter
		2.3.1.	Menjaga stabilitas laju inflasi;
		2.3.2.	Menjaga stabilitas nilai tukar rupiah;
		2.3.2.	Meningkatkan koordinasi kebijakan.
		2.4	Makroprudensial dan Keuangan yang Inklusif
		2.4.1.	Ketidakseimbangan likuiditas internasional, serta fragmentasi likuiditas di sistem keuangan domestik;
		2.4.2.	Pasar keuangan yang belum mendalam (<i>financial deepening</i>) dan likuid;
		2.4.3.	Penguatan permodalan dan aset, likuiditas dan strategi keuangan
		2.4.4.	Masih terkendalanya fungsi intermediasi perbankan;
		2.4.5.	Peran lembaga keuangan non-bank (LKNB) seperti asuransi, dana pensiun, dan pasar modal masih relatif kecil dalam perekonomian;
		2.4.6.	Meningkatkan ketahanan dan daya saing sektor keuangan dalam mendukung pembangunan/ pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
		2.5	Re-Industrialisasi yang Berkelanjutan
		2.5.1.	Deindustrialisasi;
		2.5.2.	Populasi dan struktur industri lemah;
		2.5.3.	Bahan mentah diekspor sementara bahan setengah jadi diimpor;
		2.5.4.	Ketergantungan pada impor tinggi;
		2.5.5.	Produktivitas rendah;
		2.5.6.	Industri terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera.

No	Bidang/Tema	Isu Strategis	
		2.6	Peningkatan Efisiensi, Produktivitas, dan Daya Saing BUMN
		2.6.1.	Peran BUMN sebagai pendukung penyedia bahan kebutuhan pokok/pangan, penunjang pertumbuhan ekonomi dan penyerap angkatan kerja yang masih belum optimal;
		2.6.2.	Beberapa BUMN masih belum menunjukkan kinerja yang baik.
		2.7	Pemberdayaan UMKM dan Koperasi
		2.7.1.	Populasi UMKM masih didominasi oleh usaha mikro yang informal (98,8%), dan memiliki aset dan produktivitas yang rendah;
		2.7.2.	Partisipasi UMKM dalam ekspor masih rendah (kurang dari 19,0%) dan kontribusinya dalam ekspor terus mengalami penurunan;
		2.7.3.	Koperasi masih terkendala untuk mengoptimalkan partisipasi dan keswadayaan anggotanya dalam menciptakan manfaat sosial ekonomi bagi perbaikan kesejahteraan rakyat.
		2.8	Peningkatan Pariwisata
		2.8.1.	Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tujuan wisata;
		2.9	Peningkatan Ekonomi Kreatif
		2.9.1.	Mencapai pertumbuhan yang tinggi dan mengutamakan penumbuhan usaha pemula di ekonomi kreatif;
		2.10	Penguatan Investasi
		2.10.1.	Sebaran investasi yang belum berimbang dimana pulau Jawa masih sebagai pusat investasi di Indonesia;
		2.10.2.	Investasi di sektor manufaktur meningkat, tetapi sebagian besar untuk pemenuhan pasar dalam Negri;
		2.10.3.	Proses perijinan masih belum efisien;
		2.10.4.	Implementasi insentif fiskal bagi pengusaha belum optimal;
		2.10.5.	Ketersediaan infrastruktur dan energi yang masih terbatas;
		2.10.6.	Proses pengadaan dan perijinan lahan yang masih menjadi Hambatan
		2.10.7.	Masih banyaknya regulasi yang tidak harmonis dan peraturan daerah yang distortif;
		2.10.8.	Kurang harmonisnya peraturan pusat dan daerah, antar instansi, dan seringnya perubahan peraturan telah mengurangi kepastian berusaha bagi investor;
		2.10.9.	Kondisi bisnis di Indonesia dinilai masih belum cukup bersaing dibandingkan dengan negara-negara lain terutama dalam satu kawasan
		2.10.10.	Pasar tenaga kerja yang kurang kondusif;
		2.10.11.	Masih tingginya perilaku anti persaingan.
		2.11	Mendorong Perdagangan Dalam Negeri
		2.11.1.	Masih terdapatnya kelangkaan stok dan disparitas harga bahan pokok yang tinggi;
		2.11.2.	Belum optimalnya aktivitas perdagangan dalam negeri;
		2.11.3.	Masih rendahnya minat masyarakat terhadap produk domestik;
		2.11.4.	Belum optimalnya upaya perlindungan konsumen.
		2.12	Peningkatan Daya Saing Ekspor
		2.12.1.	Sebagian besar ekspor merupakan komoditas primer;
		2.12.2.	Masih rendahnya tingkat diversifikasi pasar tujuan ekspor;
		2.12.2.	Masih rendahnya daya saing ekspor jasa;
		2.12.3.	Meningkatnya hambatan non tarif;

No	Bidang/Tema	Isu Strategis	
		2.12.4.	Fasilitasi ekspor yang belum optimal.
		2.13	Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Perluasan Lapangan Kerja
		2.13.1.	Pertumbuhan ekonomi tidak menyerap tenaga kerja sebanyak yang dibutuhkan dalam tiga tahun terakhir (2010-2013)
		2.13.2.	Tingkat pertumbuhan ekonomi belum mampu mengatasi tantangan demografis pertumbuhan angkatan kerja dan jumlah penganggur;
		2.13.3.	Transformasi struktur pasar tenaga kerja lebih ke arah sektor jasa dengan produktivitas rendah;
		2.13.4.	Rendahnya kualitas pekerja menyebabkan produktivitas dan daya saing rendah;
		2.13.5.	Ketidaksesuaian antara kebutuhan industri terhadap tenaga kerja dengan pendidikan dan pelatihan.
		2.13.6.	Pasar tenaga kerja diwarnai banyak pekerja rentan yang produktivitasnya rendah;
		2.13.7.	Kenaikan upah tidak diikuti dengan kenaikan produktivitas;
		2.13.8.	Efisiensi pasar tenaga kerja dalam pilar daya saing melemah;
		2.13.9.	Kondisi lingkungan kerja yang belum memadai dan diskriminasi di tempat kerja.
		2.14	Perlindungan Pekerja Migran
		2.14.1.	Rendahnya kualifikasi tenaga kerja migran
		2.14.2.	Fasilitasi perlindungan tenaga migran
		2.15	Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
		2.15.1.	Perluasan kepesertaan;
		2.15.2.	Peningkatan manfaat dan kualitas pelayanan jaminan sosial;
		2.15.3.	Kesinambungan finansial BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
		2.16	Kerjasama Ekonomi Internasional
		2.16.1.	Masih belum selarasnya antara diplomasi politik dan diplomasi ekonomi;
		2.16.2.	Belum optimalnya kualitas koordinasi lintas sektor dan seluruh pihak terkait dalam proses penyiapan dan implementasi hasil-hasil kerjasama ekonomi internasional;
		2.16.3.	Belum optimalnya pemanfaatan kesepakatan kerjasama ekonomi internasional dalam mencapai kepentingan nasional;
		2.17	Data dan Informasi Statistik
		2.17.1.	Kebutuhan data dan informasi akibat pemekaran daerah dan desentralisasi;
		2.17.2.	Meningkatnya kebutuhan data yang diperlukan kementerian dan lembaga;
		2.17.3.	Koordinasi antar instansi masih kurang;
		2.17.4.	Kurangnya jumlah SDM statistik profesional;
		2.17.5.	Beragamnya jenis pengguna data memerlukan perlakuan khusus pada masing masing pengguna
		2.17.6.	Keterbatasan pada ketersediaan dan penggunaan sistem TIK.
3	ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	3.1	Sumbangan Iptek untuk Perekonomian Nasional Minim
		3.1.1.	Meningkatkan dukungan nyata iptek terhadap peningkatan daya saing sektor-sektor produksi barang dan jasa;
		3.2	Kekayaan Sumber Daya Alam Makin Berkurang
		3.2.1.	Meningkatkan dukungan iptek untuk keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati maupun nir-hayati
		3.3	Globalisasi Kehidupan Sosial Budaya Semakin Kuat

No	Bidang/Tema	Isu Strategis	
			Meningkatkan dukungan iptek untuk penyiapan masyarakat Indonesia menyongsong kehidupan global yang maju dan modern;
4	POLITIK	4.1	Politik Dalam Negeri
		4.1.1.	Penguatan peran lembaga demokrasi;
		4.1.2.	Jaminan pemenuhan kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat;
		4.1.3.	Keterbukaan informasi, komunikasi publik, dan peningkatan akses masyarakat terhadap informasi publik;
		4.1.4.	Pemantapan wasbang dan karakter bangsa dalam rangkamemperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
		4.1.5.	Penanggulangan terorisme.
		4.2	Politik Luar Negeri
		4.2.1.	Penanganan perbatasan;
		4.2.2.	Pemantapan peran Indonesia di ASEAN;
		4.2.3.	Penguatan diplomasi ekonomi;
4.2.4.	Peningkatan kualitas perlindungan hak dan keselamatan WNI/BHI di luar negeri khususnya perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI);		
4.2.5.	Peran Indonesia dalam kerja sama bilateral, regional dan global.		
5	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	5.1	Peningkatan Kapasitas Pertahanan dan Stabilitas Keamanan Nasional
		5.1.1.	Alutsista TNI, almatsus-Polri dan pemberdayaan industri pertahanan;
		5.1.2.	Kesejahteraan dan profesionalisme prajurit;
		5.1.3.	Profesionalisme Polri;
		5.1.4.	Intelijen dan kontra intelijen;
		5.1.5.	Gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut dan wilayah perbatasan darat;
		5.1.6.	Prevalensi penyalahgunaan narkoba; dan
		5.1.7.	Sistem keamanan nasional yang integrative.
6	HUKUM DAN APARATUR	6.1	Sub Bidang Hukum
		6.1.1.	Kualitas penegakan hukum;
		6.1.2.	Pencegahan dan pemberantasan korupsi;
		6.1.3.	Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM.
		6.2	Sub Bidang Aparatur
		6.2.1.	Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
		6.2.2.	Birokrasi yang efektif dan efisien;
		6.2.3.	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.
7	PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG	7.1	Informasi Geospasial
		7.1.1.	Koordinasi dalam penyelenggaraan informasi geospasial;
		7.1.2.	Produksi data dan informasi geospasial;
		7.1.3.	Jaringan distribusi data dan informasi geospasial;
		7.1.4.	Pemanfaatan data dan informasi geospasial;
		7.1.5.	SDM, kelembagaan, iptek dan industri informasi geospasial.
		7.2	Tata Ruang
		7.2.1.	Pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
		7.2.2.	Kelembagaan penyelenggaraan penataan ruang;
		7.2.3.	RTR sebagai acuan pembangunan berbagai sektor.
		7.3	Pertanahan

No	Bidang/Tema	Isu Strategis	
		7.3.1.	Jaminan kepastian hukum hak masyarakat atas tanah;
		7.3.2.	Ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan Tanah (P4T) serta kesejahteraan rakyat.
		7.3.3.	Kinerja pelayanan pertanahan;
		7.3.4.	Ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
		7.4	Perkotaan
		7.4.1.	Kesenjangan yang tinggi antarkota dan pusat pertumbuhan antara; Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI) serta antara kota-kota di Pulau Jawa-Bali dengan di luar Pulau Jawa-Bali;
		7.4.2.	Masih belum terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) di kota dan kawasan perkotaan, sehingga menjadi kurang layak huni;
		7.4.3.	Rendahnya daya saing kota serta ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan kota terhadap perubahan iklim dan bencana;
		7.4.4.	Belum optimalnya pengelolaan perkotaan, terutama di kawasan perkotaan metropolitan dan kawasan perkotaan yang terletak di kabupaten.
		7.5	Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan
		7.5.1.	Tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di perdesaan yang masih rendah;
		7.5.2.	Ketersediaan sarana dan prasarana fisik maupun non-fisik di desa dan kawasan perdesaan yang belum memadai;
		7.5.3.	Ketidakberdayaan masyarakat perdesaan akibat faktor ekonomi maupun non ekonomi
		7.5.4.	Pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa yang memerlukan penyesuaian dengan amanat Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa;
		7.5.6.	Kualitas lingkungan hidup masyarakat desa memburuk dan sumber pangan yang terancam berkurang.
		7.6	Kawasan Transmigrasi
		7.6.1.	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang mencakup pembangunan prasarana dan sarana kawasan transmigrasi, penataan persebaran penduduk, fasilitasi penyediaan dan sertifikasi bidang tanah pada lokasi-lokasi transmigrasi di daerah tertinggal dan perbatasan, serta Kawasan Perkotaan Baru (KPB);
		7.6.2.	Pembangunan sosial ekonomi, termasuk kemandirian pangan, yang mendukung pengembangan kawasan transmigrasi di daerah tertinggal dan perbatasan, serta di Kawasan Perkotaan Baru (KPB).
		7.7	Kawasan Strategis
		7.7.1.	Nilai tambah potensi unggulan daerah. Minimnya permodalan dan pelatihan terkait upaya peningkatan mutu kualitas komoditas daerah maupun peningkatan kapasitas produksi unggulan di daerah;
		7.7.2.	Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sumber daya manusia pelaku usaha pertanian, nelayan, peternak, industri di kawasan strategis masih rendah kapasitasnya, lemahnya peran dan fungsi kelembagaan pengelola kawasan, kualitas tenaga kerja yang belum sesuai dengan kebutuhan kawasan, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna yang masih belum optimal;
		7.7.3.	Debottlenecking regulasi untuk peningkatan iklim investasi dan iklim usaha. Belum harmonisnya hubungan industrial secara tripartit, belum dilaksanakannya pelimpahan kewenangan pusat dan daerah kepada pengelola kawasan sebagaimana diatur oleh

No	Bidang/Tema	Isu Strategis	
			peraturan perundangan, serta masih terkendalanya status lahan dan hutan.
		7.8	Kawasan Perbatasan
		7.8.1.	Keterisolasian kawasan perbatasan negara;
		7.8.2.	Belum ada sistem untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan baik industri maupun perdagangan berbasis potensi sumber daya kawasan perbatasan, serta menjamin pemberdayaan masyarakat perbatasan;
		7.8.3.	Terdapat overlapping claim areas segmen-segmen batas wilayah negara Indonesia dengan negara tetangga;
		7.8.4.	Masih lemahnya pengamanan batas wilayah laut, darat, dan udara di kawasan perbatasan negara;
		7.8.5.	Integrasi pengelolaan dan pembangunan kawasan perbatasan negara dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan
		7.9	Daerah Tertinggal
		7.9.1.	Adanya regulasi yang tidak memihak/disharmonis terhadap percepatan pembangunan daerah tertinggal;
		7.9.2.	Masih lemahnya koordinasi antarpelaku pembangunan untuk percepatan Pembangunan daerah tertinggal
		7.9.3.	Belum optimalnya kebijakan yang afirmatif pada percepatan pembangunan daerah tertinggal;
		7.9.4.	Masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal.
		7.9.5.	Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana publik dasar di daerah tertinggal;
		7.9.6.	Rendahnya produktivitas masyarakat di daerah tertinggal;
		7.9.7.	Belum optimalnya pengelolaan potensi sumberdaya lokal dalam pengembangan perekonomian di daerah tertinggal;
		7.9.8.	Kurangnya aksesibilitas daerah tertinggal terhadap pusat-pusat pertumbuhan wilayah;
		7.9.9.	Belum adanya insentif terhadap sektor swasta dan pelaku usaha untuk berinvestasi di daerah tertinggal.
		7.10	Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
		7.10.1.	Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
		7.10.2.	Penataan kewenangan antartingkat pemerintahan;
		7.10.3.	Penataan daerah;
		7.10.4.	Kerjasama daerah;
		7.10.5.	Harmonisasi peraturan perundangan;
		7.10.6.	Sinergi perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah;
		7.10.7.	Akuntabilitas dan tata pemerintahan;
		7.10.8.	Peningkatan pelayanan publik;
		7.10.9.	Otonomi Khusus.
		7.11	Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah
		7.11.1.	Manajemen sumber daya aparatur pemerintah daerah
		7.12	Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
		7.12.1.	Kemampuan fiskal daerah;
		7.12.2.	Kualitas perencanaan dan penganggaran daerah; dan

No	Bidang/Tema	Isu Strategis	
		7.12.3.	Kualitas belanja dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
8	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA	8.1	Infrastruktur dan Ekonomi
		8.1.1.	Meningkatkan aksesibilitas akibat ketidaktersediaan prasarana dan sarana infrastruktur;
		8.1.2.	Kesiapan bidang infrastruktur dalam ASEAN, dan
		8.1.3.	Kesiapan bidang Infrastruktur dalam menghadapi globalisasi di bidang ekonomi.
		8.2	Infrastruktur, Kependudukan, dan Urbanisasi
		8.2.1.	Rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan angkutan massal yang murah dan nyaman, terutama masyarakat perkotaan
		8.2.2.	Rendahnya aksesibilitas pelayanan infrastruktur di wilayah-wilayah terluar, tertinggal, dan terbatas;
		8.2.3.	Pembangunan infrastruktur terbentur dengan permasalahan ketersediaan lahan yang berkompetisi dengan sektor-sektor lain termasuk properti (perumahan dan permukiman);
		8.2.4.	Kebutuhan infrastruktur perumahan dan permukiman; serta
		8.2.5.	Belum memadainya ketersediaan daya listrik serta masih banyaknya rakyat di wilayah terpencil dan perbatasan yang belum memiliki akses terhadap daya listrik.
		8.3	Infrastruktur dan Peran Badan Usaha
		8.3.1.	Masih kurangnya informasi mengenai proyek baik dari sisi detail teknis maupun informasi keuangan serta analisis terhadap berbagai macam risiko dan jaminan pemerintah untuk pengelolaan risiko tersebut;
		8.3.2.	Masih sulitnya penerapan peraturan terkait dengan KPS oleh para Penanggung Jawab proyek kerja sama (PJKP);
		8.3.3.	Rendahnya kapasitas aparatur dan kelembagaan dalam melaksanakan KPS;
		8.3.4.	Belum optimalnya kebijakan yang didukung kualitas perencanaan proyek KPS bidang infrastruktur yang mengakibatkan pilihan strategi pelaksanaan proyek yang kurang memihak pada KPS sehingga proyek infrastruktur yang seharusnya menarik bagi pihak swasta malah dilaksanakan melalui pembiayaan APBN/APBD, sementara proyek infrastruktur yang tidak menarik justru ditawarkan kepada pihak swasta;
		8.3.5.	Masih kurang memadainya peran pendanaan oleh BUMN/ lembaga keuangan seperti PT SMI dan anak perusahaannya PT IIF serta PT PII yang masing-masing sebagai instrument pembiayaan dan penjaminan pembangunan infrastruktur melalui skema KPS;
		8.3.6.	Belum adanya mekanisme pemberian insentif bagi PJKP dalam melaksanakan KPS;
		8.3.7.	Belum meratanya pembangunan infrastruktur di wilayah Timur;
		8.3.8.	Tingkat pendidikan yang masih rendah dibandingkan dengan wilayah Barat;
		8.3.9.	Rata-rata pendapatan perkapita yang masih rendah;
		8.3.10.	Masih banyak wilayah-wilayah di Timur Indonesia yang belum tersedia fasilitas infrastruktur yang memadai;
		8.3.11.	Belum memadainya peran infrastruktur dalam mengurangi kesenjangan wilayah Barat dan Timur;
		8.3.12.	Belum optimalnya konektivitas baik di dalam koridor ekonomi

No	Bidang/Tema	Isu Strategis	
		8.3.13.	utama maupun aksesibilitas ke wilayah terpencil, perbatasan, dan perbatasan; serta Belum meratanya distribusi pelayanan infrastruktur dasar di wilayah timur.
		8.4	Infrastruktur, Energi, dan Lingkungan
		8.4.1.	Diversifikasi, konservasi energi, dan sistem multimoda yang belum optimal;
		8.4.2.	Kemacetan di kota-kota besar dan menengah serta rusaknya banyak jaringan jalan di daerah menambah parah dan buruknya emisi gas buang dan di sisi lain infrastruktur juga rentan terhadap dampak perubahan iklim sehingga perlu adanya adaptasi maupun mitigasi perubahan iklim;
		8.4.3.	Polusi yang tinggi penyebab utama dari Gas Rumah Kaca (GRK); serta
		8.4.4.	Belum memadainya penyediaan infrastruktur yang ramah lingkungan dan responsif terhadap perubahan iklim dan cuaca ekstrim.
		8.5	Infrastruktur dan Globalisasi
		8.5.1.	Percepatan pembangunan perumahan;
		8.5.2.	Pembangunan infrastruktur/prasarana dasar kawasan permukiman serta energi dan ketenagalistrikan;
		8.5.3.	Menjamin ketahanan air untuk mendukung ketahanan nasional;
		8.5.4.	Penguatan konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan;
		8.5.5.	Pembangunan transportasi massal perkotaan, dan
		8.5.6.	Peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam pembiayaan infrastruktur.
		8.6	Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pembiayaan dalam Penyediaan Infrastruktur
		8.6.1.	Percepatan dan penguatan pengambilan keputusan pada tingkat tertinggi pemerintahan (<i>Championship at the top</i>);
		8.6.2.	Koordinasi dan integrasi dalam perencanaan dan penyiapan proyek infrastruktur KPS;
		8.6.3.	Optimalisasi pendanaan dan pembiayaan yang berkelanjutan;
		8.6.4.	Daftar Proyek Prioritas dan Kualitas Penyiapan Proyek.
9	PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	9.1	Pengamanan produksi untuk kemandirian dan diversifikasi konsumsi pangan;
		9.2	Pengembangan agribisnis, pertanian berkelanjutan dan kesejahteraan petani;
		9.3	Peningkatan produksi dan nilai tambah perikanan serta kesejahteraan nelayan/pembudidaya ikan / pengolah dan pemasaran hasil perikanan / petambak garam
		9.4	Peningkatan tata kelola laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengembangan ekonomi kelautan kelanjutan;
		9.5	Peningkatan produksi hasil hutan dan pengembangan jasa lingkungan;
		9.6	Peningkatan konservasi dan tata kelola hutan serta pengelolaan DAS;
		9.7	Penguatan pasokan, bauran dan efisiensi konsumsi energi;
		9.8	Peningkatan nilai tambah industri mineral dan pertambangan berkelanjutan;
		9.9	Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengembangan pola

No	Bidang/Tema	Isu Strategis	
			produksi dan konsumsi berkelanjutan, dan pelestarian dan pemanfaatan keekonomian kehati;
		9.10	Penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana; dan
		9.11	Penanganan perubahan iklim serta peningkatan kualitas informasi iklim dan kebencanaan.
10	TEMA PEMBANGUNAN WILAYAH PULAU SUMATERA	10.1	Salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional;
		10.2	Lumbung energi nasional, termasuk pengembangan energi terbarukan biomassa;
		10.3	Pengembangan hilirisasi komoditas batubara;
		10.4	Industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, timah, bauksit, dan kaolin;
		10.5	Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan, pariwisata bahari, industri perkebunan, dan industri pertambangan.

Sumber : Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2017

2.3.2.2. Isu Strategis Provinsi Sumatera Barat

Isu strategis pembangunan Provinsi Sumatera Barat :

- a. Pembangunan mental dan peningkatan pengamalan nilai-nilai adat dan agama,
- b. Penanganan bencana alam.
- c. Pengurangan tingkat kemiskinan dan ketimpangan pembangunan antar daerah.
- d. Penguatan struktur ekonomi daerah.
- e. Peningkatan infrastruktur.
- f. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
- g. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- h. Pemberdayaan usaha mikro kecil, menengah dan koperasi.
- i. Peningkatan ketahanan pangan.
- j. Pemanfaatan potensi kelautan dan kemaritiman.
- k. Pengurangan pengangguran.
- l. Globalisasi dan peningkatan daya saing daerah.
- m. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.

2.3.2.3. Isu Strategis Kabupaten Tanah Datar

Isu strategis pembangunan di daerah secara umum adalah :

1. Masih rendahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ABS-SBK dan aturan hukum
2. Belum optimalnya kualitas pelayan kesehatan, kesadaran hidup bersih dan kesehatan lingkungan
3. Belum optimalnya kualitas dan akses pendidikan
4. Belum optimalnya pengelolaan pariwisata daerah
5. Masih adanya pengangguran dan kemiskinan
6. Masih rendahnya investasi di daerah
7. Masih rendahnya penerapan teknologi dan inovasi serta daya saing produk daerah
8. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah
9. Belum optimalnya pelayanan publik dan penerapan e-goverment yang terintegrasi

Adapun isu strategis sesuai aspek pembangunan adalah sebagai berikut:

1) Aspek Geografis dan Potensi Sumber Daya Alam

Berdasarkan identifikasi permasalahan aspek geografi dan potensi sumber daya alam, maka rumusan isu strategis untuk aspek ini adalah:

1. Percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan daerah dengan mempertimbangkan potensi geografis kawasan strategis, konektivitas, kondisi rawan bencana alam serta konstelasi antar kawasan pengembangan di daerah.
2. Optimalisasi perencanaan tata ruang yang telah ada untuk dapat meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan daya dukung lahan dan kawasan budi daya yang berwawasan lingkungan.
3. Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan energy terbarukan dengan tetap memperhatikan kualitas dan keberlanjutan lingkungan, memperbesar skala ekonomi dan peningkatan kegiatan ekonomi di daerah yang lebih potensial.
4. Perencanaan dan pengembangan ekonomi terpadu pada kawasan pengembangan ekonomi daerah dengan melakukan kajian peluang investasi dengan tetap memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan.

2) Aspek Demografi dan Potensi SDM Daerah

Berdasarkan identifikasi masalah pembangunan yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, maka dirumuskan isu strategis sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk usia produktif lebih banyak bila dibandingkan dengan kelompok usia belum atau tidak produktif (anak sekolah dan lansia) dengan rasio ketergantungan sebesar 59,47%, tetapi tingkat pengangguran cenderung fluktuatif, kondisi ini dikhawatirkan akan mendorong terjadinya pengangguran tersembunyi jika peningkatan

penciptaan lapangan kerja tidak sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk usia produktif tersebut.

2. Dalam upaya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran maka diperlukan peningkatan koordinasi dan integrasi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran pada masing-masing SKPD.
3. Dibutuhkan peningkatan kualitas, kuantitas dan pemerataan akses terhadap pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat dalam rangka peningkatan nilai IPM dan daya saing SDM.
4. Dalam upaya peningkatan daya saing tenaga kerja menghadapi era keterbukaan ekonomi dan persaingan bebas maka diperlukan pengembangan pendidikan vokasional berbasis komunitas dan peningkatan keterampilan tenaga kerja daerah.

3) Aspek Infrastruktur, Transportasi, Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan daftar permasalahan yang dapat diidentifikasi tersebut, maka dirumuskan isu strategisnya yaitu:

1. Untuk dapat mendorong mobilitas dan produktivitas barang dan jasa yang dihasilkan daerah, maka diperlukan peningkatan kualitas infrastruktur (jalan, jembatan, irigasi, drainase dan air bersih) dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana guna mengantisipasi berbagai kerawanan bencana alam di daerah.
2. Untuk meningkatkan intensitas dan konektivitas antar daerah dalam kabupaten dan antar kota/kabupaten diperlukan peningkatan sarana dan prasarana perhubungan lalu lintas yang memenuhi standar kelayakan angkutan umum baik antar nagari maupun antar kota dalam provinsi termasuk penataan dan kepastian aturannya.
3. Dalam upaya peningkatan kesehatan lingkungan dan kewaspadaan terhadap berbagai bencana maka diperlukan penataan lingkungan perumahan dan permukiman yang memenuhi persyaratan sanitasi, drainase, pelayanan air bersih dan daya terpasang listrik yang berbasis mitigasi bencana.
4. Untuk menciptakan wilayah administrasi yang memiliki kekuatan hukum maka diperlukan penetapan peraturan daerah tentang batas administrasi nagari, batas administrasi dengan daerah kota dan kabupaten tetangga dengan mempertimbangkan implikasi sosial budaya dan ekonominya di tengah masyarakat
5. Untuk mendorong percepatan perluasan pembangunan daerah maka perlu dilakukan percepatan pembangunan pada pusat-pusat pertumbuhan dan kawasan cepat tumbuh daerah dengan mempertimbangkan potensi kawasan strategis daerah dan konektivitas serta korelasi eksternal antar kawasan pengembangan.
6. Peningkatan dan pemerataan fasilitas serta akses informasi dan komunikasi menjadi kebutuhan yang semakin meluas di tengah masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan daya saing baik sumberdaya manusia maupun komoditas lokal yang dihasilkan dalam menghadapi persaingan global yang semakin kompetitif.

4) Aspek ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan identifikasi masalah pembangunan yang telah dikemukakan di atas, maka dirumuskan isu strategis sebagai berikut:

1. Perlu upaya peningkatan keterkaitan antar dan intra lapangan usaha agar dapat mewujudkan penguatan fundamental makro ekonomi daerah, peningkatan daya dorong terhadap produktivitas, peningkatan nilai tambah ekonomi dan peningkatan daya tahan serta daya saing ekonomi daerah.
2. Usaha Mikro Kecil dan industri non formal memiliki jumlah yang besar di dalam perekonomian daerah, untuk itu diperlukan pemberdayaan dan peningkatan status usaha menjadi usaha formal sesuai aturan berlaku guna meningkatkan daya saing dan penciptaan nilai tambah perekonomian daerah
3. Kebijakan perluasan kesempatan usaha dan bekerja dengan peningkatan jiwa kewirausahaan dan pendidikan vokasional (kejuruan) berbasis komunitas dan sumber daya lokal serta pengembangan ekonomi berbasis kawasan, spesialisasi, kreativitas dan iptek diperlukan untuk mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan serta pemerataan ekonomi.
4. Dalam upaya menghadapi persaingan global diperlukan kebijakan dan regulasi untuk standarisasi produk daerah, pengawasan keamanan produk dan peningkatan akses serta jaringan kerjasama pemasaran komoditas daerah agar dapat bersaing di pasar lokal, nasional dan internasional.
5. Peningkatan kualitas SDM pelaku usaha, dan aparatur pelaksana berbasis iptek, imtak dan budaya serta kearifan lokal diperlukan untuk meningkatkan profesionalitas, daya saing dan kekuatan moral sesuai nilai-nilai lokal, adat dan budaya Minangkabau.
6. Perlu peningkatan kualitas pengelolaan pasar nagari agar mampu menjadi wadah dan media pengembangan serta penguatan jaringan pemasaran produk dan jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha di Kabupaten Tanah Datar.
7. Perlu penataan kelembaga ekonomi dan petani serta kelembagaan lainnya untuk mendorong peningkatan aktivitas, kualitas dan produktivitas ekonomi masyarakat.
8. Perlunya pemberdayaan dan peningkatan Kapasitas kelembagaan petani dan pembudidaya ikan agar dapat berperan optimal dalam aktivitas *on farm* maupun *off farm* dalam rangka mewujudkan ketahanan ekonomi masyarakat.

5) Aspek Kelembagaan, Pemerintahan dan Sosial Budaya

Isu strategis yang perlu diperhatikan dalam upaya perencanaan pemerintahan dan sosial budaya ke depan adalah:

1. Perlu peningkatan kuantitas, kualitas dan peran SDM aparatur pada SKPD dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, santun dan melayani sesuai nilai budaya adat Minangkabau melalui Reformasi Birokrasi dan revolusi mental.
2. Perlu optimalisasi peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mendorong percepatan pembangunan daerah.

3. Diperlukan adanya regulasi dan kepastian hukum dalam rangka pemanfaatan tanah ulayat yang berbasis nilai filosofi budaya Minangkabau.
4. Peningkatan optimalisasi penanganan penanggulangan permasalahan sosial masyarakat dan peningkatan Pengarusutamaan Gender, Perlindungan Anak serta pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan partisipatif.

6) Aspek Sistem Inovasi dan Alih Teknologi Daerah

Isu strategis yang dirumuskan terkait dengan masalah pembangunan dalam aspek ini adalah:

1. Perlu peningkatan kapasitas dan kualitas POSYANTEK (Pusat Layanan Teknologi), dan Balai Benih Ikan (BBI) dalam upaya pengembangan menjadi PAT (Pusat Alih Teknologi) sehingga dapat mendorong tumbuh kembangnya adaptasi teknologi, inovasi dan ekonomi kreatif di daerah.
2. Diperlukan adanya pengembangan kerjasama antar daerah dan lembaga riset perguruan tinggi dan lembaga riset nasional untuk pengembangan inovasi daerah dalam mengembangkan ekonomi berbasis iptek dan sumberdaya lokal.
3. Diperlukan pembentukan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) untuk mendorong peningkatan kemampuan teknologi, daya inovasi dan kreativitas ekonomi masyarakat maupun pelaku usaha dalam rangka menghadapi persaingan ekonomi di era globalisasi dan persaingan bebas.
4. Perlu adanya edukasi dan sosialisasi pemanfaatan teknologi tepat guna, teknologi komunikasi dan informasi untuk menciptakan nilai tambah ekonomi yang sesuai dengan adat dan budaya Minangkabau.

BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi makro dan kondisi perekonomian Kabupaten Tanah Datar pada tahun sebelumnya dan proyeksi kondisi ekonomi dan keuangan daerah tahun 2017, serta sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2018.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2018 (RPJMN 2015-2019) “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan” maka arahan nasional di bidang ekonomi adalah:

- I. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional yang ditetapkan pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 adalah sebesar 6,1%; dengan sasaran per wilayah; Sumatera sebesar 5,97%; Jawa sebesar 6,23%; Bali-Nusa Tenggara sebesar 6,04%; Kalimantan sebesar 4,37%; Sulawesi sebesar 7,35%; Maluku sebesar 6,18% dan Papua sebesar 6,87%.

Untuk mencapai skenario pertumbuhan ekonomi tersebut beberapa upaya yang dilaksanakan pemerintah pusat adalah:

- Investasi Pemerintah secara selektif; dilaksanakan melalui ruang peningkatan investasi yang terbatas, tetapi tetap dijaga dengan merelokasi belanja non produktif ke belanja investasi serta fokus pada proyek yang mendorong produktivitas dan peningkatan aktivitas sektor swasta (infrastruktur listrik, transportasi dan logistik)
- Fasilitasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi; dilaksanakan melalui peningkatan investasi pada 5 (lima) sektor utama penghela pertumbuhan ekonomi daerah (Industri pengolahan, terutama nonmigas, pertanian, perdagangan, konstruksi dan informasi telekomunikasi) dan 2 (dua) sektor prioritas yang akan ditingkatkan perannya (Pariwisata dan Jasa Keuangan).
- Kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Pusat untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 6,1 adalah:
 1. Deregulasi peraturan terkait investasi
 2. Pembenahan iklim investasi terutama di daerah (termasuk penguatan PTSP daerah dan standarisasi layanan dan perijinan investasi).
 3. Fasilitasi masalah investasi (RTRW, infrastruktur, penguatan data potensi investasi, penyelesaian pengaduan masalah investasi).
 4. Pemanfaatan dan penyaluran dana repatriasi untuk investasi

5. Perbaiki iklim ketenagakerjaan: penyempurnaan UU ketenagakerjaan (harmonisasi UU 13/2003 dengan SJSN)

II. Pencapaian target kemiskinan sebesar 12,5% dengan sasaran per wilayah; Sumatera sebesar 10,25%; Jawa sebesar 9,45%; Bali-Nusa Tenggara sebesar 13,87%; Kalimantan sebesar 5,40%; Sulawesi sebesar 9,96%; Maluku sebesar 12,52% dan Papua sebesar 25,85%.

III. Pencapaian target tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,44% dengan sasaran per wilayah; Sumatera sebesar 4,80%; Jawa-Bali sebesar 5,90%; Bali-Nusa Tenggara sebesar 2,80%; Kalimantan sebesar 5,10%; Sulawesi sebesar 4,00%; Maluku sebesar 4,90% dan Papua sebesar 3,60%.

IV. Laju Inflasi 3,5%

Tabel berikut merupakan Asumsi Ekonomi Makro Sumatera Barat yang termuat pada Rancangan Awal RKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 antara lain:

INDIKATOR EKONOMI	RPJMN	RPJMD Provinsi Sumatera barat			
		2016		2017	2018
		Target	Realisasi		
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,1	5,58	4,83	6,16	6,26
Laju Inflasi (%)	3,5	5-6	5,02	5-6	5-6
Investasi	5.240 T	42,55 T		45,62 T	48,92 T
PDRB Per Kapita (Juta Rp)	64,721	36,48	30,72*	38,68	41,02

Mengacu kepada kebijakan ekonomi nasional dan memperhatikan asumsi kondisi ekonomi makro Pemerintah Provinsi Sumatera Barat maka dalam rangka mewujudkan pencapaian visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2016-2021, perlu didukung dengan arah dan kebijakan pembangunan ekonomi daerah, antara lain:

1. Optimalisasi pemenuhan target kinerja sesuai Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar yang merupakan kewenangan pemerintah daerah sesuai amanah UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
2. Peningkatan fasilitasi sarana dan prasarana serta sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka pengembangan 2 (dua) sektor utama penggerak ekonomi daerah; Pariwisata dan Pertanian.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana/infrastruktur wilayah

terutama dalam rangka membuka aksesabilitas masyarakat ke Kabupaten Tanah Datar.

4. Peningkatan PAD dari sektor pariwisata daerah.
5. Peningkatan Penerimaan Dana Transfer Daerah dari Dana Insentif Daerah, melalui peningkatan kinerja dalam kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik serta perekonomian dan kesejahteraan termasuk pengendalian inflasi.
6. Pengalokasian Dana Desa untuk kebutuhan revitalisasi objek wisata yang merupakan asset pemerintah nagari

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2016 Dan Perkiraan Tahun 2017

Kondisi ekonomi Kabupaten Tanah Datar tahun 2016 dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi dari target yang ditetapkan pada tahun 2016 sebesar 5,55% terealisasi sebesar 5,98%. Pada tahun 2017 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar diprediksi dapat tumbuh menjadi sebesar 6,0% walaupun pada RPJMD Kabupaten Tanah Datar target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan sebesar 5,67%. Data statistic ekonomi daerah tahun 2016-2017 sebagaimana table berikut:

INDIKATOR EKONOMI	2016		2017	2018
	Target	Realisasi		
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,55	5,98	6,00	6,10
Laju Inflasi (%)	2,24	3,93	2,42	2,72
PDRB Per Kapita (Juta Rp)	36,48	32,77	38,68	40,21
Angka Kemiskinan	5,23		5,18	5,12
Angka Pengangguran	4,22	4,02	3,96	3,69

Struktur ekonomi Kabupaten Tanah Datar dalam rentang waktu beberapa tahun terakhir masih didominasi oleh Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, seperti terlihat pada tabel berikut.

Lapangan Usaha		2012	2013	2014	2015	2016
I	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	34,20	33,24	33,84	33,68	34,47
B	Pertambangan dan Penggalian	2,86	2,98	3,34	3,58	4,38
C	Industri Pengolahan	13,38	12,84	12,28	11,95	11,15
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,11	0,10	0,11	0,10
F	Konstruksi	8,64	9,20	9,09	9,37	8,72

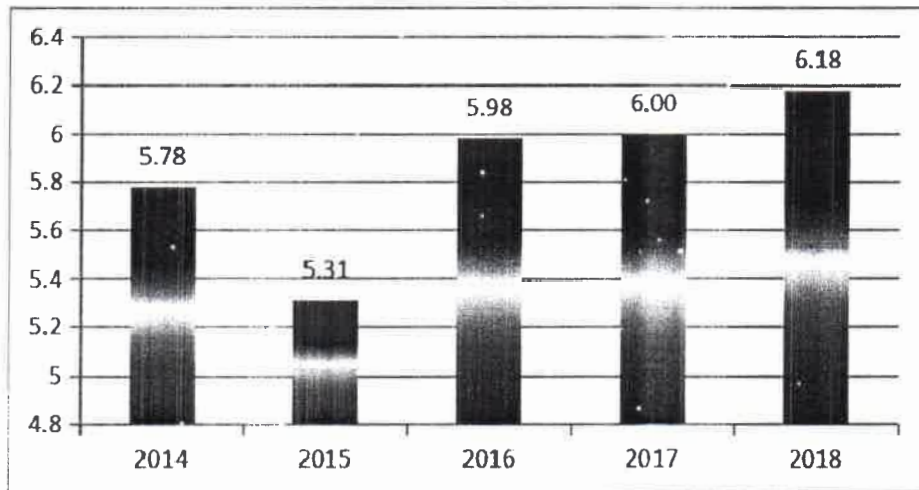
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,93	12,00	11,95	12,41	11,56
H	Transportasi dan Pergudangan	7,64	8,05	8,08	8,18	7,90
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,61	0,62	0,62	0,65	0,60
J	Informasi dan Komunikasi	4,52	4,35	4,36	4,05	4,22
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,59	2,59	2,54	2,55	2,42
L	Real Estat	1,53	1,58	1,60	1,65	1,58
M,N	Jasa Perusahaan	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,47	6,57	6,35	5,83	5,93
P	Jasa Pendidikan	2,62	2,83	2,85	2,96	2,78
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,27	1,31	1,30	1,30	1,25
R,S, T,U	Jasa lainnya	1,55	1,67	1,65	1,66	2,86
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100	100

Sumber : BPS Tanah Datar

Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar pada tahun dari tahun 2010 hingga tahun 2016 berfluktuasi. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar tahun 2010-2014 serta prediksi tahun 2015-2016 digambarkan pada grafik di bawah ini:

Grafik : 3.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2010 - 2016



Nilai PDRB Kabupaten Tanah Datar tahun 2010-2015 atas dasar harga berlaku yang menggambarkan jumlah nilai produksi pada 17 (tujuh belas) lapangan tergambar pada tabel berikut :

Tabel. 3.3
Nilai PDRB Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011-2015
Berdasarkan harga berlaku

No	Tahun	Nilai PDRB (Milyar Rupiah)
	2010	6.034,24
1.	2011	6.766,49
2.	2012	7.406,29
3.	2013	8.163,91
4.	2014	9.187,75
5.	2015	9.875,98

Sumber : BPS Kabupaten Tanah Datar

¹ Angka estimasi

PDRB Perkapita

PDRB Perkapita merupakan nilai pendapatan seluruh sektor produksi dibagi dengan jumlah penduduk suatu daerah. PDRB Perkapita tidak menggambarkan rata-rata pendapatan masyarakat secara riil. Namun dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran masyarakat. Perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Tanah Datar selama tahun 2011-2014 tergambar pada tabel dibawah ini.

PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha (Juta Rp), 2010–2015

Tahun	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Produk Domestik Regional Bruto (juta rupiah)	17,76	19,85	21,66	23,78	26,63	28,64
* Angka sementara						
** Angka sangat sementara						

Sumber : BPS Kabupaten Tanah Datar

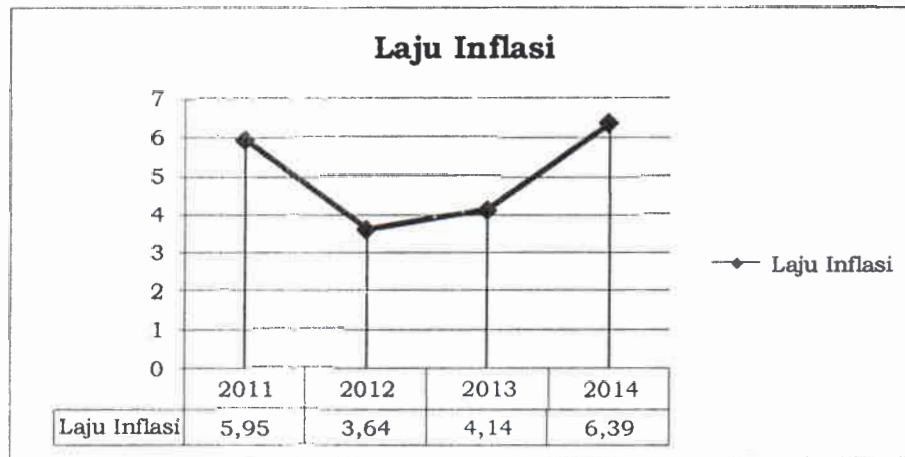
Dari tabel diatas terlihat bahwa PDRB perkapita Kabupaten Tanah Datar selalu meningkat dari rentang waktu tahun 2010-2015. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat pendapatan masyarakat juga meningkat dari tahun ke tahun.

Laju Inflasi

Inflasi menggambarkan fenomena kecenderungan kenaikan harga-harga secara umum dan terus menerus dan diikuti oleh kenaikan harga barang lainnya. Selama tahun 2011-2014, laju inflasi PDRB Kabupaten Tanah Datar berfluktuasi. Tahun 2011 laju inflasi sebesar 5,95%, Tahun 2012 laju inflasi sebesar 3,64%, Tahun 2013 laju inflasi sebesar 4,14%, tahun 2014 laju inflasi 6,39%.

Laju inflasi Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2011-2014 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.2



Dari grafik diatas terlihat bahwa tingkat inflasi di Kabupaten Tanah Datar masih ringan ($< 10\%$). Hal ini masih menguntungkan karena perekonomian daerah masih tetap tumbuh yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, mendorong orang lebih bergairah bekerja karena meningkatnya permintaan barang dan meningkatnya tabungan masyarakat.

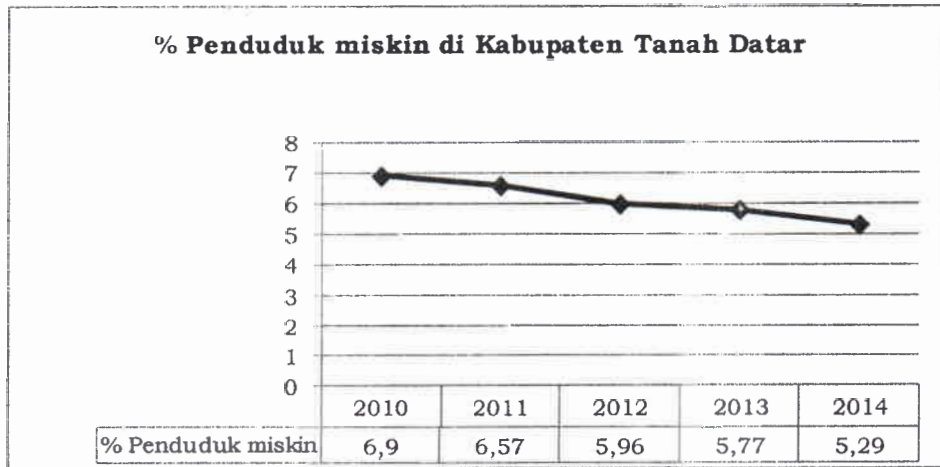
Investasi Daerah

Peningkatan pertumbuhan ekonomi juga ditentukan oleh peningkatan investasi di daerah. Investasi yang ada di daerah dipengaruhi oleh situasi dan kondisi sosial, politik dan perekonomian daerah. Investasi pada umumnya berasal dari investasi Pemerintah, Swasta dan masyarakat. Untuk meningkatkan investasi Pemerintah dilakukan dengan cara meningkatkan porsi belanja publik sedangkan untuk meningkatkan investasi pihak swasta dan masyarakat perlu dilakukan peningkatan promosi serta menggali peluang – peluang investasi yang ada di daerah.

Kemiskinan dan Pengangguran

Tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat juga dapat di ukur dari persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran yang ada di suatu daerah. Tingkat kemiskinan Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2014 sebesar 5,29%, hal ini semakin menurun jika dibandingkan pada tahun 2013 sebesar 5,77% seperti terlihat pada grafik berikut.

Grafik 3.3



Kebijakan untuk penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran dilaksanakan antara lain melalui peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, peningkatan kualitas dan keterampilan tenaga kerja dan optimalisasi pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan baik oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten serta dengan melibatkan seluruh stakeholder.

3.1.2 Tantangan Dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018

Dalam rangka merumuskan tantangan dan prospek ekonomi daerah dilakukan analisis atas kondisi internal ekonomi daerah yang dilihat dari kekuatan dan kelemahan sedangkan dari kondisi eksternal terdapat peluang dan ancaman terhadap pencapaian tujuan-tujuan pembangunan daerah

Kondisi Internal Pemerintah Kabupaten Tanah Datar

Kekuatan antara lain:

1. Memiliki kualitas dan kuantitas lahan yang baik untuk pengembangan komoditi pertanian dan peternakan
2. Memiliki banyak potensi destinasi objek wisata alam dan budaya yang dapat dikembangkan untuk peningkatan perekonomian masyarakat
3. Memiliki keunggulan historis sebagai daerah asal muasal masyarakat minangkabau dan pusat Kerajaan Minangkabau
4. Memiliki potensi kuantitas tenaga kerja yang cukup untuk mendukung perekonomian daerah
5. Memiliki tingkat keamanan yang mendukung pariwisata dan investasi kedaerah

Kelemahan, antara lain:

1. Belum optimalnya produktivitas hasil pertanian dan peternakan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat
2. Terjadi kesulitan pengairan lahan pertanian di beberapa kecamatan di Kabupaten Tanah Datar

3. Belum optimalnya pengelolaan destinasi objek wisata daerah
4. Belum optimalnya industri pendukung pariwisata daerah seperti belum adanya industri kerajinan cendera mata khas Kabupaten Tanah Datar, kemasan oleh-oleh khas Tanah Datar yang belum baik dan
5. Kurangnya pemahaman adat dan budaya minangkabau terutama pada generasi muda.
6. Masih rendahnya kualitas SDM angkatan kerja Kabupaten Tanah Datar
7. Kurangnya permodalan KUMKM
8. Rendahnya kualitas produk pertanian maupun industri kecil
9. Kurangnya akses pemasaran hasil pertanian, perkebunan dan UMKM Kabupaten Tanah Datar

Kondisi Eksternal Pemerintah Kabupaten Tanah Datar

Peluang antara lain:

1. Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu lokasi proyek prioritas nasional dalam bidang ketahanan pangan pada RKP Tahun 2018, diharapkan Kabupaten Tanah Datar dapat menjadi lokasi pelaksanaan proyek nasional ketahanan pangan.
2. Meningkatnya kebutuhan komoditi pertanian seperti kakao, kopi, karet baik dari industri pengolahan dalam negeri maupun untuk kebutuhan ekspor.
3. Salah satu majalah pariwisata internasional dari New York, Majalah Travel Budget menobatkan Nagari Tuo Pariangan sebagai desa terindah di dunia
4. Industri pariwisata merupakan industri yang mengalami peningkatan cukup tinggi pada tahun 2016, hal ini berarti minat masyarakat untuk berwisata semakin besar.
5. Meningkatnya penyaluran dana bantuan permodalan bagi KUMKM dari pemerintah pusat melalui berbagai program pendanaan secara nasional.

Ancaman antara lain:

1. Semakin berkembangnya pariwisata daerah tetangga

a. Tantangan Perekonomian Daerah

Tantangan perekonomian yang umumnya dihadapi daerah-daerah di Indonesia yang relevan dengan kondisi Kabupaten Tanah Datar antara lain sebagai berikut:

1. Tingkat kemiskinan yang masih tinggi, pada tahun 2016, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 28 juta orang atau 10,86 persen dari jumlah penduduk. Terjadi penurunan, namun penurunannya melambat dan jumlahnya masih tinggi.
2. Kerentanan penduduk Indonesia yang hidup di atas garis kemiskinan masih rentan terhadap guncangan ekonomi.
3. Kesenjangan ditandai dengan tingkat rasio gini yang masih cukup tinggi yaitu di angka 0,39. Meski sudah sedikit menurun, tapi pertumbuhan yang

condong lebih memberikan manfaat kepada kelompok menengah ke atas.

4. Tingkat pengangguran terbuka yang cukup tinggi yaitu sebesar 5,5 persen.
5. Kondisi fiskal yang masih dihadapkan pada persoalan belum optimalnya penerimaan negara dan akurasi arah belanja yang masih harus dipertajam untuk dapat menjawab permasalahan pembangunan. Serta Defisit anggaran harus dijaga dan keseimbangan primer masih harus diperbaiki.

b. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018

1. Pengembangan budidaya komoditi pertanian unggulan
2. Pen pariwisata daerah dengan menjadikan Kabupaten Tanah Datar sebagai ikon wisata budaya di Sumatera Barat
3. Pengembangan investasi daerah melalui kebijakan regulasi yang transparan dan akuntabel.
4. Peningkatan daya saing UKM dan IKM melalui pengembangan produk unggulan
5. Penciptaan informasi dan jejering pemasaran yang lebih luas baik ditingkat regional, nasional maupun international
6. Peningkatan mobilitas orang dan barang melalui peningkatan infrastruktur daerah

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar didasarkan pada pendekatan kinerja dan komitmen untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Anggaran kinerja adalah suatu anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan atau output dari rencana alokasi biaya atau input yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi semua komponen keuangan. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Prinsip pengelolaan keuangan tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan keuangan daerah pada RKPD Kabupaten Tanah Datar tahun 2017 mencakup pengelolaan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan

Proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan sebagaimana tercantum pada tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2016-2018

NO	Uraian	Jumlah		
		Realisasi Tahun ⁽¹⁾ (n-2) 2016	Tahun Berjalan (n-1) 2017	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana (n) 2018 ⁽²⁾
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
I.	PENDAPATAN	1.181.520.573.469,84	1.266.798.072.601,00	1.410.906.498.495,77
I.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	118.932.220.329,84	128.397.031.000,00	147.297.166.784,07
I.1.1	Pajak Daerah	11.772.646.398,00	12.932.920.000,00	14.455.386.781,66
I.1.2	Retribusi daerah	8.020.772.905,00	7.472.406.000,00	12.284.297.622,17
I.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	22.072.440.727,00	28.132.959.000,00	27.511.364.898,99
I.1.4	Lain-lain PAD yang sah	77.066.360.299,84	79.858.746.000,00	93.046.177.481,25
II.	DANA PERIMBANGAN	963.487.573.519,00	986.642.878.000,00	1.141.044.252.406,50
II.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	15.670.214.545,00	17.189.152.000,00	16.159.615.000
II.2	Dana Alokasi Umum	707.992.904.000,00	707.992.904.000,00	750.472.478.240,00
II.3	Dana Alokasi Khusus	239.824.454.974,00	261.460.822.000,00	374.412.159.166,50
III.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	99.100.779.621,00	111.758.163.601,00	122.565.079.305,20
III.1	Hibah	319.071.125,00	5.453.241.601,00	3.000.000.000,00
III.2	Dana Bagi Hsl Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya	39.489.871.496,00	36.335.150.000,00	41.898.711.140,00
III.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	53.999.837.000,00	69.969.772.000,00	70.178.188.165,20
III.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	5.292.000.000,00	1.301.213.361.602,00	7.488.180.000,00

Sumber data: Hasil rumusan TAPD Kabupaten Tanah Datar

(1) Laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015

(2) RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pendapatan daerah tahun 2015 dan 2016 cenderung meningkat. Sumber pendapatan terbesar berasal dari dana perimbangan (83,99%), hal ini menunjukkan tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah. Sedangkan pendapatan asli daerah memberikan kontribusi sebesar 9,03%.

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Untuk meningkatkan pendapatan daerah, kebijakan yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah

Upaya meningkatkan kemampuan pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) diarahkan pada usaha-usaha yang terus menerus dan berlanjut agar pendapatan asli daerah terus meningkat, sehingga pada akhirnya diharapkan akan dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber pendapatan dari pemerintah pusat. Dalam upaya meningkatkan PAD pada dasarnya ditempuh melalui kebijakan berikut :

1. Intensifikasi

Intensifikasi PAD dilakukan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat dan teliti. Dalam upaya intensifikasi mencakup aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan SDM, yang dilaksanakan melalui upaya-upaya berikut :

- 1) Optimalisasi pengelolaan pariwisata daerah dalam rangka meningkatkan kontribusi pariwisata terhadap PAD
- 2) Penyempurnaan peraturan daerah dan peraturan Bupati yang terkait dengan penyesuaian tarif retribusi;
- 3) Meningkatkan kegiatan penyuluhan/ penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak maupun retribusi.
- 4) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian.
- 5) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengelola PAD.
- 6) Peningkatan pengelolaan pendapatan daerah yang didasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan profesionalisme;
- 7) Pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan asli daerah;
- 8) Optimalisasi pengelolaan asset daerah;
- 9) Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- 10) Optimalisasi pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada RSUD M. Ali Hanafiah.

2. Ekstensifikasi

Melaksanakan kajian-kajian teknis yang berkaitan dengan sumber-sumber objek pendapatan yang belum tertampung di dalam peraturan daerah.

b. Dana Perimbangan

Ketergantungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terhadap pemerintah pusat sangat tinggi, hal ini terlihat dari tingginya kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah. Dana Perimbangan tersebut terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Mengingat tingginya ketergantungan tersebut, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan dana perimbangan yaitu, sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Penerimaan Dana Transfer Daerah dari Dana Insentif Daerah, melalui peningkatan kinerja dalam kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah,

pelayanan dasar publik serta perekonomian dan kesejahteraan termasuk pengendalian inflasi.

- 2) Melakukan konsolidasi data dengan Badan Pusat Statistik, sehingga data yang digunakan dalam penghitungan dana perimbangan sudah merupakan data yang akurat.
- 3) Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat, DPR RI dan DPD RI dan Pemerintah Provinsi.
- 4) Memfasilitasi upaya peningkatan penerimaan Negara dari sektor pajak dan non pajak.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan Daerah yang berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak Provinsi, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan daerah Kabupaten Tanah Datar. Usaha-usaha yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan daerah lain-lain pendapatan daerah yang sah antara lain:

- 1) Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah serta mencari peluang-peluang untuk mendapatkan bantuan berupa hibah dan dana penyesuaian otonomi daerah.
- 2) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dalam peningkatan penerimaan pajak provinsi karena hal ini akan menyangkut besarnya bagi hasil untuk daerah dari Pajak Provinsi.

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah diarahkan dalam bentuk:

- a. Pemenuhan gaji PNS dengan mengantisipasi kenaikan gaji tahun 2017
- b. Mengalokasikan anggaran secara proporsional untuk pemenuhan 10 prioritas pembangunan yang tersebar pada urusan wajib dan urusan pilihan
- c. Penganggaran untuk mendukung program nasional
- d. Pemecahan terhadap masalah mendesak antara lain penanganan bencana alam dan kerawanan sosial
- e. Memprioritaskan program dan kegiatan yang belum dapat diselesaikan pada tahun anggaran sebelumnya
- f. Pencapaian target SPM

Selanjutnya dapat dilihat alokasi realisasi dan perkiraan belanja daerah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.6
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah tahun 2016 -2018

No	Uraian	Jumlah		
		Realisasi Tahun (n-2) 2016	Tahun Berjalan (n-1) 2017	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana (n) 2018
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
II,	BELANJA	1.382.337.804.766,85	1.306.213.361.602,00	1,469,088,154,651.75
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	912.275.246.766,85	807.499.369.760,00	931.872.807.234,55
2.1.1	Belanja Pegawai	746.702.691.360,85	612.303.742.700,00	
2.1.2	Belanja Hibah	15.670.505.000,00	11.240.000.000,00	
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	354.960.000,00	2.039.510.000,00	
2.1.4	Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan desa	2.621.952.910,00	2.768.617.900,00	
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa (Nagari) dan Parpol	142.969.673.500,00	165.388.499.160,00	
2.1.6	Belanja Tak Terduga	3.955.463.996,00	13.759.000.000,00	
2.2	BELANJA LANGSUNG	470.062.558.000,00	498.713.991.842,00	537.215.347.417,20

Sumber data: Hasil rumusan TAPD Kabupaten Tanah Datar

Belanja tidak langsung adalah belanja yang diperuntukan bagi belanja pegawai termasuk gaji dan tambahan penghasilan, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa dan parpol dan belanja tidak terduga.

Rencana belanja pegawai tahun 2017 diproyeksikan naik sebesar 6% hal ini dipengaruhi oleh beberapa kebijakan pemerintah antara lain:

1. Antisipasi kenaikan gaji pegawai
2. Penambahan formasi pegawai baru
3. Penyesuaian tambahan penghasilan

3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah dalam hal ini meliputi penerimaan pembiayaan yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SiLPA) serta pengeluaran pembiayaan terdiri dari penyertaan modal kepada BUMD dan pada bank Nagari.

Arah kebijakan pembiayaan daerah adalah :

- a. Untuk mengantisipasi SiLPA, maka diupayakan untuk lebih kecil dari tahun sebelumnya karena semakin efektifnya perencanaan dan penyerapan anggaran.

- b. Terhadap penyertaan modal pada BUMD dilaksanakan seefektif mungkin tergantung kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Selanjutnya dapat dilihat alokasi realisasi dan perkiraan pembiayaan daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.7
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah 2016-2018

No	Uraian	Jumlah		
		Realisasi Tahun (n-2) 2016	Tahun Berjalan (n-1) 2017	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana (n) 2017
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
III.	PEMBIAYAAN DAERAH	119.360.111.586,96	120.856.787.802,10	75.347.426.814,00
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	119.360.111.586,96	120.856.787.802,10	75.347.426.814,00
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SILPA)	119.355.861.586,96	120.856.787.802,10	75.347.426.814,00
3.1.3	Penerimaan Piutang daerah	4.250.000,00	-	-
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	17.000.000.000,00	-	-
3.2.1	Penyertaan Modal pada Bank Nagari	17.000.000.000,00	-	-

Sumber data: Hasil rumusan BKD Kabupaten Tanah Datar

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021 menetapkan bahwa visi pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan adalah untuk TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH DATAR YANG MADANI, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA DALAM NILAI-NILAI ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Madani : adalah masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang harmonis, demokratis, menjunjung tinggi etika, moralitas, transparan, toleransi, berpotensi, aspiratif, bermotivasi, berpartisipasi, mampu berkoordinasi, sederhana, sinkron, integral, emansipasi, menghargai hak asasi dan nilai-nilai kemanusiaan, serta maju dan modern dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berbudaya : adalah masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang santun bertutur kata, sopan dalam berperilaku sesuai dengan adat istiadat dan budaya yang ada, mengekspresikan dan menghargai nilai-nilai adat budaya dalam kehidupan bermasyarakat luas.
- Sejahtera : adalah suatu kondisi kondusif yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Tanah Datar sehingga dapat bekerja dengan tenang, nyaman, aman untuk meningkatkan perekonomian keluarganya. Sejahtera berarti juga dapat memenuhi kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, kebutuhan keluarga pada umumnya, punya pekerjaan tetap yang menghasilkan dan semakin hari terus meningkat.
- Nilai-nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah : adalah kondisi dimana seluruh unsur pemerintah, lembaga, organisasi dan masyarakat secara bersama-sama mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau dalam setiap aktivitas kehidupan yang berlandaskan kepada ajaran agama Islam.

Misi pembangunan RPJMD 2016 – 2021 :

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama, adat dan budaya
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, sehat, cerdas, berkarakter dan sejahtera berdasarkan falsafah ABS-SBK
3. Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
5. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang akan dicapai tahun 2016 – 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH DATAR YANG MADANI, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA DALAM NILAI-NILAI ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH		
MISI	TUJUAN	SASARAN
MISI 1 : Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama, adat dan budaya	1. Meningkatkan nilai-nilai kehidupan yang islami, beradat dan berbudaya	1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama 2. Menjadikan Kabupaten Tanah Datar sebagai kabupaten tahfidz 3. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama islam 4. Meningkatnya kualitas lembaga keagamaan di masyarakat 5. Meningkatnya pengamalan adat dan nilai-nilai budaya
MISI 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, sehat, cerdas, berkarakter dan sejahtera berdasarkan falsafah ABS-SBK	1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	1. Meningkatnya mutu pendidikan 2. Meningkatnya prilaku positif siswa, melalui pelaksanaan ABS-SBK sebagai mata pelajaran wajib 3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 4. Meningkatnya pengendalian kependudukan dan keluarga berencana 5. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak 6. Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 7. Pemberdayaan masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial
MISI 3 : Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.	1. Meningkatnya harmonisasi dan rasa aman di tengah masyarakat	1. Meningkatnya penegakan dan kepastian hukum 2. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel
	2. Mengoptimalkan kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah	1. Meningkatnya kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah

VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH DATAR YANG MADANI, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA DALAM NILAI-NILAI ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH		
MISI	TUJUAN	SASARAN
MISI 4 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah	1. Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan 2. Meningkatnya kualitas infrastruktur jembatan 3. Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi 4. Meningkatnya kualitas infrastruktur air bersih dan sanitasi 5. Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman
	2. Meningkatkan pengelolaan tata ruang dan kelestarian lingkungan hidup	1. Meningkatnya penataan kawasan strategis kabupaten 2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
	3. Meningkatkan pengelolaan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran	1. Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran
MISI 5 : Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah	1. Meningkatnya pembangunan ekonomi	1. Meningkatnya pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan
	2. Menjadikan Tanah Datar sebagai tujuan wisata utama daerah Sumatera Barat, tujuan wisata nasional dan internasional	1. Meningkatnya kunjungan wisatawan

4.2. Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2018

Tema pembangunan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 :

“Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Agama, Adat, Pendidikan, Kesehatan) dan Pembangunan Ekonomi Daerah Dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”

Prioritas pembangunan :

1. Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, adat dan budaya.
2. Peningkatan kualitas pendidikan, derajat kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat.
3. Optimalisasi pembangunan pariwisata daerah.
4. Pengurangan pengangguran dan kemiskinan.

5. Peningkatan ketahanan pangan, pemberdayaan UMKM dan pengembangan perdagangan.
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah.
7. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pelaksanaan reformasi birokrasi dan penerapan e-government.
8. Penanggulangan bencana dan pelestarian lingkungan hidup.
9. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Tabel 4.2

Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018

Nasional	Kabupaten Tanah Datar	Sumatera Barat
1. Pendidikan	Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, adat dan budaya	Pembangunan mental dan pengamalan agama dan abs-sbk dalam kehidupan masyarakat
2. Kesehatan	Peningkatan kualitas pendidikan, derajat kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat	Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan
3. Perumahan dan pemukiman	Optimalisasi pembangunan pariwisata daerah	Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan
4. Pengembangan dunia usaha dan pariwisata	Pengurangan pengangguran dan kemiskinan	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
5. Ketahanan energi	Peningkatan ketahanan pangan, pemberdayaan umkm dan pengembangan perdagangan	Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis
6. Ketahanan pangan	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah	Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, umkm dan peningkatan investasi
7. Penanggulangan kemiskinan	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pelaksanaan reformasi birokrasi dan penerapan e-government	Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan
8. Infrastruktur,	Penanggulangan bencana	Penurunan tingkat

konektivitas, dan kemaritiman	dan pelestarian lingkungan hidup	kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal
9. Pembangunan wilayah	Peningkatan kesadaran hukum masyarakat	Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur
10. Politik, hukum dan pertahanan keamanan		Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Kebijakan umum dan program pembangunan dirumuskan untuk menggambarkan keterkaitan antara urusan pemerintahan yang dilaksanakan dengan indikator kinerja yang menjadi acuan dalam penyusunan program-program pembangunan daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Kebijakan umum pembangunan daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 - 2021 yang sekaligus ditetapkan menjadi 4 (empat) Gerakan Terpadu Unggulan Pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. **Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pendidikan**, difokuskan pada pengembangan kemampuan, keahlian dan kapasitas SDM sejak dini melalui berbagai proses sehingga tercipta SDM yang beriman, sehat, cerdas, berkarakter dan sejahtera.
2. **Peningkatan pembangunan pertanian**, difokuskan pada peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya daerah secara efektif dan efisien, dengan pemanfaatan dan pengembangan teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat.
3. **Peningkatan dan pengembangan pariwisata**, difokuskan pada peningkatan dan pengembangan destinasi wisata budaya untuk mewujudkan Kabupaten Tanah Datar sebagai tujuan utama wisata budaya daerah dan nasional.
4. **Peningkatan pelayanan publik**, difokuskan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.

BAB VI
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 merupakan tahun ketiga perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan memperhatikan rencana program, sasaran, dan pagu indikatif yang disusun dalam rancangan perubahan RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021.

Dokumen RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyusun Rancangan APBD yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2018 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2018. Selanjutnya RKPD ini akan menjadi ukuran kinerja bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar khususnya Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2018.

Dengan disusunnya dokumen RKPD Kabupaten Tanah Datar tahun 2018 ini diharapkan pelaksanaan proses pembangunan di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 akan lebih terarah, menyeluruh, berkesinambungan, berkelanjutan dan tepat sasaran sesuai dengan tema pembangunan yang telah ditetapkan yaitu "Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Agama, Adat, Pendidikan, Kesehatan) dan Pembangunan Ekonomi Daerah Dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Baik".

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa peran RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 sangat penting dan strategis, sehingga perlu disusun kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Pemerintah dan segenap stakeholders pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang dimuat dalam RKPD Tahun 2018 dengan sebaik-baiknya dengan mengedepankan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan
2. Perangkat Daerah wajib menyusun rencana kerja dengan mengacu RKPD Tahun 2018 sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan
3. Dalam upaya menjamin penyelenggaraan RKPD dengan efisien dan efektif serta terwujudnya sinkronisasi dan sinergitas penjabaran RKPD ke dalam Renja Perangkat Daerah dan KUA Tahun 2018, Baperlitbang Kabupaten Tanah Datar dapat melakukan analisis dan pemantauan proses dimaksud.

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

